



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	17
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Direktur Utama Perum Perhutani; dan 2. Direktur Utama PT Inhutani I s.d. V
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 2 Desember 2019
Waktu	:	10.35 WIB – 16.20 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Acara	:	Membahas: 1. Prospek Pengembangan Usaha Karet, Kopi dan Komoditas Lainnya Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V 2. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Sudin, S.E. (Ketua Komisi IVDPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Anggota yang Hadir	:	A. Anggota DPR RI: 41 Anggota Dari 54 anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 10 dari 12 anggota 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Ir. Mindo Sianipar

4. Ir. Effendi Sianipar
5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
6. Vita Ervina, S.E.
7. Drs. I Made Urip, M.Si.
8. Dr. Sutrisno, S.E., M.Si.
9. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
10. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

7 dari 8 anggota

1. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. Ir. Ichsan Firdaus
4. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
5. Ir. Panggah Susanto, M.M.
6. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

5 dari 6 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV)
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Sumail Abdullah
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
5. Ir. H. T.A. Khalid, M.M.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

4 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV)
2. Hj. Sri Wulan, S.E.
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. Yessy Melania, S.E.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. H. Muhtarom, S.Sos.
2. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
4. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. DR. H. Suhardi Duka, M.M.
2. Hj. Nuraeni, S.Sos., M.Si.
3. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

5 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto. S.E., M.M.
3. Dr. Handi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S. Ag., M.H.
2. Slamet Ariyadi, S.Psi

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K.H. Asep A. Moushul, S.sy
2. Ema Umiyatul Chusnah

B. Pemerintah:

1. Denaldy Mulino Mauna, S.E., M.H., M.B.A., M.S. (Direktur Utama Perum Perhutani);
2. Agus Setya Prastawa (Direktur Utama PT Inhutani I);
3. Pramusti Indrascaryo (Direktur Utama PT Inhutani II);
4. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
5. Ir. Ahmad Ibrahim, M.Sc. (Direktur Utama PT Inhutani IV); dan
6. Ir. Natalas Anis Harjanto, M.Sc. (Direktur Utama PT Inhutani V).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Perhutani dan Direktur Utama PT. Inhutani I sampai dengan V dalam rangka membahas proyek pengembangan Usaha Karet Kopi komunitas lainnya oleh Perum Perhutani dan Inhutani V.

Jadi Bapak-bapak yang hadir, kami sengaja mengundang ke sini karena perlu Bapak-bapak ketahui BUMN ini selama ini kan banyak yang rugi. Salah satu contoh PTPN VII di Lampung di kampung saya. Itu mungkin asetnya dari sekian puluh triliun hutangnya juga mungkin akan lebih banyak. Jadi kami mengundang Bapak-bapak ke sini untuk mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Kalau bisa untung *alhamdulillah*, kalau tidak jangan sampai rugi terlalu banyak.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Menurut laporan Sekretariat Komisi IV saat ini Rapat Dengar Pendapat Komisi IV telah dihadiri dan ditandatangani oleh 19 anggota Komisi IV dari 9 fraksi. Maka untuk itu belum mencapai kuorum kita skors 5 menit.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)

Hari ini dimulai pada pukul 10.35 WIB dan akan diakhiri pada pukul 15.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama. Dengan acara susunan sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Dirut Perhutani dan Dirut PT. Inhutani I sampai dengan V terhadap agenda rapat,
3. Tanggapan anggota dewan,
4. Jawaban Dirut Perhutani dan Dirut PT. Inhutani I sampai V,
5. Kesimpulan rapat,
6. Penutup.

Sekalian nanti Bapak-bapak tolong perkenalkan diri dan bidang usahanya apa, karena teman-teman ini kan sebagian besar itu anggotanya baru Pak, jadi belum paham. Kadang Perhutani sama Inhutani saja mereka sulit bedakan.

Hadirin yang berbahagia.

Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat ini merupakan tindak lanjut atas salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019. Dalam kesimpulan RDP dimaksud, Komisi IV meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi penilaian kinerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan termasuk mitra BUMN di bidang kehutanan untuk selanjutnya memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan dalam melaksanakan pengelolaan kehutanan melalui perhutanan sosial dalam rangka pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil bukan kayu, serta pemanfaatan jasa lingkungannya. Selama tidak melanggar Undang-Undang dan Peraturan serta Peraturan dari Kementerian.

Ada pun Perum Perhutani I dan (suara tidak jelas) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan hutan produksi secara lestari dalam rangka menjamin keberadaan kawasan hutan produksi di beberapa wilayah di Indonesia sebagai penunjang daya dukung lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di dalam dan di

luar kawasan hutan. Saat ini 90% sampai 95% potensi hutan adalah berasal dari hutan bukan kayu dan jasa lingkungan Pemerintah tengah gencar mendukung pertumbuhan usaha pemanfaatan hasil hutan berbasis HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) termasuk karet, kopi, serta komoditas lainnya guna merealisasikan tujuan Pemerintah untuk menggalakkan ekspor non Migas.

Upaya pengembangan HHBK dan jasa lingkungan ini sejalan dengan paradigma baru Pemerintah dalam melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui perubahan konfigurasi bisnis dan timber manajemen menjadi *forest management* dan orientasi korporasi menjadi orientasi multi pelaku usaha.

Selanjutnya diharapkan usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan akan menjadi bisnis yang dapat diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berbasis masyarakat dengan pola kemitraan kehutanan dengan tetap mengedepankan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV meminta Dirut Perum Perhutani serta PT. Inhutani I sampai V untuk menyampaikan (suara tidak jelas) pengembangan hasil termasuk hasil karet, kopi dan komoditas lainnya juga prospek pengembangan usaha jasa lingkungan dan usaha masing-masing.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Selanjutnya persilakan Dirut Perhutani dan Dirut PT. Inhutani I sampai V untuk menyampaikan penjelasannya hal-hal tersebut di atas. Silakan dimulai dari Dirut Perum Perhutani.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (DENALDY MULINO MAUNA, S.E., M.H., M.B.A., M.S.):

Terima kasih Pak Ketua.

**Kepada yang terhormat Bapak Ketua,
Bapak-bapak Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,
Serta Bapak-Ibu anggota Komisi IV DPR RI.**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Izinkanlah terlebih dahulu kami memperkenalkan nama saya Denaldy Mauna, bergabung di Perhutani sejak akhir 2016 dan di sini juga kami juga membawa jajaran direksi Perum Perhutani yang mungkin sudah Bapak-Ibu berkenalan di kesempatan di awal tadi.

Sedikit memberikan gambaran karena Pak Ketua tadi menyampaikan masalah kinerja dari pada Perum Perhutani. Di akhir 2016 memang Perum Perhutani mengalami kerugian di sekitar 350 Milyar, namun *Alhamdulillah* dengan segala upaya serta bimbingan Bapak-Ibu sekalian di akhir tahun 2018 kami sudah mencatat laba secara grup beserta Inhutani 650 Milyar. *Inshaallah* dengan proses pengembangan dan program-program akan yang kami sampaikan setelah ini pertumbuhan laba dan juga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan akses legal tadi dapat terwujud. Lanjut *slide* pertama.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Ada beberapa topik yang kami ingin sampaikan. Pertama mungkin sekilas terkait dengan Perhutani Grup. Yang kedua terkait dengan Agroforestry Kopi. Dan selanjutnya minyak kayu putih dan yang perlu kami mendapatkan arahan dan dukungan dari Bapak-Ibu yang terhormat adalah pengembangan Biomassa. Ini adalah bisnis usaha baru Perum Perhutani. Dan juga terakhir sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua perkembangan perhutanan sosial khususnya di wilayah Perum Perhutani. Lanjut.

Secara grup, Perhutani Grup memiliki luasan 3,6 juta hektar. Khusus buat Perum Perhutani kami memiliki hak pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung seluas 2,4 juta hektar, dengan karyawan kurang lebih 19.849 dan juga melibatkan tenaga kerja lokal yang di luar karyawan sekitar 400.000. kalau misalkan Bapak-Ibu lihat di sebelah kiri bawah, bagaimana Perhutani dengan Inhutani berhubungan kami adalah perusahaan holding yang ditetapkan berdasarkan ketentuan di tahun 2014 dan Inhutani I sampai V adalah anak perusahaan Perum Perhutani dengan izin usaha pengusahaan hasil hutan kayu. Lanjut ke halaman 5. Lanjut Pak.

Proses bisnis kami di Perum Perhutani mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pembibitan, penanaman, produksi dan sekaligus ke industri kayu dan pemasaran dan juga produksi getah pinus dan terpenting dari pohon pinus. Lanjut ke halaman 7.

Portofolio bisnis Perum Perhutani sebagaimana yang dilihat di *slide* ini yang pertama adalah kayu. Kayu jati produksi kami sampai dengan bulan September 334.000 m³ dengan rimba 281.000. Portofolio kami yang terbesar kedua adalah gondorukem dan terpentin, ketiga adalah industri kayu dengan hasil *finish product* (suara tidak jelas) serta ekowisata dengan 167 destinasi wisata dengan pengunjung sampai dengan September sekitar 11.666 pengunjung. Sedangkan yang akan kami bahas nanti Bapak-Ibu yang saya hormati, termasuk NPM minyak kayu putih dan kopi merupakan produk lainnya dari Perum Perhutani yang rencananya akan kami kembangkan baik secara intensif maupun ekstensif. Selanjutnya izin kami melompat ke halaman 10. Kita masuk ke dalam kopi.

Bapak-Ibu Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dalam pengembangan kopi, Perhutani menerapkan pola kemitraan kehutanan yaitu merupakan suatu bentuk kerja sama bagi hasil dengan petani. Halaman berikutnya Pak. Sebaran potensi tanaman kopi di Perum Perhutani di bawah 3 divisi regional. Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Divisi Regional Jateng dan Divisi Regional Jatim. Dengan total luas indikatif sekitar 39.534 dengan pembagian robusta kurang lebih 44% dan Arabika 56%. Izin saya lompat ke halaman 15 mempersingkat waktu.

Apa yang kami lakukan untuk pengembangan kopi ini dalam 5 tahun ke depan. Pertama kami menyadari bahwa validasi *data base* kopi adalah prioritas untuk kita menentukan langkah berikutnya yang akan diinventarisasi oleh perencanaan hutan wilayah. Yang kedua adalah pemberdayaan teknis kepada petani kopi kerja sama dengan Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia) dan juga melakukan peremajaan tanaman kopi karena pada umumnya sudah waktu untuk dilakukan *replanting*. Kita akan melakukan *benchmarking* terutama ke PTPN VIII dan XII karena mereka telah memiliki teknologi yang lebih terkini dalam pengembangan kopi.

Halaman 16. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan MoU pemanfaatan kawasan hutan di Perum Perhutani antara PTPN XII, BNI serta Jasindo. Tanaman kopi rakyat yang umumnya merupakan tanaman kopi yang usia tanamannya sudah tua sehingga perlu dilakukan peremajaan. Dan serta yang menjadi latar belakang ini adalah implementasi teknologi kopi dari PTPN XII untuk meningkatkan produktivitas kopi dan kesejahteraan petani. Selanjutnya.

Ini adalah model bisnisnya antara para pihak yang disebutkan tadi dan di halaman 19 ini adalah target perbaikan produktivitas kopi Bapak-Ibu yang saya hormati. Pada saat ini di 2019 produktivitas kopi di wilayah kami skip di antara 500-700 kg per hektar dengan upaya-upaya yang telah disampaikan tadi inventarisasi, potensi, peningkatan kapasitas, hilirisasi, stimulus dan sinergi. Target kami adalah mencapai 1000 kg/hektar di akhir 2024.

Ini adalah suatu program kemitraan agroforestri yang perlu kita lakukan pengembangan sebaik-baiknya karena hasilnya akan dimanfaatkan, bermanfaat buat masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Halaman selanjutnya. Ini adalah lima tahun ke depan, adanya penambahan luasan, peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan lain sebagainya.

Lanjut, kami izin untuk menyampaikan ke minyak kayu putih. Di halaman 25, Bapak-Ibu yang saya hormati, dan 25 ini adalah dalam proses bisnis yang ada di halaman sebelumnya bagaimana tenaga kerja masyarakat sekitar hutan terlibat baik dari sisi *on farm* maupun dari sisi *out farm* baik di pabrik Perhutani sendiri dan juga pabrik LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang ada di sekitar kawasan daun kayu putih itu.

Halaman selanjutnya menggambarkan potensi pendapatan masyarakat hutan yang ada, yang menjalankan usaha minyak kayu putih ini. Dan di halaman 27 itu adalah LMDH-LMDH yang telah membangun pabrik minyak kayu putih dan mereka mendapatkan kondensi pendapatan (suara tidak jelas) Dan di halaman 28 apa yang kita akan lakukan untuk melakukan pengembangan selanjutnya.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Sebenarnya pengembangan dan paparan ini merupakan tindak lanjut dari RDP kami dengan Komisi IV tanggal 19 Juni 2019 dalam pengembangan budi daya serta peningkatan produksi minyak kayu putih. Pada saat itu pertimbangannya adalah bagaimana kita dapat mengurangi ketergantungan impor produk tersebut. Kebutuhan pasar domestik diketahui adalah 4500 ton/tahun, sedangkan produksi dalam negeri sekitar 2500 ton, sehingga kita masih perlu impor kurang lebih 2000 ton/tahun. Sedangkan kalau kita melihat kemampuan dari pada Perhutani hanya sampai dengan akhir tahun memproduksi 373 ton atau setara 15% saja dari total produksi dalam negeri.

Nah tindak lanjut dari RDP tersebut kita kerja sama dengan Balai Besar Penelitian Pemulihan Tanaman Hutan Jogja dengan menggunakan klon mereka dengan produktivitas 4 kg per pohon/tahun dan kami juga punya klon baru Bapak-Ibu sekalian, dan dinamakan klon 71 masih dalam proses pendaftaran dengan produktivitas 3,2 kg per pohon/tahun dan kami juga melakukan revitalisasi PMPK contohnya yang ada di PMPK Sukun yang ada di Ponorogo, juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan juga menurunkan atau efisiensi biaya.

Halaman selanjutnya ini adalah rencana kerja kami dalam pengembangan tanaman kayu putih baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Halaman berikutnya adalah produksi daun kayu putih selama 5 tahun ke depan berdasarkan program-

program yang kami sampaikan. Dan di halaman 32 Bapak-Ibu sekalian, menggambarkan bagaimana tahapan hasil dari pada upaya-upaya kita tersebut. Kalau tadi kami sampaikan bahwa produktivitas di tingkat 1,6 ton/hektar diharapkan nanti di akhir 2024 produktivitas mencapai 7 ton/hektar dengan total minyak kayu putih 3866 ton.

Pak Ketua, saya membawa contoh dari pada kayu putih ini, ada di situ Bu kalau misalkan mau lihat hasilnya seperti apa. Ada kopinya juga dari LMDH, nanti kita minta masukan kualitasnya seperti apa.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Dirut, jangan hanya ditunjukkan saja kepada anggota, tetapi pengembangannya bagaimana? Pemasarannya bagaimana. Dan satu hal lagi yang paling penting, ini mohon maaf, hampir semua orang di dunia itu melihat kemasannya dulu. Kalau kemasannya bagus, biasanya bagus. Isinya kan belum tentu juga. Silakan lanjutkan.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Baik Pak. Kami mengakui pemasaran kami masih jauh dari harapan, makanya kami juga bekerja sama dengan Kimia Farma dalam membantu kami mengemas yang baik seperti apa dan menjualnya seperti apa Pak. Izin saya lanjut Pak Ketua.

Ke Biomassa. Ini adalah suatu bisnis usaha kami yang baru Bapak-Ibu sekalian, mohon izin saya menyampaikan latar belakang kami masuk ke Biomassa. Rencana kami dalam mengembangkan tanaman Biomassa tidak hanya untuk bisa menjawab tantangan aspek ekonomi dan sosial dalam mengelola hutan secara lestari, namun juga sudah saatnya kami melihat bagaimana kami berperan dalam aspek ekologi yang secara global menjadikan perhatian.

Nanti yang saya akan jelaskan dalam paparan-paparan berikutnya, di berbagai belahan dunia Bapak-Ibu sekalian, pengembangan Biomassa sudah sangat maju dan menjadi *mandatory* sebagai energi baru terbarukan. Namun, di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan besar dalam pengembangannya, baik dari sisi bagaimana membangun hulu dan hilir, namun juga diperlukan sebuah regulasi untuk insentif pengembangannya. Bentuknya apa? Di *slide* berikutnya.

Di sini sebenarnya Pemerintah sudah memiliki suatu dasar pengembangan yaitu PP No. 79 tahun 2014 terkait dengan Ketahanan dan Kemandirian Energi, di mana salah satu prinsipnya memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan dengan memperhatikan kasus keekonomian. Kalau kita lihat nanti ditargetkan pada 2025 harus mencapai 23%. Kalau kita fokus bahas mengenai Biomassa harus memiliki 8,4 juta ton yang dipakai untuk energi baru terbarukan. Namun bagaimana posisi saat ini? Lanjut.

Ini adalah latar belakang kami yang memperkuat kenapa Perhutani perlu masuk ke dalam Biomassa dan apa yang menjadi kendala kami yang membutuhkan dukungan dari Bapak-Ibu yang saya hormati. Yang pertama, kita ketahui berdasarkan data *International Energy Agency* tahun 2018 tingkat dari pada emisi CO2 mencapai 33,13 ton atau meningkat 1,7%. Diindikasikan bahwa tingginya CO2 menjadi salah satu penyebab utama *climate change* atau perubahan cuaca. Yang kedua, dari aspek bisnis dan karena di negara-negara Eropa maupun Jepang dan Korea sudah menggunakan terlebih dahulu 10-15 tahun yang lalu, produksi *wood pellet* sudah mencapai 36,1 di tahun 2016 dan mengalami pertumbuhan secara rata-rata 21%.

Artinya memang ini adalah suatu prospek bisnis kalau kita lihat dari aspek bisnisnya. Sedangkan dari target yang telah tadi ditetapkan Pemerintah 23%, target juta *wood pellet* yang harus dapat dimanfaatkan adalah 8,4 juta ton per tahun.

Nah Bapak-Ibu sekalian,

Atas tiga aspek itu, kami mengembangkan Biomassa dengan berbagai pertimbangan. Satu, kami telah melakukan *pilot project* di tahun 2013 dan berhasil menanam 2000 hektar tanaman gliricidia sepium. Selain dari pada itu,

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, saya mau tanya.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Iya boleh Pak.

KETUA RAPAT:

Untuk Biomassa ini dikembangkan untuk energi listrik dalam negeri atau chip nya yang diekspor?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Nah sebenarnya pasarnya ada dua Pak, namun karena di Indonesia belum secara keekonomian bisa mendukung pengembangannya ini target pertama kami adalah di ekspor. Namun karena tadi ada kebutuhan-kebutuhan, kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini supaya bisa dimanfaatkan di sini.

KETUA RAPAT:

Saya rasa kalau di dalam negeri sangat sulit lah. Mohon maaf karena nanti kendalanya HB jual listriknya, energinya bagaimana? Sedangkan yang selama ini saja yang pakai air, pakai segala macam itu kan masih enggak sesuai. Jadi harusnya Pemerintah kalau memang serius untuk Biomassa ini harusnya Pemerintah *mensupport*, minimal harga produksi sama harga jual pas dulu. Pengertian pas seluruh biaya, bunga, dan lain-lain baru dikembangkan. Begitu kan?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Iya, kami lanjutkan Pak.

Jadi tadi kelebihan Biomassa, saya lanjutkan Pak. Nanti pola yang kami lakukan dan saat ini memang orientasi ekspor karena kebutuhan yang terus menerus meningkat terutama di luar negeri. Kami akan menggunakan pola tanam 70-30 tanaman Biomassa dan tanaman pertanian 30% dengan pola Agroforestri yang disampaikan dengan total penanaman dalam 5 tahun 122.000 hektar. Apa *outcome* kami atau target yang harus dicapai? Dengan produksi *wood pellet* di akhir 2026 itu akan mencapai 2 juta. Namun bila kami akan memasok untuk kebutuhan dalam negeri

dengan tadi target 8,4 juta, artinya itu pun juga hanya memenuhi kebutuhan nasional 24%, asumsi kami *disupport* oleh Pemerintah.

Planet, target planet selain percepatan pertumbuhan, kita juga bisa memperlihatkan kepada dana bahwa kita mendorong *renewable energy* dunia dan juga penyerapan CO2 dan terakhir adalah (suara tidak jelas) adalah pola kerja sama, pola perhutanan sosial ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan hitungan di atas kertas. Kami bisa-bisa mencatat 2,7 juta per KK per bulan. Beda dengan hitung-hitungan kami sebelumnya yang menggunakan jagung dengan tengor, karena *wood pellet* ini tanaman khusus Biomassa yang setiap dua tahun kita dapat jual, kita dapat tebang dan jual.

Saya mungkin langsung ke halaman 37, Bapak-Ibu sekalian yang tadi disampaikan apa yang menjadi kendala secara nasional bila kita akan menerapkan di Indonesia atau kita bisa berkiprah di ini. benar sekali Pak Ketua, jadi memang sumber daya energi baru terbarukan memang harus dapat berkompetisi secara keekonomian dengan non EBT.

Kami melakukan kalkulasi kemarin secara kasar (suara tidak jelas) dan benar sekali bahwa antara kalau kami coba bandingkan dengan batu bara, contohnya harga pokok produksi *wood pellet* berdasarkan *visibility* tadi kami terakhir adalah 87 dolar per ton. Sedangkan harga pokok produksi batu bara 48. Artinya selisihnya memang cukup jauh untuk dilihat dari tingkat keekonomiannya. Oleh karena itu bila memang Pemerintah meneruskan untuk menerapkan Biomassa ini, kami melihat ada beberapa insentif fiskal maupun non fiskal yang kami pelajari dari literatur yang diterapkan di negara-negara lain, termasuk misalkan keringanan PBB, Pajak Penghasilan Badan Usaha, PPN dan lain sebagainya.

Insentif non fiskal diperlukan contohnya dorongan penggunaan *wood pellet*, (suara tidak jelas) sebagai (suara tidak jelas) pada industri pembangkit listrik kontrak jangka panjang dengan tingkat harga yang menguntungkan. Bapak-Ibu sekalian, skema ini diterapkan yang namanya (suara tidak jelas) di Jepang. Di mana Pemerintah menetapkan suatu tarif dan suatu pola kerja sama 10 tahun di sana. Yang kedua juga kemudahan perizinan untuk membangun pembangkit listrik.

Selain itu, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Di negara-negara lain, Pemerintah melakukan pemberian subsidi terhadap industri pabrik. Contohnya di Belanda, catatan saya mereka mendapatkan (suara tidak jelas) dengan 176 triliun untuk dapat mengembangkan energi baru terbarukan ini. Di Jepang dengan tadi (suara tidak jelas) , dan di Korea dengan *mandatory* (suara tidak jelas) di mana di sana diminta untuk pembangkit listrik mencampurkan (suara tidak jelas) dengan Biomassa secara persentase dan naik tiap tahunnya dan terakhir mencapai sekitar 8%.

Nah itu tantangan yang kami sampaikan khususnya Biomassa. Mungkin yang terakhir Pak Ketua kalau boleh saya sampaikan terkait perhutanan sosial, cuma 1 *slide* saja. Di halaman 47.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirut sebentar. Boleh kita kembali ke masalah Biomassa?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Baik Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya karena saya secara pribadi saya sangat tertarik mengenai industri ini dan saya apresiasi langkah Dirut Perhutani dan teman-teman untuk pengembangan usaha Biomassa ke depan. Kalau saya tidak salah mungkin ada dua tanaman yang Bapak konsentrasi tadi saya lihat gamal sama Kaliandra merah ya Pak ya? Karena memang masa tanam Kaliandra merah memang untuk sampai pemanenan itu saya rasa sangat cepat.

Pak, saya ingin tahu. Ini dari seluruh area Perhutani yang tersedia, berapa persen yang akan Bapak alokasikan untuk pengembangan Biomassa ini? Dan saya dari tadi belum melihat perencanaan keuangan Bapak ini kalau kita mulai bicara kendala ini kan salah satunya biaya pendanaan. Ini untuk penanaman tanaman-tanaman Biomassa ini enggak murah Pak.

Jadi nanti ini untuk Bapak ini kan rencana-rencana untuk Bapak merealisasikan rencana ini. Ini sumber pendanaan Bapak nanti ketahanan pendanaan Bapak ini seperti apa untuk, tadi saya kalau tidak salah di tahun 2019 Bapak rencana menanam 19.000 hektar dan saya ingin tahu, ini Bapak ini modalnya cukup enggak untuk nanam 19.000 hektar? Soalnya kalau modalnya enggak cukup, kita bisa kalkulasi. Ini lupa in saja ini rencana-rencana penanaman.

Jadi saya kalau saya ingin mendorong. Saya pribadi ingin mendorong Biomassa ini menjadi ujung tombak penghasil bangsa Indonesia ini ke depannya. Karena kita ini bisa menjadi solusi alternatif energi dengan Bapak-bapak Ibu-Ibu yang mungkin belum terlalu mengerti. Biomassa atau yang dinamakan tadi beberapa kali disebutkan *wood pellet* ini, ini ya benar-benar ini *green alternative energy*. Suatu hari bisa menjadi substitusinya batu bara. Bahkan di negara-negara maju seperti Korea, di Jepang pun mereka sudah banyak-banyak dulu PLTU batu bara saja sudah di *convert* menjadi menggunakan *wood pellet*. Tapi saya enggak tahu, ini pengembangan *wood pellet* Bapak ini baru *stage wood pellet* saja Pak ya?

Di beberapa negara sudah maju lebih lagi ada yang disebutkan ada satu proses lagi. *Perfection*, menjadi *charcoal* atau *black pellet*. Jadi ini kalau *wood pellet* ini pengembangan ini yang sekarang sudah banyak diterima di negara-negara seperti Korea, Jepang tentunya dengan standar sertifikasi yang sangat ketat, tapi sudah mulai di negara-negara berkembang juga dan sekarang ada perusahaan swasta di Indonesia yang sudah menjajaki kerja sama untuk mengembangkan *black pellet*. *Black pellet* ini sebenarnya *wood pellet* tapi lebih diproses lagi, *diroasting*, di apa ya istilahnya.

Iya intinya kalau *Prefix value* nya dia meningkat, dia juga daya serap airnya menurun jadi *moisture*nya dia bisa rendah sekali. Jadi untuk transportasi dan logistik itu bisa menjadi lebih murah. Ini kan salah satu untuk nanti urusan pemasaran *wood pellet* ini. Ini kan enggak gampang juga karena ekspor *wood pellet* kita harus bicara logistik, kita harus bicara bagaimana mentranspor *wood pellet* ini supaya tidak kena air, karena kalau kena air itu nanti *moisture* ataupun (suara tidak jelas) bisa turun.

Jadi saya ingin mendengar dari Pak Dirut ini perencanaan matangnya ini seperti apa? Pendanaannya seperti apa? Dari lahan Perhutani dan turunannya

Inhutani dan sebagainya itu berapa yang ingin disiapkan? Saya ingin mendengar Pak Dirut silakan.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Terima kasih Pak Wakil Ketua.

Jadi saya sangat senang sekali *statement* dari Bapak bahwa ada harapan, ada dukungan untuk kita bisa melakukan pengembangan Biomassa. Dari sisi rencana pengembangan kami ditulis bahwa kami akan dalam *design cluster* ini mengembangkan 122.000 hektar dan di mana setiap tahunnya sekitar 20.000 hektar. Dan dalam konteks agroforestry, kami akan menggunakan tetap pola 70-30 supaya masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan itu.

Terkait dengan pembiayaan, berdasarkan beberapa *feasibility* tadi yang kami telah susun Pak, saat ini kami sudah mendapatkan *support* dari Bank BRI untuk mendukung program pengembangan Biomassa kami. Jadi dari sisi pembiayaan buat jangka panjang telah *support* oleh perbankan. Buat penanaman awal, tahun ini kami mengeluarkan anggaran hampir 200 milyar dan itu masih bisa kami *support* dengan pendanaan kami sesuai dengan hasil kinerja kami di tahun-tahun sebelumnya.

Nah dari sisi teknis, mungkin suatu saat kami bisa *share* apa yang menjadikan,

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sekali saja Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bapak biaya tanam per hektarnya berapa Pak?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Nah itu mau saya sampaikan. Biaya tanam per hektar adalah 19,4 juta dan HPP nya sampai saat ini dan masih belum menggunakan mekanis Pak, karena memang banyak yang mengatakan terlalu mahal HPP 87 dolar. Nah berdasarkan (suara tidak jelas) yang terakhir, semi mekanis itu 87. Kami lagi pelajari supaya bisa dilakukan efisiensi biaya supaya kita bisa masuk ke pasar internasional lebih kompetitif. Terima kasih.

Kami ke halaman 47, halaman terakhir Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami bagi dalam dua bagian. Yang sudah terbit SK, karena saya tidak perlu menjelaskan dua konsep SK Perhutanan Sosial yaitu IPHPS dan (suara tidak jelas) mungkin sudah Bu Menteri menyampaikan berkali-kali. Tetapi catatan kami di wilayah Perum Perhutani yang sudah terbit SK itu adalah 313 dengan total luasan 121.133. Di mana dalam proses verifikasi saat ini secara total terdapat 1330 dengan total luasan 69214. Kami

juga melihat bahwa ini banyak sekali yang masih dalam proses verifikasi dan terus dilakukan upaya bersama-sama dengan Kementerian LHK.

Nah di bagian bawah, apa yang menjadikan titik-titik krusial, permasalahan Implementasi Perhutanan Sosial dalam evaluasi kami di 3 tahun berjalan. Pertama adalah terkait dengan pemanfaatan aset Perhutani di dalam kawasan Perhutanan Sosial. Perlu kami sampaikan bahwa ini juga menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu dan juga sempat dibahas di dalam BAKN DPR di awal tahun, terkait dengan adanya tegakan atau aset milik Perhutani di dalam kawasan SK yang telah dikeluarkan SK nya tersebut.

Yang kedua adalah mekanisme pembayaran PNBP, PBB dan *sharing*. Mungkin Bapak-Ibu ketahui, saya waktu, saya ingat sekali tanggal 10 bulan 10 saya dipanggil ke istana karena waktu itu ada kejadian demo oleh kelompok petani hutan, di mana di sana meminta agar salah satunya bukan hanya mekanisme pembayarannya, tetapi bagaimana PNBP, PBB dan *sharing* ini ditiadakan. Nah itu adalah permintaan mereka dan mekanisme pembayaran yang saat ini kami masih dalam proses diskusi dengan Kementerian LHK.

Yang ketiga adalah perlunya suatu petunjuk teknis terkait dengan penyusunan rencana pemanfaatan hutan dan kerja sama usaha yang telah ada, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi itu karena sudah ada kerja sama usaha sebelumnya, baik dalam konteks ketahanan pangan, kerja sama kami dengan PTP, maupun dengan (suara tidak jelas). Dan juga keterlambatan proses pra dan pasca penerbitan SK.

Nah saat ini Bapak Ibu sekalian, kami bersama KLHK dengan melihat beberapa indikasi permasalahan tersebut sedang menyiapkan SK Permen KLHK tentang Percepatan dan Peningkatan Kualitas Perhutanan Sosial yang diharapkan target dari pada Pemerintah 12,7 secara total dapat terwujud lebih cepat lagi.

Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, serta Bapak-Ibu sekalian paparan dari saya. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, saya nanti juga minta dijelaskan posisi untung atau ruginya perusahaan BUMN Perhutani dan Inhutani juga. Tolong dijelaskan posisinya untung atau rugi. Nah kalau ruginya di mana? Apakah kebocoran itu dari dalam, atau kebocorannya dari luar, atau biayanya terlalu tinggi, atau memang usahanya enggak ada hasil? Supaya jelas. Terima kasih.

Dilanjutkan dengan silakan. Iya silakan jawab dulu,

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI:

Jawab dulu atau? Baik Pak. Jadi, saya sampaikan bahwa Perhutani di akhir 2016 mengalami kerugian sekitar 350 milyar. Setelah melakukan di, terutama fokus kepada efisiensi biaya, *cost* (suara tidak jelas) *program* di tahun 2017 untung menjadi 300 milyar di tahun 2017. Di tahun 2018 kami melakukan berbagai perbaikan proses, *bussiness process reengineering*, kembali laba menjadi 600an milyar. Tahun ini kami akan mencatat laba, mungkin tidak setinggi tahun lalu karena harga komoditi lagi turun Pak rata-rata, tapi masih bisa di atas 500 milyar. Demikian Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Dilanjutkan.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I (AGUS SETYA PRASTAWA):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami muliakan Bapak Ketua Komisi IV beserta Wakil Ketua,
Dan Bapak-Ibu anggota Komisi IV yang kami muliakan.
Beserta semua hadirin yang kami hormati.**

Kami dari Inhutani I akan menyampaikan paparan terkait dengan PT. Inhutani I. Perlu kami sampaikan bahwa mulai tahun 2014 melalui PP No. 73 PT. Inhutani I menjadi bagian dari Perum Perhutani yang mana dahulunya PT. Inhutani I adalah BUMN tersendiri, namun sejak itu menjadi anak perusahaan yang menginduk pada Perum Perhutani.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa PT. Inhutani I ini memiliki areal kerja seluas sekitar 670.000 hektar yang mana ini didominasi oleh hutan alam, di mana hutan alam ini sistem silvikulturnya adalah melalui tebang pilih-tanam Indonesia. Jadi tidak seperti di Perhutani dengan ada sistem silvikultur tebang habis dan permukaan buatan, tetapi kita dengan tebang pilih. Dan ini ada di Kalimantan Timur, ada 3 unit manajemen hutan. Dan ada di Kalimantan Utara, ada 4 unit manajemen hutan alam.

Sedangkan unit manajemen hutan tanaman ada di Kalimantan Timur, ada 2 unit. Dan ada 1 unit manajemen hutan tanaman di Gowa atau di Sulawesi Selatan, yang mana ini hasil utama dari PT. Inhutani I adalah kayu bulat yang merupakan hasil dari hutan alam. Di samping itu, PT. Inhutani I juga memiliki 2 unit manajemen industri pengolahan kayu yaitu di Gresik, Jawa Timur maupun di Juwata di Tarakan, Kalimantan Timur. Dan kami sekarang sedang mengajukan izin untuk unit manajemen hasil hutan bukan kayu di Toraja untuk tanaman sadapan getah pinus nantinya Pak.

Jadi dari hutan yang kita kelola ini di samping kayu bulat, kami juga ada produksi dari hutan tanaman, ini ada getah karet, ada juga getah pinus dan memang getah karet ini juga masih sedikit Pak, karena kita baru mencoba mengembangkan mulai tahun 2010. Dan kebetulan pada saat panen sekarang harganya jatuh Pak. Jadi harganya masih berkisar 6000-7000 rupiah/kilo dan ini masih berat kalau kita mengusahakan,

KETUA RAPAT:

Kalau 6000-7000 *ketutup* ongkos enggak?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I:

Enggak Pak, habis di ongkos.

KETUA RAPAT:

Ketutup ongkosnya dinilai berapa? Angka berapa? 8000?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I

Sekitar 11.000an Pak, 11.000-12.000. Lanjut. Ini visi dan misi dari PT. Inhutani I saya kira ini enggak usah saja, langsung lanjut.

Ini kegiatan dari PT. Inhutani I Pak, ini untuk pengelolaan sumber daya hutan ini cor aktivitasnya adalah mulai dari perencanaan, ada persemaian ini untuk hutan tanaman, ini *Plantation* tanaman dan plasma (suara tidak jelas) ini juga menjaga kelestarian sumber daya hutan, ini di hutan alam terutama. Ada kegiatannya produksi kayu maupun juga non kayu. Jadi untuk industri dan pemasaran ini bisnis primernya adalah kayu bulat hutan alam, kayu bulat hutan tanaman, getah pinus, getah karet. Bisnis turunannya adalah kayu gergajian, kayu olahan gondorukem dan terpentin. Gondorukem terpentin ini masih sedikit Pak ini, dan kami *mengolah* getah ini di Perhutani Pak. Bisnis lainnya adalah jasa wisata hutan, kami punya Bukit Bangkirai dan optimalisasi aset kita punya aset-aset, gedung-gedung dan sebagainya yang bisa kita kerja samakan dengan sesama BUMN maupun swasta.

Ini untuk rencana pengembangan ke depannya Pak, ini kita ada merencanakan penanaman kayu putih di Gowa. Pengembangan mikro alga ini kerja sama dengan mitra. Pembangunan hutan tanaman kayu energi atau Biomassa. Optimalisasi aset, penyewaan eks kantor, gudang dan sebagainya. Dan juga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, getah pinus di daerah Toraja. Lanjut.

Ini mengenai gambaran pendapatan dan juga laba usaha dari PT. Inhutani I Pak. Jadi ini PT. Inhutani I tercatat di sini di data kami mulai dari 2013-2018 mencatat laba antara 21 milyar sampai 32 milyar, jadi angkanya masih di sekitar itu Pak. Ini sesuai dengan pendapatan kami juga masih berkisar 174 milyar sampai dengan 226 milyar rupiah Pak.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, saya mau tanya. Aset Anda berapa? Kalau hanya untung 21 M 2018, asetnya kira-kira berapa? Kira-kira saja.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I:

Sekitar 400 M Pak. Jadi karena hutan itu bukan merupakan aset kami.

KETUA RAPAT:

Saya tahu. Maka tadi saya tanya asetnya saja dulu berapa?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I:

Iya, 400an milyar Pak.

KETUA RAPAT:

400 milyar.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I:

Iya. Kami lanjutkan Pak.

Jadi ini ke depan Pak, kami ingin bagaimana PT. Inhutani I ini menjadi besar. Artinya kalau selama ini kita bertumpu pada hutan alam, ini produksi ini kan kurang lebih sama Pak setiap tahun, dan harga kayu 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini juga fluktuasinya ya segitu-segitu saja. Malah cenderung turun Pak akhir-akhir ini cenderung turun. Sedangkan biaya-biaya makin hari kita juga makin berat karena biaya-biaya tidak bisa dihindari.

Dan ke depan makanya kami berpikir bagaimana untuk bisa meningkatkan pendapatan dari PT. Inhutani I ini yaitu dengan berbagai upaya supaya kami juga bisa menjadi lebih besar lagi yaitu dengan melalui penanaman karet. Walaupun penanaman karet ini sudah dimulai tahun 2012 tetapi sampai sekarang yang kita produksi masih sedikit sekali karena kita juga menghadapi harga yang tadi Pak, belum membaik.

Sehingga ini adalah dilema kami, kita sudah terlanjur berinvestasi cukup banyak dan pada waktu itu prospeknya bagus, artinya pada waktu itu dimana-mana bicara bagaimana investasi karet. Tetapi ternyata pada saatnya harga juga bisa jatuh seperti sekarang ini. Kami sudah memiliki tanaman karet sekitar 3200 hektar Pak dengan investasi yang sudah dikeluarkan mulai tahun 2012 ini 139 milyar Pak. Ini mudah-mudahan kami berharap untuk ke depan serapan karet ini bisa meningkat lagi dan harga juga bisa lebih baik lagi. Selanjutnya. Lanjut Pak, terus.

Kami juga merencanakan pengembangan tanaman kayu putih Pak. Ini kami sudah melakukan survei untuk pengembangan kayu putih di Gowa. Kami bekerja sama dengan Litbang Perum Perhutani. Kami merencanakan sekitar 2000 hektar untuk dilakukan penanaman kayu putih di Gowa, karena di Gowa ini memang topografinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan yang cocok kemarin disurvei sekitar 1000-2000 hektar, karena yang lainnya topografinya berat dan agak tinggi sehingga kurang cocok untuk tanaman kayu putih. Dan ini tentu saja kami juga nanti memerlukan investasi sekitar 40 milyar dan kami berharap karena ini bisnis yang menguntungkan nanti bisa dibantu oleh induk Perum Perhutani untuk bisa memberikan, meminjamkan dananya karena ini bisnis yang menguntungkan karena selama ini di Perhutani kayu putih menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah rugi Pak.

Selanjutnya kami juga memiliki rencana untuk pengembangan tanaman Biomassa dan ini permasalahannya juga kami memerlukan mitra dan tentu saja mitra juga melihat prospek dan tentu saja prospek yang dihadapi oleh mitra sama dengan tadi yang disampaikan oleh Perhutani yaitu harga dari Biomassa ini mungkin masih belum memadai. Artinya, sebetulnya kalau katakanlah dari Pemerintah melalui PLN nanti membeli *power* dari pembangkit listrik tenaga Biomassa, saya kira itu bisa memberikan insentif bagi pengembangan Biomassa kita untuk ke depannya Pak.

Dan ini sebetulnya kemarin dari salah satu calon mitra itu datang ke kami Pak dari, mereka menjual ke PLN *power* nya itu untuk salah satunya di Pulau Selayar yang di sana sekarang menggunakan pembangkit listrik mungkin diesel Pak. itu kalau bisa digantikan dengan bahan baku Biomassa ini. Namun demikian salah satu yang diminta kemarin adalah bambu, Biomassa bambu. Nah ini kami sedang berpikir bagaimana untuk budidaya bambu ini karena contohnya di Mentawai ini masih perorangan Pak. Artinya perorangan setor bambu ke pembangkit listrik tenaga Biomassa bambu. Namun demikian kalau ini diusahakan oleh industri hutan bagaimana, karena itu memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak Pak karena itu meminta satu hari itu 330 ton chip bambu.

Nah ini suatu hal yang sangat besar sekali. Namun demikian, saya satu sisi menganggap ini adalah peluang, tapi satu sisi bagaimana ini untuk mencari teknologinya. Kami juga sudah mencari referensi ke mana-mana Pak, ini juga belum ketemu karena belum pernah ada yang Biomassa bambu yang diusahakan. Kami sudah mencari referensi belum ketemu sampai sekarang.

Terus selanjutnya Pak, ini untuk Inhutani I ini isu mengenai rencana Ibu Kota Negara Baru Pak. Ini ada nanti yang masuk di wilayah Inhutani I Pak. Jadi di sini nanti ada sekitar wilayah yang *overlap* 6300an hektar, tetapi ini titik-titik persisnya belum ada Pak, belum ketemu Pak di lapangan. Artinya baru semacam *overlay* di peta, tapi belum dilakukan deliniasi di lapangan. Sehingga ini barang kali perlu saya sampaikan juga ini terkait dengan mungkin adanya spekulasi tanah di sana Pak yang barang kali kalau terjadi jual beli tanah itu masuk kawasan hutan dan sebagainya ini harapan kami ini ada perhatian, koordinasi di lapangan sehingga dari pihak-pihak yang terkait dengan jual-beli tanah ini tidak nanti tanah kawasan hutan dan sebagainya terlanjur dilakukan jual beli dan sebagainya. Dan ini kami di lapangan selalu koordinasi Pak. Terus lanjut, terus.

Ini Pak, kemarin pada waktu rapat di sini diminta untuk menyampaikan isu-isu yang terkait dengan kehutanan. Kami sudah menyiapkan beberapa hal Pak menyampaikan ini. Yang pertama yang berkaitan dengan perambahan hutan Pak, ini juga yang terkait dengan masalah adanya rencana Ibu Kota Baru ini Pak. Ini jadi walaupun saya belum ada datanya yang secara rinci tapi sudah mendengar laporan-laporan adanya *claim-claim* dari perorangan atau adat masyarakat Pak yang mengatakan ini adalah wilayah-wilayah mereka yang ini perlu kita antisipasi supaya nanti tidak berkembang menjadi suatu hal yang katakanlah membesar, dan ini menjadi hal yang sulit diselesaikan di kemudian hari. Dan kami di lapangan sudah berkoordinasi Pak dengan Pemda, Notaris, BPN untuk setiap ada transaksi jual beli tanah ini pada area kawasan hutan supaya itu ada semacam forum, begitu Pak. Ini bahwa disaksikan bersama-sama, betul ini bukan kawasan hutan dan sebagainya.

Terus selanjutnya mengenai PBB sektor kehutanan Pak. Jadi PBB di sektor kehutanan ini selalu mengalami kenaikan Pak ini. Selalu mengalami kenaikan padahal ini sebetulnya walaupun dekat kota pun harga tanah di situ enggak akan pernah dijual Pak. Artinya ini beban dari biaya perusahaan yang selalu semakin meningkat. Dan ini juga berlaku saya kira di Perhutani juga Pak ini, di Perhutani sudah lebih dari 200 milyar Pak untuk membayar PBB ini setiap tahun. Dan ini Pak, diharapkan nanti ada semacam keringanan untuk bisa PBB ini tidak setiap tahun meningkat. Karena kan sebetulnya kalau dikenakan PBB di situ kelas tanahnya itu selalu harusnya paling bawah terus Pak, karena tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya selain hutan yang juga selain berfungsi ekonomi adalah fungsi lingkungan.

Mengenai tata batas areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ini Pak, ini juga banyak yang belum selesai tata batasnya. Padahal ini merupakan suatu keharusan di dalam pengelolaan sumber daya hutan, karena ini merupakan suatu hal yang menjadi kepastian hukum dan kepastian usaha di dalam perusahaan hutan ini. Nah ini kami melakukan ada usulan untuk sinkronisasi antar pemegang IUPHK dan juga dengan instansi terkait yang termasuk yang memiliki areal-areal di batas-batas hutan yang berdampingan dengan pemilik izin. Karena ini makin hari ini saya kira seperti di Kalimantan Timur ini semakin bernilai itu nanti kalau terjadi konflik batas ini akan semakin, dampaknya semakin besar Pak.

Terus untuk kelonggaran ekspor produksi industri kehutanan Pak. Ini hal yang berkaitan dengan ketentuan ekspor produksi industri kehutanan. Salah satunya untuk pembatasan luas penampang dalam ekspor kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E

yang berasal dari kayu merbau tidak lebih dari 10.000 mm² dan yang berasal dari kayu selain merbau tidak lebih dari 4000 mm². Ini usulan kami bahwa perlu dilakukan peningkatan batasan luas penompang produk ekspor dengan tujuan untuk efisiensi pemanfaatan produk kayu, efisiensi biaya, memenuhi permintaan pasar dan bisa bersaing dengan eksportir negara lain seperti Malaysia dan Vietnam.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, itu pembatasannya dari Kementerian Perhutanan PP atau Undang-Undang? Atau Permen?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I:

Itu dari Perindag Pak.

KETUA RAPAT:

Oh Perindag. Iya sudah nanti kita undang Perindag nya lah, karena kami tahu kalau ekspornya tanggung, biayanya tetap tinggi. Karena seperti contohnya angkut sapi dari Australia sama angkut sapi dari NTT, 1 : 3 lebih mahal dari NTT dibandingkan dari Australia. Karena makin bobotnya makin kecil, otomatis biaya makin tinggi. Oke lanjut.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I:

Terus berikutnya mengenai Raperda Peredaran Hasil Hutan Pak. Jadi ini ada salah satu provinsi yang rencana mengatur peredaran hasil hutan hanya dalam satu wilayah dan ini akan memberatkan para pelaku usaha di bidang kehutanan Pak. Karena terutama pelanggan-pelanggan kita Pak, yang pelanggan-pelanggan kita ini juga mempunyai pabrik di Jawa Pak. Ini kalau nanti misalnya log itu tidak boleh keluar dari suatu provinsi, nanti mereka juga akan keberatan. Dan kalau memang di provinsi bisa menyerap secara keseluruhan mungkin bagus Pak. Tapi kalau tidak bisa menyerap keseluruhan akan mengganggu dari pemasaran kita Pak, itu Pak.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, saya potong lagi. Biasanya di provinsi kan selalu mengedepankan bahwa semuanya ada. Kan kita tahu hampir semua provinsi kekurangan listrik. Bagaimana mereka mau minta dibuka in? Iya kan dengan kata lain pengusaha di Jawa buka industrinya di provinsi tersebut. Tapi bagaimana dengan transportasinya? Bagaimana dengan listriknya? Ada enggak? Kan hampir semua di wilayah, mohon maaf, jangankan di Kalimantan, di Sumatera saja hampir semua kekurangan daya listrik kok. Kecuali kalau semua fasilitasnya cukup, Perda itu boleh diberlakukan. Tapi kalau enggak cukup kan? Semua tahu kalau pakai diesel kan jauh lebih mahal dibandingkan dengan pakai PLN, begitu loh.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI I:

Iya Pak. Jadi demikian dari Inhutani I, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Barangkali nanti ada yang perlu disampaikan kepada kami atau ditanyakan nanti kami akan bisa berikutnya. Demikian terima kasih dari Inhutani I.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut Inhutani II.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI II (PRAMUSTI INDRASCARYO):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami hormati Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,
Ibu-Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.**

Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pramusti Indrascaryo, bergabung dengan Inhutani II Februari 2019 tahun ini. Sebelumnya saya di Biofarma, Direktur Keuangan.

Baik, izin kami lanjut mulai dari *slide* pertama. Tadi sama dengan Inhutani I bahwa Inhutani II juga bergabung ke Perhutani tahun 2014. Tadinya Persero kemudian bergabung dengan Perhutani Group. Kemudian di *slide* ke dua, Inhutani II juga bergerak dalam industri perusahaan kehutanan. Lanjut di *slide*. Nah ini areal kerja Inhutani II. Yang paling atas kami ada unit manajemen hutan alam. Itu ada 3 unit di Kalimantan Utara, Sei Tubu, Semamu, Malinau, ini di Kabupaten Malinau, tiga-tiganya itu hutan alam.

Kemudian Inhutani II juga areal kerjanya ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Ada di Tanah Grogot, kemudian ada di Senakin, dan di Pulau Laut. Sedikit ada di sebelah kiri itu ada proyek di Kalimantan Barat, proyek jasa hutan. Kemudian ada empat perusahaan kerja sama, patungan, ada di empat perusahaan, (suara tidak jelas) ada di Kalimantan Timur. *Slide* berikutnya izin.

Ini *detail* dari luasan areal kerja Inhutani II. Total areal Inhutani II ada 311.000 hektar. Itu pembagiannya ada hutan alam itu 216.000 hektar, kemudian ada hutan tanaman 94.000 hektar. Untuk hutan tanaman ada di Pulau Laut itu sekitar 48 yang efektif, hutan produksi itu 41.500 hektar. Sisanya 7.200 itu APL. Kemudian di Senakin itu ada 30.000 hektar hutan produksi. Kemudian di Tanah Grogot itu ada 15.000 arealnya, yang hutan produksinya sekitar 13.000 hektar. Untuk masa berlaku izin IUPHK nya masih cukup panjang di Inhutani II. Ada yang sampai 2040, ada yang bahkan sampai 2069. Jadi masih cukup panjang. *Slide* berikutnya izin kami lanjutkan Ibu-Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Ini portofolio bisnis Inhutani II pada pokoknya terbagi 4 dari utama. Yang pertama produksi kayu bulat, itu kayu log. Kemudian jasa hutan, ini jasa jadi rehabilitasi daerah haluan sungai maupun rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian yang ketiga, kami juga ada hutan tanaman itu produksi getah karet. Kemudian yang keempat ada usaha lainnya. Kami melakukan *trading* bongkar, ini bahan olahan karet

yang diambil dari masyarakat. Kemudian ada agroforestri, ada jasa somil dan air minum dalam kemasan.

Berikutnya izin kami sampaikan langsung ke *slide* 8 Bapak Ketua, Wakil Ketua. Inhutani II masih membekukan laba, kemudian tahun 2019 kita 4 milyar, 5 tahun ke depan 6,5 milyar. Nilai penjualannya tahun 2019 prognos, kita 73 milyar. Di akhir tahun 2024 nanti per prospek proyeksinya 168 milyar. Aset Inhutani II sekitar 250 milyar. Itu sebagian besar sebetulnya terbagi dari jasa hutan. Jasa hutan itu kan masih pekerjaan itu. Kemudian sebagian adalah hutan tanaman karet, kerja sama dengan Korea. Kemudian sedikit di perusahaan patungan itu sekitar 58 milyar ekuitas. Kemudian lanjut ke *slide* berikutnya.

Ini pendalaman dari uraian tadi untuk tanaman karet. Sejak tahun 2011 Inhutani II bekerja sama dengan Korea-Indonesia *Forestry Cooperative*. Modelnya adalah pinjaman, jadi dananya dari Korea. Kami kerja sama Inhutani II dengan Korea. Kemudian sampai 2018 sudah tertanam 2388 hektar sampai dengan akhir tahun lalu. Ini terus dari total rencana yang dibuka 5800 hektar, itu tanaman karet di Pulau Laut. Kemudian dalam proses pembangunan pemanenan getah karet, kami melibatkan unsur masyarakat sekitar areal kerja untuk tenaga borongan, pemeliharaan dan tenaga sadapnya.

Tantangan yang menjadi perhatian dari kami adalah harga karet ini fluktuasi. Cukup fluktuasi bahkan terakhir cenderung turun. Kemudian juga terkait dengan Partner Strategic yang tertarik dengan industri hutan tanaman karet, karena fluktuatif terus kemudian harganya cenderung menurun, kurang menarik Partner Strategic untuk masuk ke industri karet. Berikutnya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar, Pak Dirut. Pak Dirut tadi jelaskan ini ada kerja sama dengan perusahaan Korea. Apa dasar dari kerja sama tersebut? dan *offtaker* tanaman karet ini siapa Pak?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI II:

Baik, izin menjawab Bapak Wakil Ketua.

Jadi kerja sama, *offtaker* nya dari Jhonlin. Jadi sudah, industri yang sudah *establish* di sana. Kemudian yang mengerjakan pada waktu menanam sampai pemeliharaan itu seluruhnya Inhutani II, hanya dananya dari Korea, tapi statusnya pinjaman dengan bunga 3%, jadi *soft alone*, begitu. Hasilnya nanti bagi hasil. Ini *soft alone* 3%. Lanjut ke *slide* berikutnya.

Dan ini langsung melompat ke trading bongkar dengan masyarakat *slide* 11. Izin menyampaikan. Kenapa ini muncul Inhutani II telah berhasil untuk hutan tanaman karetnya, perdagangan dengan Jhonlin juga berjalan dengan baik. Kemudian ada sejarah kami memiliki pengalaman berhasil, berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan *trading*. Jadi kami ambil karet masyarakat, kemudian kita paketkan untuk dijual ke Jhonlin. Di sana ada peran Inhutani II terkait dengan kalau volumenya besar otomatis lebih, *bargaining powernya* lebih dapat. Kemudian peran Inhutani II juga bisa memberikan pendidikan untuk meningkatkan *quality* dari bokarnya.

Jadi nanti itu kan terkait dengan kualitas. Ada harga ada rupa. Jadi g keahlian Inhutani II, peran Inhutani II memberikan pendidikan ke masyarakat untuk bisa mendapatkan Premium Prize. Ini sifatnya adalah terbuka karena harga karet juga

listnya bisa dilihat siapa saja, sehingga masyarakat juga bisa ikut memonitor. Yang jadi *concern* adalah kualitas dari wakar. Itu yang menjadi perhatian antar Inhutani II dan masyarakat.

Kemudian untuk *slide* berikutnya. Proses pengembangan agroforestri jagung. Jadi di wilayah Kalimantan Selatan itu ada dua industri besar, (suara tidak jelas). Sedangkan di Inhutani II ada kerja sama dengan mitra untuk mengolah hutan tanaman maupun hutan alam dan itu menjadi akan tanaman sela. Ke depan kami mungkin meminta bantu dari DPR RI, Pemda, begitu. Kerja sama untuk mengoptimalkan pengembangan usaha agroforestri di jagung, tanaman selain ini di Pulau Laut khususnya. Kan ini cukup menjanjikan secara data cukup baik. Kemudian potensi *offtaker* nya juga jelas. (suara tidak jelas). Kami sudah komunikasi, mereka siap untuk menampung dengan lebih baik, karena nanti kualitas dari jagung. Kemudian kepastian *supply* juga menjadi *concern*.

Kemudian untuk gambaran tahun 2020 kami akan sudah mulai melakukan untuk tahun depan sekitar 450 hektar dengan produksi proyeksi 5400 kg, atau 5,4 ton. Dua tahun ke depan bisa mencapai hampir 10 ton. Untuk luasan hampir 800 hektar. Itu untuk tanaman sela di Pulau Laut. Berikutnya.

(Suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Saudara dirut kenapa tidak langsung bermitra Langsung dengan PT. Java atau dengan PT yang satunya (suara tidak jelas). Sama-sama kuliah di Amerika dulu ya Pak Budi ya? Jadi kalau bisa kerja sama yang baik, kenapa enggak dikembangkan dan itu pasti untung. Modal kerja kalau pakai mekanisasi, saya yakin biaya produksi paling tinggi, paling tinggi 1800 rupiah. Dan saya yakin biasanya Java itu membeli kurang lebih kisaran harganya antara 3000an. Berarti kan *marginnya* cukup besar sekali. Apa lagi kalau kerja sama. Jadi Dirut nanti enggak usah membeli alat-alat yang berat sekali seperti penggusuran, pemerataan, termasuk mesin tanam, mesin panen.

Saya yakin kalau misalnya Inhutani II itu membuka 3000 hektar, mereka pasti mau. Kalau mereka enggak mau, nanti saya carikan investornya supaya bisa mau. Kalau masalah Java nanti Pak Budi yang ngomong lah. Ini hanya saran dari saya. karena kalau Inhutani ini profitnya bagus, kan suatu kebanggaan. Kita melihat sekarang Menteri BUMN yang baru ini, kalau dulu kan patokannya kalau kerja sama dengan swasta wajib BUMN nya 51%, betul? Siapa yang mau? Contoh PTPN IX, harus 51% BUMN-nya. Pabriknya sudah tua. Kalau pabrik tua otomatis produksinya rendah, listriknya mahal, begitu juga PTPN VII di Lampung.

Jadi kalau memang bisa kerja sama *sama* swasta, kerja samakan. Yang penting jangan melanggar peraturan, jangan melanggar Undang-Undang. Ya? Oke lanjutkan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak *nanya* atau interupsi?

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Interupsi.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya mengomentari apa yang dikomentari oleh Pak Ketua. Namanya saja interupsi. Tapi ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh dari Dirut Inhutani II. Saya ingin minta penjelasan saja, karena ini adalah kerja sama dengan PT. Korea Indonesia *Forestry Cooperative* yang sifatnya pinjamannya adalah *soft loan*. Tadi Pak Ketua juga sudah menanyakan, tapi saya ingin lebih *detail* lagi. Ini proses menentukan kerja sama dengan PT ini di level mana, begitu? Apakah ini karena ini ada datang tawaran atau karena memang ini adalah kebijakan komisaris, atau seperti apa, iya kan? Karena ini kan melibatkan investasi asing ya? Sifatnya *soft loan*. Dan saya ingin juga tahu karena keterlibatan investasi asing itu berapa proporsionalitas permodalan di situ? Berarti kan ada modal asing maksudnya gitu kan? Enggak? Atau pinjaman saja? Oh pinjaman saja, berarti tidak penyertaan modal. Oke.

Jadi saya ingin jelas juga supaya nanti kan tadi karena sifatnya bagi hasil kan, berarti kan dasar bagi hasilnya itu adalah sifatnya pada proporsionalitas kesertaan pinjamannya tadi atau kah dia jadi bagian dari modal sehingga menetapkan begitu? Iya kan? Sehingga proporsionalitas bagi hasilnya itu apakah lebih besar ke sana atau ke sini, begitu? Nah ini saya ingin tanyakan Pak Ketua, ini interupsi saja.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak nanti dijawabnya Bapak tulis namanya Dr. Pak Hermanto ya. Dr. Prof. Hermanto, MBA dan lain-lain lah. Nanti waktu ada sesi jawaban Bapak jawab.

Lanjut Pak, yang lain agak singkat saja yang penting kami ingin mengetahui apa yang dikerjakan dan kira-kira *planning* akan datang apa, serta apa yang kami bisa bantu dari Komisi IV.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI II:

Baik terima kasih Bapak Ketua, Pak Wakil Ketua.

Menjadi catatan kami untuk kerja sama dengan mitra tadi, jadi *offtaker* nya, sudah kami catat untuk yang jagung. Kemudian untuk *slide* berikutnya terkait dengan realisasi. Ini kami sampaikan juga ada minyak astiri. Jadi ada serai wangi dan kayu putih. Untuk kayu putih kami nanti berkolaborasi dengan Perhutani, karena yang punya *expert* kayu putih Perhutani. Kemudian serai wangi ini kami menjadi pertama kali di daerah Pulau Laut. Jadi terus terang masih dalam taraf *pilot project*. Baik di tingkat arealnya atau *on farm* nya, maupun di industri penyulingannya. Masih dalam skala *pilot project* karena ada sub (suara tidak jelas) di daerah Sumatera, nampaknya

ada bisa diimplementasikan di wilayah kerja kami. Tentunya ini perlu kajian dan dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk dari Komisi IV DPR RI.

Tantangan yang menjadi perhatian adalah kembali lagi adalah terkait sama pendanaan, karena belum *success story* di daerah kami, masih *pilot project*. Kemudian dari *pilot project* yang telah kami lakukan masih ada kendala di produktivitas *on farmnya* maupun di minyak sulungnya. Jadi kami masih mengkaji sampai nanti skala komersialnya baru masuk, baru kami akan bisa tawarkan proposal ini.

Berikutnya untuk kemitraan kehutanan. Sampai dengan Oktober ini ada kelompok tani ada 62 kelompok tani, anggotanya total hampir 2000 orang. Untuk luasan 5000 hektar. Itu sudah ada yang keluar SK nya, *coolin and KK* nya sudah keluar, SK *coolin* nya sudah keluar itu ada 8. Bulan kemarin ada tambahan 3, jadi total 11. Sisanya masih dalam proses. Nah ini peran kami untuk berkolaborasi dengan masyarakat kemitraan kehutanan. Terakhir, *slide* terakhir. Kontribusi Inhutani II kepada masyarakat ini terkait dengan BL itu terakhir 1 milyar rupiah. Kemudian untuk tahun depan sekitar 1,27 milyar.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dilanjutkan.

F-PAN (HAERUDIN, S. Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Interupsi apa nanya?

F-PAN (HAERUDIN, S. Ag., M.H.):

Interupsi saja. Terima kasih Pimpinan.

Karena kita ingin ini, dari penjelasan yang panjang tadi, kira-kira Inhutani merugi atau untung hari ini?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI II:

Inhutani II untung Pak. Untung.

F-PAN (HAERUDIN, S. Ag., M.H.):

Inhutani, secara umum baik dari I sampai V hari ini neracanya merugi atau lebih untung?

KETUA RAPAT:

Pak Haerudin, tadi beliau mengatakan yang I untung, yang II untung, nanti yang III, IV, V didengarkan dulu, nanti baru kita bedah. Kalau yang rugi, kerugiannya dimana, bagaimana mengatasinya. Karena yang 3 kan belum. Yang I dan II sudah untung. Ya?

F-PAN (HAERUDIN, S. Ag., M.H.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya pikir supaya tidak lupa kita, jadi pertanyaan yang singkat padat ini memang perlu juga dijawab itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Maksudnya pertanyaan yang mana Pak?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya pertama, pertanyaan saya, yang kedua pertanyaan Pak Haerudin ini.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah dijawab, I dan II sudah melaporkan laba. Yang III kan mau dijelaskan dulu. Jadi nanti I, II, III, IV, V sudah menjelaskan, baru kita ini. Pak Hermanto saya tahu Bapak mau dijawab karena sebentar lagi mau pergi. Sabar dulu Pak, situ Pak, sabar dulu. Lanjutkan III.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III (Ir. B. M. SETIO BASKORO):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi IV,
Yang kami hormati Bapak-Bapak anggota Komisi IV.**

Selanjutnya akan kami jelaskan profil bisnis maupun pengembangan bisnis di Inhutani III. PT. Inhutani III atau eksploitasi (suara tidak jelas) hutan III, seperti juga penjelasan dari pada Inhutani I dan II tadi merupakan peralihan bentuk usaha dari PN Perhutani Kalimantan Tengah menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1974. Kemudian pada tahun 2014 juga PP No. 73 tahun 2014 Inhutani III bergabung dengan *holding* BUMN kehutanan dan Perum Perhutani.

Sedikit izin Pak Ketua, akan kami jelaskan sejarah singkat Inhutani III. Inhutani III awalnya berawal dari perusahaan swasta Belanda (suara tidak jelas) . Pada tahun 1992 beralih ke perusahaan jawatan kehutanan Kalimantan tengah. Kemudian pada tahun 1977 sampai tahun 2000 perubahan pengelolaannya menjadi pengelolaan hutan alam industri dan pengelolaan kayu di Sampit, Kalimantan Tengah. Namun dalam perjalanannya tahun 1993 sampai sekarang kita tidak mengelola hutan alam lagi Pak Ketua. Jadi hanya hutan tanaman industri. Kemudian dalam pengembangannya, hutan tanaman industri dipadukan dengan tanaman perkebunan dan juga agroforestri dan sampai sekarang perubahan Persero menjadi perusahaan, anak perusahaan Perum Perhutani. Itu pada tahun 2014. *Slide* berikutnya.

Untuk areal kerja PT Inhutani III ada di 3 wilayah provinsi, Pak Ketua. Yaitu Kalbar sebesar 119.000, Kalteng 42.000, Kalsel 42.000, Kalteng 5,8 ribu. Jadi total areal ada 197, luas efektifnya 82.000 hektar, luas tanamannya pada saat posisi sekarang adalah 4.283 hektar.

KETUA RAPAT:

Tadi yang enggak efektif berapa luas?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Yang tidak efektif hampir sekitar 70.000.

KETUA RAPAT:

Yang efektif 90.000 sekian?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

82 Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu hampir 50-50 dong? Kenapa sebabnya Pak?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Iya. Di Kalbar Pak Ketua, yang 119.000 itu yang HP hanya 65.000 jadi, (rekaman terputus)

Sedang diupayakan untuk ditindaklanjuti untuk menjadi HGU. Cuma ini memang masih ada kendala Pak Ketua. Jadi ini perlu kami *follow up* lebih lanjut.

KETUA RAPAT:

Tolong nanti kendalanya dijelaskan, biar nanti kan kita bisa koordinasi dengan komisi yang lainnya yang ada di DPR.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Kemudian tadi dilanjut Pak Ketua.

Untuk Kalbar itu wilayahnya di Nanga Pinoh. Kemudian untuk Kalsel yaitu di Pelaihari dan Riam Kiwa. Kemudian di Kalteng adalah di Santilik dan Puruk Cahu. Untuk, lanjut. Untuk portofolio bisnis di Perhutani III adalah sebagai berikut. Pada sebagian besar bisnis Inhutani III adalah melaksanakan rehabilitasi IPPKH, itu hampir 60% dari total pendapatan di Inhutani III. Kenapa ini saya sampaikan Pak Ketua? Karena nanti tentunya di sinilah yang akan saya jelaskan kenapa Inhutani III pada saat ini posisi masih merugi 500 juta. Untuk aset kami juga perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini aset kami adalah sebesar 60 milyar.

Kemudian bisnis kedua yang kami geluti di Inhutani III adalah budi daya tanaman karet, kemudian disusul dengan getah pinus, kemudian agroforestri dan juga optimalisasi aset. Jadi kami punya aset di Sampit seluas 12,5 hektar Pak Ketua. Saat ini optimalisasi aset kami belum bisa berjalan karena ada kendala juga, karena pengurusan izin sepertinya sudah berapa minggu belum diterbitkan oleh Pak Bupati di sana. Ada kendala di pengurusan IMB.

KETUA RAPAT:

Di Sampit? Kalimantan Tengah?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Apa masalahnya?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Izin IMB.

KETUA RAPAT:

Sudah berapa lama?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Ini 6 bulan ini kami sudah mengurus.

KETUA RAPAT:

Mengajukan IMB 6 bulan, sama bupati enggak keluar?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Enggak keluar Pak.

KETUA RAPAT:

Laporkan saja ke Ombudsman. Jadi banyak bupati yang seperti itu saya dengarnya. IMB kok sampai 6 bulan. Kalau memang sudah jelas tata ruangnya kok kenapa harus dihambat? Laporkan saja ke Ombudsman nanti, ya?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Mohon maaf, saya tadi belum memperkenalkan diri. Nama saya Setio Baskoro. Saya mulai bekerja di Inhutani III sejak bulan Februari tahun 2019 Pak. Lanjut Pak Ketua.

Kemudian bagaimana sesuai dengan undangan akan coba kami jelaskan mengenai profil usaha karet dan agroforestri di Inhutani III. Jadi polanya adalah swakelola dan juga kerja sama juga. Saat ini yang untuk swakelola untuk tanamannya adalah seluas 314 hektar dari rencana 1800 hektar. Kemudian produksi rata-rata saat ini sekitar 400 ton per tahun atau produksi per hektar sekitar 1100 kg/hektar.

Untuk kerja sama, ini ada 5 yang saat ini sudah diselesaikan untuk kontrak kerja samanya. Ini rencana jenis tanamannya adalah juga budi daya tanaman karet dan juga jagung dan singkong. Untuk jagung ini kami juga akan kerja samakan, karena kebetulan kebutuhan pabrik jagung di sana yaitu di Jawa ... itu masih banyak membutuhkan produksi jagung untuk bahan baku. Jadi sepertinya pabrik masih *idle*. Kemudian untuk singkong, kami juga kerja sama, sama CBSA karena kebetulan sebagai karteker CV. CBSA itu atau Cahaya Borneo Sukses Agrosindo ini telah mempunyai pabrik singkong Pak Ketua. Jadi kapasitas singkongnya itu sekitar 1000 ton/hari. Cuma pada saat ini masih *idle*. (suara tidak jelas). Jadi ini akan kami kerja samakan dengan masyarakat juga untuk penanaman singkong. *Next*.

Jadi pada saat ini arah dari pada perkembangan pemberdayaan lahan di Inhutani III difokuskan pada pemberdayaan masyarakat hutan. Jadi dapat kami jelaskan sesuai dengan areal kerja dimulai dari Kalbar, Kalsel dan Kalteng itu kami jelaskan bahwa rencana kami di 5 tahun yang akan datang, kami akan menanam seluas 6310 hektar yang terdiri dari tanaman jagung, tanaman karet.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, saya mau tanya. Singkongnya pernah panen enggak?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Pernah Pak.

KETUA RAPAT:

1 hektar menghasilkan berapa ton?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Kebetulan masih rendah Pak Ketua, karena tahun saya, itu baru dicoba tahun lalu. Tapi tahun ini terkendala karena iklim Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Karena apa?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Iklim. Jadi karena memang ekstrem di Kalimantan mulai Februari tidak ada hujan sama sekali. Jadi sampai detik ini rencana penanaman singkong belum terealisasi.

KETUA RAPAT:

Belum tanam? Belum Anda tanam?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Belum. Karena belum ada hujan.

KETUA RAPAT:

Iya nanti tolong nanti saya diinfokan, 1 hektar bisa menghasilkan berapa ton.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Karena kalau enggak efektif, jangan tanam singkong. Tapi setahu saya kalau lihat dari struktur tanahnya, itu ya kalau produksinya cukup bagus. Karena kan umumnya singkong itu di lahan pasir pun cukup bagus hasilnya. Apa lagi di sana kan tanah merah ya? Itu pasti jauh lebih bagus lagi. Iya? Kalau enggak efektif ya jangan dikerja samakan tanam singkong. Cari yang lain. Silakan.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Untuk penyerapan tenaga kerja, rencana 5 tahun ke depan ini kami dimulai dari tanaman TBM, atau Tanaman Belum Menghasilkan dengan penggunaan standar formasi tenaga sekitar 0,4 – 0,5 tenaga per hektar. Jadi 5 tahun ini kami akan menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja. Termasuk di antaranya adalah alokasi perhutanan sosial yang direncanakan 5 tahun ke depan ini seluas 16.500 hektar. Ini untuk kerja sama baik tanaman karet, jagung dan juga seperti yang kami sampaikan tadi adalah singkong. *Next*. Terus.

Jadi ini prospek pengembangan usaha Inhutani III. Bisnis utama adalah getah karet, kemudian Jasa Rehabilitasi Hutan atau DAS. Tapi pola IPPKH Pak, kebetulan kami belum masuk yang reguler. Kemudian untuk bisnis turunan adalah agroforestri jagung dan singkong dan juga getah pinus, kemudian Sriwangi. Di sini ada sawit Pak Ketua. Ini sawit adalah sawit yang selama ini diokupasi oleh pihak lain. Dan berkat kerja sama dengan Pengadilan Negeri Daerah, akhirnya areal seluas 300 hektar berhasil kami ambil alih kembali. Jadi ini kami masukkan ke rencana. Cuma sesuai

dengan izin dari KLH bahwa izin hanya dalam satu siklus daur. Jadi setelah 30 tahun nanti akan kembali ke tanaman kehutanan Pak. Jadi bukan kami yang nanam.

Kemudian untuk bisnis lain-lain adalah optimalisasi aset. Kemudian kami juga benih eukaliptus dan akasia.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Dirut, maaf Pak Dirut. Tadi ini yang untuk usaha singkong ini. Ini PT. CBSA. Ini PT bergerak di bidang apa Pak ya? Apa, dia pabrik apa? Dia *ngambil* singkongnya untuk dijadikan apa?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Pabrik singkong tapioka Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tapioka ya? Oke.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Kemudian tadi dari pertanyaan kenapa saat ini posisi Inhutani III masih rugi, ini ada di masalah pendapatan kami dari rehabilitasi IPPKH, rehabilitasi DAS. Jadi seperti kami jelaskan bahwa saat ini pendapatan dari Inhutani III adalah paling besar dari rehabilitasi DAS. Cuma seperti semula yang kami jelaskan Pak Ketua bahwa kondisi iklim mempengaruhi pembayaran, pencairan, pembayaran tahapan yang harusnya sudah dibayarkan, tapi terkendala karena iklim di sana belum bisa dilaksanakan BAP atau Berita Acara Pemeriksaan karena masalah iklim, sehingga belum bisa dilakukan penyulaman Pak Ketua. Kami prediksi November ini akan hujan, dan ternyata sampai Desember ini belum ada hujan. Sehingga pembayaran belum bisa dilakukan. Itu nilainya sekitar 7 milyar. Padahal modal untuk biaya IPPKH itu sekitar 10 milyar untuk tahun ini Pak. Di samping juga untuk beberapa *community* harga karet juga turun. Tapi terutama masalah IPPKH Pak.

KETUA RAPAT:

Harusnya, kalau tadi masalah IPPKH itu kan harusnya bisa diaudit. Berapa yang sudah *clear*, kan bisa dibayarkan dulu. Kemudian, enggak bisa?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Enggak Pak. Harus 95%.

KETUA RAPAT:

Harus 95%? Nah sekarang yang sudah selesai berapa di luar penyulaman? Ada 70?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

70 ada. 70-80.

Jadi kami berusaha melakukan adendum, terutama ini kan yang paling banyak dari Adaro. Apakah bisa dilakukan pembayaran sesuai dengan tegakan yang ada di lapangan? Sesuai dengan hasil yang sudah bisa dikatakan selesai, begitu. Tapi tetap karena peraturannya harus mengharuskan 95%. Itu satu Pak Ketua. Yang kedua memang di Kalsel itu juga ada kendala regulasi. Karena setelah dalam perjalanannya, kemudian terbit surat keputusan dari daerah, dari bupati bahwa dari Kadis Kehutanan bahwa bibit yang ditanam dalam proyek DAS kami itu harus, tapi ini khusus untuk Kalsel, harus yang setinggi 1 meter, Pak Ketua. Sementara perjanjian di kontrak, dulu adalah 30 cm. Nah ini masih kami coba untuk adakan pendekatan, karena terus terang kami dirugikan. Kalau kami harus membeli bibit baru, itu kami rugi sekitar 1,5 M.

KETUA RAPAT:

Apa urusannya Kadis bikin surat itu? *Emang* duit dia? Kan bukan duit dia? Bukan pakai dana APBD. Iya kan? Terus *ngapain* dia bikin surat itu?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Enggak Pak Ketua, enggak. Cuma Adaro tetap, perusahaan tambang tetap patuh kepada keputusan dari Kepala Dinas.

KETUA RAPAT:

Tapi kan perjanjiannya dengan Anda kan 30 cm, bukan 1 meter.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Memang betul Pak. Cuma Adaro enggak mau melakukan BAP kalau tidak sesuai dengan.

KETUA RAPAT:

Enggak, ditanyakan saja kepada dinasnya? Apa halnya? Sekarang kita berpikir begini lah secara logika. Yang nama, untuk ke lokasi BPDAS itu kan enggak gampang. Bayangkan kalau 1 meter, dia punya diameter bawahnya saja itu berapa? Iya kan? Iya mungkin saudara Dirut enggak ada koordinasi kali sama Kadisnya.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Sudah jumpa Pak.

KETUA RAPAT:

Iya bukan masalah jumpanya, tahu lah. Iya lanjutkan.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Siap Pak, siap. Siap Pak ketua. *Next*.

Jadi selanjutnya ini hanya gambar kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Pak Ketua untuk pembebasan lahan yang telah ditanami sawit, dan sekarang *alhamdulillah* semua sudah kembali ke Inhutani III. Seterusnya adalah *next*. Ini juga kerja sama, *next*. Ini persiapan untuk rencana penanaman yang seharusnya dilaksanakan pada bulan 6, lalu bulan 7 (suara tidak jelas), tapi karena memang saat ini masih belum ada hujan, jadi hanya dilaksanakan (suara tidak jelas), terus. Ini daerah rehabilitasi yang dilakukan oleh Inhutani III. *Next*, terus.

Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan Pak Ketua.

Wa Billahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Inhutani IV. Enggak ada? Oh iya. Saya bingung bacanya di sana, orangnya enggak ada, ternyata pindah.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI IV (Ir. AHMAD IBRAHIM, M.Sc.):

Bissmillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan Rapat Ketua Komisi IV,
Beserta seluruh anggota Komisi IV.**

Baik, kita coba meringkas paparan dari Inhutani IV. Kami mulai dari wilayah kerja. Lanjut. Wilayah kerja Inhutani IV atau kita urut dulu dari dasar pendiriannya. PT. Inhutani IV didirikan awalnya adalah menggunakan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1991. Pada saat itu ditunjuk bahwa wilayah kerja Inhutani IV adalah mencakup 4 provinsi. Itu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Kemudian sekarang karena Riau dibagi dua, ada Kepri dan Riau menjadi berarti wilayah kerjanya adalah mencakup 5 provinsi. Lanjut, yang selanjutnya.

Namun, jadi kami sudah mulai namun. Dengan sejarahnya tadi bahwa PT. Inhutani IV wilayahnya itu sangat luas kelihatannya, Sumatera Bagian Utara. Namun, di dalam pelaksanaannya kalau kita lihat, nanti kita lihat mulai dari sejarahnya. Jadi pada saat tahun 1991 itu jelas berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah dan luas wilayahnya pun jelas waktu itu, di mana memiliki 318 HPH-HTI dan 873 HPH. Pada saat itu masih punya pada saat itu masih punya (suara tidak jelas).

Namun, ada sebuah perkembangan yang luar biasa yaitu pada saat reformasi yang kemudian dirasakan mulai tahun 2000 dimana kalau boleh kami sampaikan, Inhutani menjadi satu-satunya perusahaan yang khas di *holding* sebagai sebuah perusahaan yang tidak memiliki areal definitif Pak. Jadi kalau pun ada areal itu adalah areal perusahaan patungan, ini disampaikan. Jadi contoh, di tahun 2000-2006, HPH-HTI yang 318 itu dicabut tahun 2002. Kemudian, penugasan rehabilitasi yang

sebanyak 873 hektar di tahun 2003 juga dicabut. Mohon maaf ya. Penugasan penyiapan pinus yang dicabut.

Sehingga, kita coba masuk ke dalam kondisi di tahun 2007-2016 juga terjadi difestasi. Sampai akhirnya kalau kita lihat di dalam kondisi terakhir, kita lihat di dalam poin 6 itu, inilah kondisi Inhutani IV sekarang. Jadi sebuah perusahaan, anak perusahaan dari *holding* Perhutani yang tidak memiliki areal definitif. Kemudian kalau pun kita bekerja sekarang adalah menggunakan izin, menggunakan izin P49, Peraturan Menteri No. 49. Karena Peraturan Menteri 66nya sudah habis, itu mengenai masa izin penyiapan.

Kemudian kita sekarang wilayah kerja yang ada, yang berupa areal adalah ada di dalam 6 perusahaan patungan. Dari 6 perusahaan patungan yang ada, 3 aktif, 3 tidak aktif. Mohon maaf, sebetulnya belum saya siapkan di sini, tapi sedikit saya jelaskan karena menurut saya cukup penting, saya coba ceritakan secara deskripsi. Jadi 3 perusahaan yang aktif itu pertama kalau kita urut dari Aceh, PT. THL, luasnya 97.300. Kalau tidak salah PT. THL disiapkan untuk *supply* kertas kraft. Nah sampai dengan sekarang kalau kita lihat produksi atau memaksimalkan dari THL itu belum bisa semaksimal mungkin, karena kalau kita lihat juga yang ditebang sedikit ya, belum juga digunakan untuk kebutuhan kertas kraft. Yang ada sekarang adalah digunakan hanya untuk sadapan pinus saja. Setahu saya, sadapan pinusnya pun tidak terlalu besar, sekitar 5000 kalau tidak, sekitar 5000 ton saja.

Kemudian juga kita punya perusahaan patungan PT. HBP, HBP itu Hutan Barumun Perkasa. Saya ingin menggambarkan pada Komisi IV, ada hal-hal yang menurut saya agak ironis dari gambaran hutan-hutan yang dikelola di perusahaan patungan. Mungkin nanti juga sama di konsesi. Di mana banyak sekali hutan yang kemudian luas efektifnya itu sangat kecil. Contoh misalkan PT. HBP ini yang perusahaan patungan kita. Luasnya sih secara penunjukan adalah 11.000 hektar. Ironisnya luas efektifnya yang sekarang hanya 600 hektar, yang ekonomis. Yang lainnya, perambahan, (suara tidak jelas) dan lain sebagainya.

Jadi ini adalah gambaran umum dari perusahaan-perusahaan patungan yang ada di Inhutani. Jadi kalau saya gambarkan tadi, yang masih berjalan adalah PT. THL yang di Aceh, Tusam Hutan Lestari, kemudian Hutan Barumun yang di Aceh juga, dan PT. Sinar Belantara Indah di Sumatera Utara. Sedangkan 3 perusahaan patungan lainnya, saya singkat saja PT. RTS, PT. RWP, PT. RPU, total luasnya masing-masing kalau saya jumlah ada sekitar 16.000 relatif tidak berjalan. Jadi itu sudah tidak aktif semenjak reformasi kalau tidak salah. Nah ini gambarannya.

Sehingga sebetulnya harapan kami ke depan adalah kita sedang mencoba bagaimana dari salah satu perusahaan patungan ini minimal menjadi konsesi Inhutani. Sebagai gambaran supaya Bapak juga *pirso*, Inhutani IV itu asetnya 65 milyar Pak. Karyawannya 120 dan kalau kita lihat, nanti saya jelaskan tentang pendapatannya. Lanjut, jadi itu kira-kira itu gambaran yang ingin saya sampaikan tentang kondisi bahwa tidak memiliki areal definitif. Lanjut. *Next slide*.

Nah ini kegiatannya Pak, dapat kami katakan sebetulnya secara proses produksi bahwa PT. Inhutani IV itu cukup sederhana Pak. Jadi kegiatannya hanya 3, produksi getah pinus yang tadi, getah pinusnya juga di areal orang. Kemudian kita melaksanakan jasa kelola SDH. Jasa kelola SDH itu jasa menanam. Saya bedakan jasa APBN dan non APBN. Jadi kalau APBN itu kita ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan BPDAS, biasanya kita ikut lelang. Kemudian kita melaksanakan CSR dari BUMN dengan bersinergi, atau melaksanakan rehabilitasi di IPPKH. Sedangkan yang ketiga yang masih relatif kecil adalah kita ingin adanya produksi agroforestri yang

relatif sampai dengan sekarang baru berjalan dan baru kita mulai di tahun 2019 saja. *Next slide.*

Kira-kira gambaran sederhananya begini Pak, *value chance* di PT. Inhutani itu sangat sederhana, di mana kita hanya melaksanakan, kalau kita lihat dari produk primernya hanya getah pinus, jasa kelola SDH dan kemudian produk agroforestri. Jadi karena kan input nya pun terbatas. Input nya izin penyadapan getah pinus. Inginnya sih izinnya itu di wilayah sendiri, begitu. Tapi ini kita lebih banyak di wilayah orang. Bahkan kita jadi trading. Jadi kita malah pinjam punya izin perorangan. Kita sebagai sebuah BUMN tapi pinjam izin perorangan, agak ironis juga itu. Kemudian kompetensi yang kedua adalah pembuatan tanaman, maka kita akan melaksanakan jasa kelola, dan yang terakhir adalah kita akan mengembangkan produk agroforestri ke depan.

Sebagai gambaran Pak, ini perlu kami ceritakan. Di tahun 2019 ini, relatif produk agroforestri masih belum banyak. Mohon maaf, kita langsung angkanya dulu saja deh. *Next slide.* Nah ini Pak, gambaran dulu biar nanti lebih jelas. Untuk bisa melihat bagaimana skala Inhutani, saya coba ceritakan produksi dari mulai 2013-2019. Kalau kita lihat, macam produksinya juga sederhana. Hanya ada getah pinus, getah karet, kemudian sempat ada industri, itu kemudian ada yang namanya gondorukem, terpentin, rosin ester, itu adalah produksi dari getah pinus.

Kemudian kegiatan ke tiga adalah jasa rehabilitasi. Jadi kalau kita lihat jasa rehabilitasi dibedakan APBN dan non APBN. Kemudian ada kegiatan baru (suara tidak jelas). Kita lihat dari getah pinus. Getah pinus tahun 2013 itu 2128. Kita ingin mencoba di tahun 2019 kita prognosakan 4900. Sebagai bentuk komparasi, seberapa besar sih 4900 itu? Kita bandingkan dengan produksi holding Perhutani, di RKP 96.000. Jadi kita bisa gambarkan *positioning* dari Inhutani IV dengan getah seperti ini, dengan jumlah seperti ini.

Kemudian ada getah karet. Getah karet itu adalah pernah dilaksanakan pada tahun 2013-2014 ketika harga bagus, ketika 36.000. Kemudian ketika sekarang sudah 16.000, getah sudah menjadi tidak menarik lagi. Kemudian tahun 2015-2017 Inhutani pernah mengolah getah pinus yang ada dari sebanyak tadi 4000an di sana itu dengan berupa (suara tidak jelas) Namun relatif tidak menguntungkan sehingga sekarang kembali. Jadi kalau kita lihat juga betapa sederhananya begitu, mudah banget. Hanya disadap, jual. Begitu saja.

Kemudian, bagaimana untuk kemudian kita juga bisa menghidupi perusahaan? Kita lihat di dalam jasa rehabilitasi. Nah ada sebuah pertumbuhan yang luar biasa sebetulnya, karena memang tidak ada pilihan lain ketika dari getah kita tidak punya uang, kita coba ambil dari kegiatan tanaman. Di mana APBN kalau kita lihat di tahun 2013-2015 kita bisa menanam di angka 3000an, namun mulai 2016, 2017, 2018 menurun hanya 200 hektar-200 hektar. Nah kita coba lagi kemudian di tahun 2019 ini kita mengambil kegiatan tanaman sebanyak 5.500. Kemudian ada di kegiatan CSR.

Ada kegiatan lain yang ingin kita kembangkan adalah macadamia, yang ingin saya coba. Macadamia ini mungkin sebagian sudah *pirso*, sebagian belum. Macadamia adalah jenis semacam produk kacang Pak yang diambil dari Suku Aborigin, yang adanya di. Sekarang ini satu-satunya importir baru PT. Inhutani. Kami ingin mencoba PT. Inhutani IV menjadi icon. Jadi sekarang kami sudah mencoba langsung berkomunikasi dengan Dirjen BPDASHL, kemudian sekarang sudah 9 BPDAS menggunakan benih dari Inhutani, karena baru kita.

Nah setelah kita berkomunikasi dengan pakar macadamia, memang sangat prospektif Pak. Kalau kita lihat yang sekarang sudah berkembang itu di Vietnam dan sebagainya. Hanya saja memang kalau kita lihat untuk di Indonesia ini agak belum pas, di mana baru ditanam di RHL. Karena sebetulnya dia akan menjadi ekonomis

kalau ditanam di kebun. Nanti akan saya perlihatkan di dalam *slide-slide* berikutnya berupa gambar. Namun ini sudah menjadi lumayan lah, sudah menjadi pendapatan buat Inhutani. Kita lihat bagaimana gambaran,

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut. Macadamia ini nanti kacangnya dijualnya ke mana?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI IV:

Ke masyarakat Pak. Pabrik juga bisa, nanti ada contohnya. Lanjut.

Nah sebagai gambaran supaya bisa kita lihat Inhutani IV tadi ada pertanyaan rugi apa enggak, begitu kan? Ini sudah kita ke empat. Kalau kita lihat sejarahnya dari 2014 sampai, nanti progresnya 2019 itu fluktuatif. 2014 sempat laba 4,6 milyar. Namun omsetnya sangat kecil, 46 milyar. Jadi bagus banget itu hampir 10% *profit margin*nya. Di tahun 2015 pendapatannya, omsetnya hanya 14 milyar, tapi masih laba juga 1 milyar. Namun, di tahun 2016 ketika omsetnya 104 milyar, *minus* 2 milyar. Di tahun 2017 omset 73, *minus* 2,3. Jadi kalau kita lihat pakai regress ini susah ini linear apa enggak ini, karena jauh ini kegiatannya bentuknya. Nah sehingga kemudian kalau kita lihat di tahun 2019 omset cukup tinggi, kita prognosa 106, tapi *profit margin*nya hanya 1,1.

Sebagai saya ceritakan Pak, kenapa kok dengan omset 106 tapi profitnya hanya 1,1? Karena kegiatannya tadi yang sangat sederhana Pak. Kegiatannya hanya jualan getah pinus, kemudian melaksanakan kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung) dan jualan macadamia. Tiga itu saja. Kita untuk penjualan pinus sekarang 67 milyar. Kenapa kemudian dari 67 milyar ini kemudian labanya hanya sedikit? Karena kita kerja di lahan orang. Jadi kita hanya trading saja.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Inhutani IV itu lebih seperti jasa saja Pak. Dia tidak punya wilayah, getahnya pun dari lahan orang. Kemudian RHL, nah ini yang mungkin malah relatif lebih baik. Kita mungkin ada sekitar *profit margin* 10-15% kalau dari jasa tanaman. Itu kira-kira yang menggambarkan tentang pendapatan Inhutani IV. Jadi mudah-mudahan untuk tahun 2019 masih laba, namun dengan laba yang sangat mepet sekali. Lanjut.

Nah ini sebagai rencananya Pak untuk tahun 2019. Ini kegiatan tadi sudah disampaikan jadi luasnya. Kemudian sebagai gambaran, bagaimana getah? Getah itu sekarang kita produksi sekitar 5.000, 4.900. Sebagian kita ekspor Pak ke Vietnam, ke China. Sebagian kita kirim ke induk untuk kegiatan di PPCI di Pematang. Lanjut.

Nah ini rencana RKAP 2020. Jadi kalau tahun 2019 kita RKAP nya 106 milyar, ada pertumbuhan sekitar 118 milyar untuk tahun 2020. Lanjut.

Nah ini Pak, jadi permasalahan pokok di Inhutani IV menurut kami adalah tidak ada areal definitif. Ketika kita tidak memiliki areal definitif, maka ketika ingin mengembangkan aset, kita mau nanam investasi di mana? Paling mungkin di perusahaan patungan. Tapi di perusahaan patungan kan tidak di wilayah sendiri, begitu. Jadi dia nanti dibuku di aset orang.

Kemudian peraturan perizinan. Nah dari poin 1, apa yang ingin kami sampaikan kepada Komisi IV? Barang kali boleh jadi Pak, perlu ada lagi misalkan bagaimana Inhutani IV bisa mendapatkan konsesi atau izin penyadapan kembali seperti tahun sebelumnya. Sekarang juga kalau kita lihat (suara tidak jelas) sudah banyak berupa APL ya, kalau kita lihat sebagian juga di PHL juga sudah banyak APL. Kita lihat juga yang di Padang itu juga.

Sebagai contoh Pak, jadi ketika kita ingin mendapatkan getah pinus di Padang itu kita menguruskan punya perorangan. Jadi Inhutani IV sebagai sebuah BUMN ketika ingin mendapatkan izin penyadapan pinus ke KPH itu sama perlakuannya dengan izin perorangan kalau kita mengikuti P39. Jadi enggak *pede*, juga begitu Pak. Kita sebagai BUMN ketika kita diperlakukan sama untuk mendapatkan. Padahal kita menghidupi 120 karyawan. Itu untuk peraturan perizinan.

Nah sedangkan untuk tidak memiliki areal definitif, kita ingin mencoba dari salah satu perusahaan yaitu RWP ya? Itu kita coba ingin akuisisi Pak. Mudah-mudahan dengan akuisisi ini sehingga kemudian menjadi wilayah.

KETUA RAPAT:

Itu bidang kerjanya apa yang mau diakuisisi?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI IV:

Yang RWP, HTI Pak. Jadi HTI di Aceh itu banyak yang tidak berjalan. Kalau diskusi kami terhadap para pemegang saham swasta memang rata-rata mereka mengatakan enggak *nyucuk*, begitu Pak. Jadi kalau itu dikerjakan secara resmi, itu enggak akan *nutup*. Apa lagi di Aceh kan sekarang ada moratorium, di mana kan tidak boleh ditebang, harus diolah di situ, begitu. Nah memang di sana masih setahu kami waktu itu HPH nya masih ada hutan alamnya dan sebagian sudah ditanam.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirut, HTI-HTI di Aceh selain tadi THL, THL itu pinus kalau enggak salah untuk *supply* ke KKA. Kalau HTI yang lain yang Bapak ingin akuisisi ini tujuannya untuk apa Pak?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI IV:

Oh iya, jadi begini. Kita ingin sebetulnya mengembangkan yang namanya kayu putih. Setahu kami kayu putih di Sumatera itu belum begitu banyak, kenapa? Kita mencoba kemarin mencari referensi, iya mudah-mudahan ada yang tahu dari pertanian, nilai ekonomi dari sawit itu sekitar 41 juta per tahun nilainya. Sedangkan kalau kayu putih itu bisa sampai 62 juta per tahun. Kemudian dari sisi cara mengolah kan kalau kita lihat bahwa sawit itu kan agak sulit untuk UMKM, tapi kalau kayu putih bisa Pak. Karena kalau sawit itu untuk investasi CPO kan 100 milyaran. Tapi kalau kayu putih dengan bikin industri 4 milyar, 3 milyar sudah jalan.

Nah kami kemarin ketemu dengan Bupati Kampar. Jadi Bupati Kampar kebetulan di sana ada daerah PLTA Pak, di mana PLTA nya itu sekelilingnya sawit. Itu sudah susut airnya, begitu. Nah dia ingin memberikan opini kepada masyarakat bahwa ada tanaman lain sebagai substitusi dari pada sawit yang nilai ekonominya lebih baik dan lebih cepat, skala industrinya bisa dikelola sendiri, tidak tergantung kepada swasta. Saya pikir dengan industri sekitar untuk membuat kayu putih satu industri cukup 25 hektar dengan industri senilai 2-3 milyar. Nah ini yang akan kita coba ke depan.

Jadi salah satunya tadi Pak, kan tadi Bapak bertanya. Kalau kita punya wilayah sendiri, mudah-mudahan kami ingin mencoba kayu putih pun menjadi pelopor lah minimal di Sumatera, karena setahu kami di sana belum ada. Kenapa kita pilih kayu putih? Kayu putih itu wilayahnya paling lebar Pak. Jadi di tanah tandus dia bisa, di tanah agak sedikit tinggi bisa. Sedangkan kalau tadi yang kami sebutkan macadamia itu memang agak ada batasan. Dia hanya bisa di tanah 900 m ke atas.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, saya mau tanya. Kalau kayu putih itu diekspor enggak?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI IV:

Kebutuhan dalam negeri sekarang 4000 ton, dan Perhutani saja baru memproduksi 373,

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirut, ini kok saya lihat Bapak sama angka Bapak itu masih bingung-bingung dari tadi? Bagaimana Bapak mau akuisisi sesuatu, Bapak mau mengembangkan suatu usaha tapi Bapak angkanya saja belum jelas?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI IV:

Jelas Pak. Artinya kita katakan secara ekonomi untuk kebutuhan kayu putih itu masih luas. Sekarang ini setahu kami kayu putih itu kekurangannya diisi dengan minyak eukaliptus dari China. Nah kalau kita ingin supaya (suara tidak jelas) tadi bagaimana mencari solusi terhadap substitusi sawit, kita bisa mensosialisasikan. Boleh jadi ke depan kayu putih ya bisa membantu Pak. Artinya termasuk juga untuk konservasi kan. Kita kan bahwa sawit kan kering, tidak bisa menyerap air. Kalau kayu putih boleh jadi relatif lebih baik, karena sistem perakarannya serabut ya tidak seperti perakaran. Itu maksud kami Pak.

KETUA RAPAT:

Oke cukup, dilanjut. Sekarang yang terakhir Inhutani V.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V (Ir. NATALAS ANIS HARJANTO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi IV Bapak Sudin,
Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi IV Pak Budi Satrio Djiwandono,
Yang saya hormati pula Pak Hasan Aminuddin,
Serta Bapak-Ibu anggota Komisi IV dan rekan kami Pak Dirut,
Direktur Utama Perum Perhutani,**

Direktur Utama I sampai dengan IV.

Perkenalkan Bapak-Ibu, nama saya Natalas Anis Pak. Kami biasa dipanggil Pak Anis saja. Kami menjabat di Direktur Utama Inhutani V sejak Januari 2019. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal Pak, ada 10 di sini *outlinenya*. Yang pertama adalah kami akan menyampaikan sejarah perusahaan, kemudian pengurus perusahaan, areal IUPHK HTI Inhutani V, sebaran konflik di Indonesia, membangun hutan dengan pola kemitraan, proses bisnis Inhutani V, rencana pengembangan ke depan, diversifikasi usaha, kinerja keuangan perusahaan, serta yang terakhir adalah manfaat dan keuntungan para pihak.

Kami mulai Pak mohon izin dari yang pertama. Jadi PT. Inhutani V ini didirikan pada tahun 1991. Jadi intinya kenapa Inhutani didirikan ini adalah untuk merehabilitasi eks HPH yang pada saat itu kondisinya kurang bagus Pak tegakannya, sehingga kami dibentuk ini Inhutani V dibentuk ini untuk menangani reboisasi atau rehabilitasi hutan terhadap eks HPH pada saat itu Pak. Nah pada tahun 1996 ini baru kami mendapat izin secara definitif yaitu di Lampung seluas 55 ribu hektar.

Kemudian di tahun 1998 Pak, ini ada insiden di Indonesia kan saat itu ada reformasi sehingga habis Pak areal kami dijarah dan diokupasi oleh masyarakat, seluruhnya Pak. Dan pada tahun itu juga ada revisi SK di mana ada penambahan 1 register lagi, tadinya 42, 44, 46 ditambah dengan 118 di Pesawaran di Lampung Pak. Itu ada sekitar 1300an luasnya.

Kemudian di tahun 2001 ini areal HPH yang tadi diserahkan kepada kami itu eks HPH itu dicabut Pak pada saat itu oleh LHK, kebijakan Pemerintah pada saat itu. Sehingga praktis di tahun 2009 itu areal kerja kami hanya 56.547, itu yang di Lampung Pak. Jadi wilayah kerjanya itu adalah Sumbaksel Pak pada saat itu, yaitu Sumsel, Lampung, Bengkulu dan Jambi. Tapi begitu HPH dicabut, yang eks HPH dicabut itu kami hanya Lampung saja pada tahun 2009. Kemudian masih di 2009 akhir itu ditambah satu lagi yaitu di Bangka Pak. Jadi kalau total keseluruhan wilayah kami itu adalah 73.277 hektar.

Nah mulai Pak, jadi dari 73.277 hektar ini yang *fully undercontrolled* itu hanya 15% Pak, artinya apa? Bahwa dari 73.277 itu hanya 11.000 yang bisa kami kendalikan. Selainnya kenapa? Selainnya adalah diokupasi oleh masyarakat. Itu secara ringkas Pak, jadi sama dengan yang lain-lain. Di 2014 kami diangkat sahamnya menjadi ke Perum Perhutani sehingga statusnya adalah sekarang anak perusahaan dari Perum Perhutani. Lanjut.

Ini sekedar informasi saja Pak. Kami hanya 2 direksi yaitu saya dan Pak Barisal. Jadi hanya 2 karena memang wilayah kami hanya 73.277. Satu komisaris ini pertimbangannya adalah karena satu efisiensi dan *working area* kami tidak terlalu luas, jadi hanya dua direksi. Lanjut. Ini Bapak-Ibu sekalian wilayah kami. Jadi yang dibulatkan itu adalah wilayah kami Bapak. Jadi yang di Bangka itu ada 16.000. Kemudian yang di Lampung itu 56.000 sehingga totalnya kami sebutkan tadi 73.277 hektar. Lanjut.

Sebaran indikatif. Bapak-Ibu sekalian, bahwa ini kami dapatkan peta ini pada saat kami mengikuti *workshop* Pak di Manggala pada saat itu diundang di LHK. Kami sempat memetakan, sempat kami ambil di mana yang merah-merah itu adalah konflik Pak, tenurial. Sehingga kami di Lampung dan di Bangka itu juga masuk di dalam konflik tenurial. Sehingga permasalahannya bahwa okupasi lahan oleh masyarakat yang pertama. Yang kedua, penanaman tanaman semusim. Jadi masyarakat ini menanam tanaman semusim singkong, tebu, jagung di wilayah kami. Kemudian

tekanan alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan non hutan, kebun dan pemukiman, serta kerusakan lingkungan. Itu permasalahannya Bapak. Lanjut.

Ini Bapak, kami fokus kepada di PT. Inhutani V yang di Lampung. Jadi karena kondisi atau tadi yang kami sampaikan bahwa hanya 15% yang bisa kami kelola sehingga kami melakukan program yang namanya program kemitraan Pak. Jadi tidak ada kata lain, kita harus menggandeng, harus melibatkan masyarakat. Itu sudah keniscayaan Pak dan ini pelan-pelan kami lakukan, tapi masalah sosial memang kami sangat berhati-hati Bapak-Ibu sekalian. Karena di register kami ini 42, 44, 46 ini juga dekat dengan Mesuji Bapak Ketua dan Bapak Wakil dan Bapak Anggota yang terhormat. Sehingga kami pun sangat berhati-hati di dalam melakukan sosialisasi.

Intinya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa menanam tanaman pokok di samping tanaman yang sudah ada Pak. Jadi mereka itu sudah ada di lahan itu, di kawasan kami, sudah ada. Jadi sudah terlanjur ada di dalam lokasi kami dan sudah menanam. Apa tanamannya? Singkong, jagung, kemudian ada beberapa sawit tapi tidak terlalu banyak Pak, dan beberapa tebu. Ini yang *existing* di sana. Nah program kami tadi itu Bapak dan Ibu sekalian, adalah program kemitraan dengan mengajak masyarakat untuk ikut.

Nah di register 44 itu sudah ada sekitar ada 48 KTA. Kemudian di register 42 itu ada. KTA itu mohon maaf Bapak-Ibu, Kelompok Tani Hutan. Kemudian yang 46 ini ada 9 KTA. Kemudian yang register 18 ini ada 1 KTA. Sehingga total KTA nya itu ada 63 Kelompok Tani Hutan dengan keluarga atau kepala keluarga 5.045. Nah di Lampung itu seluruhnya Pak itu di data kami ada 12.120 KK. Nah yang sudah atau yang bisa kita gandeng ini baru separuhnya Pak 45%. Saya sampaikan tadi 5.045. Sehingga masih banyak memang yang belum dan ini kami akan terus lakukan pendekatan kepada masyarakat untuk bisa mengoptimalkan lahan yang diberikan izin kepada kami.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirut. Sebentar, maaf. ingin informasi saja. Ini luas 56 ribu hektar itu ada 1, 2, 3, *sorry*, ada 4 blok? Itu permasalahan sama masyarakat apakah ada atau ini *clean and clear* ini Pak dari blok-blok ini?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V:

Ada masalah Pak. Ada masalah Pak. Semuanya ada masalah Pak. Iya. Jadi memang kita *open access* dan itu tadi Pak kami sampaikan bahwa *existing* sudah ada di dalam Pak, masyarakatnya itu. Sudah ada di dalam. Lanjut.

Jadi secara singkat Bapak-Ibu sekalian kami sampaikan bahwa kami ini ada di dua unit yaitu unit Lampung dan di unit Bangka. Kalau Belitung ada, tetapi Belitung hanya keproyekan saja atau hanya rehabilitasi lahan. Jadi areal kerjanya di Lampung dan di Bangka. Kemudian kami juga ada persemaian sengon, ada tanaman akasia, ada kemitraan tadi itu. Nah tanaman pangannya apa? Tanaman pangannya adalah singkong dan tebu serta jagung yang sudah atau ditanam oleh masyarakat. Kemudian hasilnya hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Nah kami membantu masyarakat untuk menggandengkan kepada jual ke industri. Ke industri tebu dan industri tapioka Pak. Kami mencoba untuk menggandengkan masyarakat dengan industri tebu dan industri tapioka. Lanjut. Sehingga,

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, Anda tadi mengatakan menggandengkan itu apa profitnya untuk Inhutani V?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V:

Sementara ini kami sebetulnya butuh hanya pengakuan bahwa masyarakat itu,

KETUA RAPAT:

Numpang?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V:

Iya Pak di tempat kami Pak. Jadi,

KETUA RAPAT:

Hanya *numpang?*

ANGGOTA KOMISI IV:

Bagi hasil kan?.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V:

Iya bagi hasilnya ada. Tapi kami juga ingin supaya masyarakat mengakui bahwa itu wilayah kami. Kami akan membantu Pak supaya mereka juga bisa simpati kepada kita, di samping ada bagi hasil juga Pak.

KETUA RAPAT:

Pembagiannya berapa itu?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V:

Pembagiannya itu 30 Pak *anunya*. Kalau misalnya yang menanam mereka itu mereka 70, kami 30 Pak.

KETUA RAPAT:

Satu lagi yang belum Anda jelaskan mengenai register 45 ya? Mesuji.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V:

Yang 45 bukan Mesuji.

KETUA RAPAT:

Eh yang Mesuji, yang lagi konflik. Itu bagaimana? Karena setahu saya itu,

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V:

Itu di luar wilayah kami Bapak.

KETUA RAPAT:

Salah, itu wilayah Anda. Itu asetnya Inhutani punya dulu. Dikerja samakan sama swasta, yang terjadi konflik pertama kali. Nanti Pak Darori bisa menjelaskan. Karena setahu saya itu tadinya milik PT. Inhutani, kerja sama, sama swasta, berubah jadi namanya Silva Inhutani. Di situlah terjadi penjarahan oleh masyarakat. Masyarakatnya itu sebagian besar masyarakat yang harus keluar dari kawasan Gunung Balak Lampung Timur. Mereka berpindah ke sana.

Jadi kalau saudara Dirut mengatakan itu bukan wilayah Anda, Anda salah. Itu dulu miliki Inhutani. Karena saya sangat tahu sekali. Sampai hari ini pun konflik terus terjadi. Setiap tahun pasti ada yang mati. Bukan meninggal, mati, karena saling bunuh. Coba perhatikan, kalau Anda setiap tahun pasti ada yang mati. Karena sejarahnya bagaimana? Itu kan saling menyerobot.

Ada juga mohon maaf, oknum kepala desa. Kamu beli tanah saya sini 2 juta, 3 juta 1 hektar jual. Ada juga oknum-oknum yang enggak jelas menjual. Kalau Anda tadi mengatakan Mesuji bukan wilayah Anda, Anda salah. Tadinya milik Inhutani. Kerja sama, sama Silva. Jadinya Silva Inhutani. Kemudian dilusi sampai Inhutani tidak punya saham satu titik pun, ya?

Jadi saya juga mau akan datang, *clear* kan yang tadi ini, yang lahan-lahan masih di luar, masih dikelola masyarakat, bagaimana pengakuannya? Tadi di sini saya juga baca, penjualan sonokeling ya? Ini sonokeling bukan dijual ini, dicuri oleh penjahat di sana. Terutama dari Kabupaten Pesawaran itu. Makanya saya sudah pesan sama Kapolda kemarin jumpa waktu akhir minggu lalu, tangkap saja saya bilang jangan dilepasin. Jadi saya minta tolong ini aset Pemerintah, ini aset Anda, bukan aset kami. Tolong, segera dibenahi. Ya Pak Dirut ya? Iya silakan lanjut.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI V:

Terima kasih Bapak atas koreksinya juga.

Kemudian selanjutnya kami izin lanjutkan terkait dengan rencana pengembangan ke depan. Jadi intinya rencana pengembangan ke depan ini kami akan meningkatkan jumlah dari pada KTA yang tadinya hanya 45 menjadi lebih banyak lagi. Dan ke depan Bapak-Ibu sekalian, kami ada rencana untuk pembangunan industri pabrik pangan, tetapi ini rencana ke depan kami. Lanjut.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Bahwa dengan keterbatasan PT. Inhutani yang hanya 15% dari lahan yang izin yang ada, kami melakukan diversifikasi usaha. Jadi dalam hal ini induk Pak, Perum Perhutani itu memberikan kesempatan kepada anak perusahaan untuk mencari atau menciptakan peluang. Nah ini peluang yang kami ambil Pak, satu, dua, tiga, empat, lima. Apa peluangnya? Pertama adalah trading kayu. Jadi Perhutani membuka pintu

untuk ke sana sehingga kami bisa masuk Pak, trading kayu. Kemudian keagenan gambrosin.

Kemudian kami juga masuk di angkutan gambrosin yang oleh Perhutani itu diberikan kepada kami. Kemudian *ecotourism* Pak, kami juga masuk. Karena kami merasa bahwa *ecotourism* ini merupakan, sekarang sedang *in*, sehingga kami juga masuk. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah lahannya Perhutani Pak. Jadi kami di sini kolaborasi. Kami melakukan pengkayaan atau *enrichment* dari wahana itu saja. Kalau lahannya adalah lahan Perhutani. Sistemnya bagi hasil Pak. Kemudian yang kelima adalah produsen briket serbuk kayu. Kami merencanakan untuk mensupply briket serbuk kayu Pak.

Nah untuk yang kedua, sinergi antar BUMN. Jadi kami juga melakukan koordinasi dengan PT. Timah di Bangka Belitung untuk mendapatkan proyek rehabilitasi lahan. Kemudian juga di Bukit Asam kami juga menghadap kepada direksinya Pak untuk minta proyek. *Alhamdulillah* kami sudah dapat, hanya memang belum *deal* untuk yang nomor 2 ini Pak yang Bukit Asam ini. Tapi MoU sudah kami buat, sudah kami rapatkan. Mudah-mudahan minggu depan Pak kami dapat. Kami mohon doanya Bapak-Ibu sekalian karena dari inilah kami bisa hidup dan bisa meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus *profit*. Lanjut.

Bapak-Ibu sekalian,

Ini kinerja keuangan PT. Inhutani V. Kalau kita lihat di tahun 2015, 2016 sampai dengan sekarang intinya dari laba ini kami positif hanya di tahun 2018 Pak kami negatif 1,5 tapi di 2019 kami bisa naik dan *Inshaallah* Pak akhir tahun nanti RKAP tercapai Pak. Ini pendapatan tercapai, laba mudah-mudahan tercapai dan yang bawah itu kan 8 ini kan masih sementara Bapak, nanti sampai dengan Desember *Inshaallah* bisa 9 atau 10. Itu mengenai kinerjanya. Lanjut.

Nah ini hanya keuntungan, manfaat dari pada para pihak Pak. Kami mencoba memetakan bagi masyarakat seperti apa, Pemerintah daerah seperti apa, perusahaan seperti apa, ekosistem seperti apa. Jadi bagi masyarakat ini membuka lapangan kerja permanen, memberi kesempatan perusahaan, kepastian berinvestasi dan memberi kesempatan masyarakat dalam mengelola hutan baik untuk Pemerintah Daerah juga ada dukungan program, peningkatan PAD, meningkatkan penerimaan dana bagi PSDH, pembayaran PBB, pajak untuk perusahaan jelas kami memperoleh pemasukan dana bagi perusahaan, penyelamatan dan kepastian areal kerja, kemudian penyelamatan supaya perusahaan kami bisa *going concern* atau terus berlanjut. Yang terakhir adalah yang paling penting ini adalah yang diibankan kepada kami dimana di dalam P12 kami diminta untuk membuat Hutan Tanaman Industri, menjaga ekosistem supaya ekosistem hutan ini terbentuk.

Itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf Bapak apa bila ada yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirut, pesan saya kenapa enggak ambil terobosan misalnya yang lahan saat ini dikuasai oleh masyarakat, toh dia juga enggak punya hak, enggak punya surat. Kenapa enggak *bargaining*? Saya kasih Anda pakai 10 tahun, setelah itu

harus kembali ke perusahaan, Anda harus keluar. Atau cari jalan apa yang terbaik agar aset negara jangan hilang.

Jadi kalau mereka selamanya nanti, karena saya yakin, saya tahu oper tangan itu sudah biasa. Kamu garap saja, bayar saya sekian. Nanti mereka selalu begitu-begitu. Kenapa enggak dibuat perjanjian? Saya kasih kamu pakai 10 tahun atau berapa tahun, setelah itu kamu keluar. Ini hak milik kami, hak milik negara. Itu salah satu terobosan. Jadi kalau kita kasih pakai terus, besok bapaknya mau meninggal, beralih ke orang lain, orang lain mengelola lagi, iya sampai kapan pun masalahnya enggak bakal selesai, begitu.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan tanggapannya sesuai,

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Interupsi Pimpinan, boleh?

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, sekalian nanya.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Tidak, interupsi saja bukan tanya.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Terima kasih. Jadi kan paparan sudah dijelaskan tadi kan semuanya dari I sampai V juga. Mengingat juga sudah jam 1, waktunya juga Ishoma untuk ibadah dan juga makan siang, bagaimana kalau diskors dulu kemudian baru nanti dilanjutkan dengan pertanyaan dan mungkin jawaban agar bisa lebih enak. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya lanjutkan ya. Setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 menit. Jadi kalau satu menit lebih bagus. Kalau tiga menit agak kurang lumayan. Jadi sementara kita skors, jam 13.30 kita balik lagi. Saya mohon kepada anggota maupun mitra tepat waktu. Kita skors dulu.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB)

KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Sebagaimana tadi kita skors rapat hari ini saya buka kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 13.30 WIB)

Ketua yang baik hati.

Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Ada 10 surat cinta yang saya terima. Kalau 10 dikali 3 menit sebagaimana Tatib berarti 30 menit. 30 menit nanti dijawab. Berarti kita selesai *Insyallah* jam 15.00 WIB. Kami persilakan Pak Suhardi Duka untuk menyampaikan maksimal 3 menit. Izinkan kalau saya tegur.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.
Saudara-saudara para Direktur Perum Perhutani dan Inhutani yang saya hormati.**

Yang saya tahunya sejak dulu Inhutani ini adalah broker. Dia hanya menguasai lahan HPH tapi tidak ada satu pun sensor yang saya lihat ada di kantornya. Yang mengerjakan HPH nya adalah pihak ke tiga. Pihak ke tiga mengerjakan, ambil kayu loks nya kemudian dia jual. Inhutani dapat fee. Kalau begini semua saya kira semua orang bisa. Kita dapat izin, kemudian kita kasih kepada, kita jual kepada perusahaan atau pengusaha. Itu dulu, ya? Waktu saya masih bupati. Saya tidak tahu sekarang apa masih begitu atau tidak? Dan saya yakin mungkin masih begitu sebagian.

Saat ini saya ingin sorot juga adalah LMDH, kerja sama dengan LMDH yang Inhutani mendapatkan *profit* 15-25% sebagai *share* dari rakyat kepada, yang dipungut dari rakyat. Yang saya ingin tanyakan, apa perannya Inhutani sehingga ambil penghasilan dari masyarakat itu sekitar 15-25%? Apakah Bapak yang menyediakan bibit dan lain sebagainya, atau kah hanya karena ia berada di hutan alam masyarakat bertanam kopi atau apa pun kemudian Anda mengambil bagi hasilnya dari rakyat. Itu kalau yang seperti itu Tuhan menyiapkan, enggak ada jasanya Bapak kalau hutan dari alam. Kecuali kalau di hutan tanaman industri ya mungkin saja. Atau Bapak kasih bibit dia, kemudian Anda mengambil *sharenya*, itu wajar. Tapi kalau di hutan alam, saya merasa Bapak tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Hanya enak nya saja yang diambil. Sedangkan mereka adalah orang miskin. Justru harus dilindungi. Tapi justru diambil *sharenya*, pendapatannya sekitar 25%. Yang kedua.

Yang ketiga adalah berapa dana yang dikelola? Tadi sebagian sudah disampaikan tiga sekian, pendapatannya sekian. Ada juga yang rugi. Saya kira perlu kajian secara mendalam tentang keuangan. Walaupun kami Komisi IV mungkin tidak berada di situ.

Saya ingin juga menyoroti sedikit mengenai kayu putih, minyak kayu putih. yang saya lihat ini punya pendapatan yang cukup baik dibandingkan dengan sawit tadi ya? Di Sulawesi Barat hutannya itu 60% masih hutan dari wilayahnya. Dan juga ada Inhutani di sana, enggak tahu ini Inhutani berapa. Apa 1, 2, 3, 4, 5 saya enggak tahu.

KETUA RAPAT:

Pak, tolong dijelaskan di mana Pak tadi Bapak bilang Inhutani mana?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sulawesi Barat. Berada di Mamuju.

Dibanding dengan minyak, bukan minyak. Yang sekarang dikerjakan oleh masyarakat itu, bukan minyak kayu putih, ada minyak lain satu lagi. Iya saya lihat lebih bagus bawa ke minyak kayu putih. Tingkat produktivitasnya per hektar itu lebih baik ketimbang dengan yang lainnya. Saya juga ingin belajar mengenai minyak kayu putih ini. Di Mamuju ada pelet, ada pabriknya. Tapi manajemennya yang kurang bagus. Palet, palet.

KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pelet di Banyuwangi beda.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Iya kalau pelet lagi lebih bahaya lagi karena ilmu-ilmu lain.

Yang terakhir adalah isu-isu yang disampaikan tadi batas hutan. Batas hutan ini selalu berhadapan dengan masyarakat. Satu sisi mengatakan bahwa ini bukan batasan hutan, tapi Inhutani yang memiliki HPH atau kawasan hutan itu mengatakan bahwa ini kawasan hutan. Saya kira saya juga *support* kalau ini nanti akan menjadi satu kegiatan khusus untuk menyelesaikan batas-batas hutan yang ada di Indonesia. Bukan hanya kepentingan Inhutani atau Perum Perhutani, tapi kepentingan Indonesia untuk menyelesaikan batas-batas hutan.

Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan terakhir, kalau Inhutani tidak punya lahan tadi ada Inhutani IV ya? Banyak lahan yang terbakar kemarin, ambil saja itu. Dari pada dikasih ke pihak swasta? Lebih baik ambil itu kemudian tanami kayu, tanam kayu putih tadi itu, ya? Itu lebih praktis saya kira. Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

drh. Slamet, ustadz.

F-PKS (drh. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Terima kasih Pimpinan yang saya hormati dan
Rekan-rekan anggota Komisi IV yang saya hormati,
Beserta seluruh jajaran mitra Perhutani dan Inhutani.**

Perkenalkan, nama Slamet dari PKS.

Beberapa hal yang ingin saya tanyakan terutama ke Perhutani. Yang pertama nampaknya tadi banyak hal yang menjadi produk atau ini barunya. Pertanyaan saya

apakah memang kor bisnisnya sudah agak bergeser dari dulu kayu yang kena yang saya tahu dulu Perhutani termasuk di daerah saya itu adalah penghasil kayu jati. Dan catatan saya di lapangan itu banyak reboisasi atau lahan-lahan yang memang tidak berhasil untuk kemudian dilakukan penghijauan kembali atau penanaman kembali. Iya ini pengamatan saya baik di tempat saya lahir maupun (suara tidak jelas) jadi seperti itu. Nah program-programnya kaya apa dan evaluasinya kaya apa sehingga memang saya melihat masih tidak berhasil di situ dan saya kaitkan dengan kemudian penghargaan yang didapatkan oleh Perhutani yaitu tadi catatan saya itu inovasi terbaik ya dari mendapatkan anugerah inovasi terbaik. Nah saya ingin tahu inovasi yang mana sehingga menjadi, mendapatkan penghargaan? Karena kalau di lapangan saya lihat Perhutani di tingkat KPH juga tidak secara dari luar tidak ada perkembangan yang luar biasa. Itu yang pertama.

Kemudian yang ingin saya, iya tadi catatan itu mendapatkan penghargaan inovasi teknologi terbaik. Itu inovasinya di mana? Ini saya ingin mendapatkan gambaran itu sehingga nanti kita kaitkan dengan kehidupan Perhutani yang dari bawah. Saya juga ingin mendapatkan gambaran dari tadi di catatan di Dapil saya, saya dari Dapil Jawa Barat, Sukabumi, di KPH Sukabumi. Itu ada potensi untuk kegiatan pungutan DKP sekitar 131 milyar. Potensinya begitu kalau enggak salah Pak di Dapil saya. Kemudian dari kegiatan angkutan juga 32 jutaan. Estimasi cara menghitungnya potensi itu dari mana? Terus kemudian juga titik-titiknya untuk potensi pendapatan itu di KPH Sukabumi daerah mana Pak? Nanti kita akan juga ketahuan di titik mana.

Terus kita juga ini ada titipan dari Dapil terkait dengan LMDH. Jadi LMDH ini sekarang yang terjadi di masyarakat itu masyarakat yang memang betul-betul petani banyak yang tidak tahu. Jadi dan penggarap ini rata-rata mereka yang asli atau aktif di LSM-LSM tertentu sehingga mereka yang memang “menguasai” dari LMDH ini. Sehingga saya ingin tahu gambaran proses sosialisasi dan perekrutannya kaya apa sehingga ini cukup penting untuk keluhan masyarakat itu adalah sangat susah masyarakat biasa untuk mengakses menjadi LMDH. Itu yang pertama.

Yang kedua, untuk membentuk kelompok, kan itu kelompok. Dia untuk membentuk kelompok versi masyarakat ini sangat susah Pak sehingga saya perlu tahun nanti informasi ini yang akan saya bawa paling ke Dapil, saya sosialisasikan, kebetulan kita juga mau reses, sehingga masyarakat yang semestinya memang berhak untuk kemudian penggarap itu mendapatkan haknya. Dan terakhir terkait dengan titik konflik. Jawa Barat itu ada 12 kasus titik konflik. Saya ingin mendapatkan gambaran titik konfliknya 12 itu di mana? Sengketa lahan ya? Dan *follow up* nya sudah sampai di mana?

Itu saja Pimpinan yang saya tanyakan. Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Hermanto. Pak doktor silakan Pak. 3 menit Pak ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Enggak bisa lebih Pak ya?

Baik saya mungkin hanya *semenit* saja Pak.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Pimpinan, dan anggota semuanya, bersama Direktur dari Perhutani dan Inhutani.

Saya hanya ingin menyampaikan bahwa BUMN ini adalah pengemban amanat konstitusi. Dia bukan hanya pelaksana Undang-Undang, tapi dia juga mengemban amanat konstitusi yang oleh karena itu saya ingatkan supaya dalam hal mengelola sumber daya perhutanan ini betul-betul dikelola secara profesional tapi dia harus juga memperhatikan kepentingan masyarakat, karena amanat Undang-Undang nya di situ, iya kan? Yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Nah oleh karena itu karena ini sumber dananya juga dari negara, saya pikir dana ini betul-betul dialokasikan untuk kepentingan dari profesionalitas menghasilkan *return* yang lebih baik yang kalau kita lihat kita cermati, kecenderungan dari *return*nya itu kalau pun dapat untung, untungnya kecil, begitu. Lebih sering mendapatkan ruginya, iya kan? Nah tentu kita ada pertanyaan di sini, mengapa ini bisa terjadi? Padahal kan dana ini kan *cost of capital*nya hampir dikatakan nol lah, begitu, iya kan? Jadi tidak ada beban untuk mengembalikan dananya, begitu. Jadi ini jangan dianggap ini sebagai dana yang mudah lalu kita mengelolanya asal-asalan, begitu. Nah jadi dalam hal ini saya menyampaikan bahwa kita harus pegang ini amanat konstitusinya. Jadi untuk kepentingan masyarakatnya.

Nah kemudian yang kedua, kehadiran baik Perhutani maupun Inhutani ini karena dia berada di satu kawasan yang sering terjadi konflik dengan masyarakat di sekitar. Nah ini juga menjadi catatan kami bahwa ada program perhutanan sosial itu juga kadang-kadang menyentuh lahan baik Perhutani maupun Inhutani. Nah ini betul-betul di dalam hal bersentuhan dengan lahan masyarakat mungkin ini harus ada pendekatan yang bersifat *soft* lah, begitu ya.

Artinya masyarakat juga di sana kan mencari kehidupan dan masyarakat juga di sana hidup turun menurun. Nah penghasilan kehidupan mereka, penghasilan untuk membiayai kehidupan mereka kan dari sana. Nah ini pun juga jangan serta merta ini adalah lahan Perhutani, ini adalah lahan Inhutani lalu mengambil tindakan tidak proporsional. Jadi memang pendekatannya harus *soft* dan proporsional sehingga masyarakat di sekitar itu pun juga hidup tumbuh berkembang. Tapi kalau memang masyarakatnya itu jelas-jelas melakukan pelanggaran, kami pun juga memberikan apresiasi kepada perusahaan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan tegas.

Nah jadi Pak Ketua, jadi saya minta harus ada mempertimbangkan *social benefit*nya. Nah ini yang penting buat kami. Ada *social benefit*nya supaya juga kalau misalnya *social benefit*nya itu perlu dilihat oleh anggota sebagai suatu wujud, saya pikir enggak ada masalah, iya kan? Perusahaan mengundang anggota untuk mengatakan, loh ini saya ini ada program ini untuk masyarakat ini, masyarakat ini. Sehingga anggota itu juga tahu, iya kan? Terutama anggota yang berada di Dapilnya itu. Itu perlu diberi tahu supaya kita juga bisa melihat secara fakta dan nyata.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak H. Sutrisno.

F-PDIP (H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Pimpinan. Langsung saja karena dikasih waktu 3 menit.

Kepada saudara Dirut Perhutani dan para Dirut Inhutani. Saudara mendapat tugas tanggung jawab dari negara untuk mengelola badan usaha, mengelola kegiatan perhutanan. Yaitu segala aktivitas yang tertautan dengan hutan, dengan wilayah hutan, dengan hasil hutan yang harus dikelola secara proporsional. Karena pengelolaan keuangan saudara terpisah dari APBN. Artinya apa? Saudara harus bisa menghasilkan hasil untuk membiayai organisasi. Saudara harus bisa memberikan sumbangsih pada keuangan negara. Saudara harus bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat.

Dari semua yang disampaikan kok kenapa waktu yang begitu sangat luar biasa bermanfaat, tidak menyampaikan bagaimana perjalanan perusahaan? Apa yang dihadapi? Bagaimana konsepnya ke depan agar usaha saudara itu bisa maju? Yang rugi bisa untung. Yang terjadi hanya memperebutkan lahan. Lahannya kurang-lahannya kurang. Tapi ternyata aktivitas usahanya di luar yang ditugaskan. Apa itu? EMKL itu tadi saya lihat, jadi kontraktor. Padahal kan suruh mengelola hutan, mengelola wilayah hutan, mengolah hasil hutan. Kok jadi kontraktor? Nah ini kan menyimpang dari aturan.

Oleh karena itu yang terbaik saudara sampaikan itu, apa yang saudara jalankan, apa masalahnya, sehingga kita bisa bantu. Karena saudara sangat terikat dengan kementerian yang membidangi saudara. Kita bisa bantu dengan komisi-komisi yang lainnya, ya?

Oke yang kedua, khusus kepada Perhutani. 2016 rugi 350 milyar. 2018 untung 600 milyar. Luar biasa dalam kurun waktu dua tahun bisa untung. Pertanyaan saya, kor bisnis saudara masih tetap seperti kor bisnis yang lama. Andalan utamanya adalah jati yang usianya lama, begitu? Yang kedua adalah gondorukem sama terpentin. Yang lain-lainnya masih di bawah 5%. Pertanyaan saya, dari sisi yang mana saudara bisa untung itu? Jangan-jangan ini KSO, penggunaan lahan pertambangan lewat sumber itunya? Kalau itu yang terjadi, bukan dari kor utama, ke depan akan terjadi lagi kerugian.

Yang ketiga, sebagai badan usaha yang harus mencari keuntungan, sudah menjadi keharusan dari kor bisnis saudara itu yang mana yang akan memberikan peluang? Kita semua tahu teman kita *ngobrol* bukan lagi rokok. Teman kita *ngobrol* adalah kopi. Kopi sangat diminati, pasarnya sangat luar biasa. Kenapa tidak menjadikan hal yang utama itu? Yang kedua, kenapa kayu putih tidak menjadi yang utama? Khusus, kalau itu bisa dilakukan, saudara bisa bantu meningkatkan devisa negara, mengurangi devisa kita. Karena sekarang masih impor, impor kayu putih kayanya tadi. Nah ini yang begini-begini harus bisa Anda jalankan.

Yang ke empat, tentang Biomassa. Konsepnya bagus, kita semua pasti mendukung karena salah satu tugas negara untuk memecah rumah kaca. Tapi Pimpinan, saya usul jangan nanti terjadi kayak pengembangan jarak, karena konsepnya tidak diprogram dengan baik. Usul saya adalah dalami dulu secara khusus program ini, baru bisa dijalankan. Baru kemudian juga rakyat menjadi rugi.

Yang terakhir, hutan sosial. Saya dari Dapil IX Majalengka, Subang, Sumedang. Wilayah eks Perhutani yang dikelola oleh pabrik gula itu terjadi konflik bertahun-tahun. Kemarin sudah ada korban. Korban pembakaran alat transportasi,

korban pembacokan. Pertanyaan saya adalah mohon penjelasan itu bahwa tanah yang diperebutkan oleh para petani yang di belakangnya itu adalah LSM 4000 hektar itu, apakah tanah yang sudah sepenuhnya diberikan HGU nya kepada pabrik gula? Atau masih bagian dari pada Perhutani? Saya usul kepada Pimpinan karena ini sudah belarut-larut, konfliknya tidak akan bisa selesai karena di kedua belah pihak ada yang *nggandolin*, begitu ya. Jadi kita mesti turun ke sana. Jangan terjadi kayak di Kalimantan Barat.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Sutrisno, nanti kita atur pada Januari atau Februari kunjungan spesifik tapi jangan hanya satu tempat, waktunya dan ongkosnya kan sayang. Apa pun permintaan Bapak, saya ikutin Pak.

KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pak Abdullah Tuasikal, Maluku.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati ketua dan anggota Komisi IV,
Saudara Dirut Perhutani dan para Dirut Inhutani yang terhormat.**

Saya lihat penampilan yang ditampilkan sangat cukup menarik. Di sini di Papua, Papua ini ada potensi sugu dan ini semestinya masuk kewenangan dari Perhutani. Lahan sugu di Indonesia itu ada kurang lebih 1250 juta hektar. 1200 ada di Papua dan 50.000 itu ada di Maluku. Karena potensi itu, maka Menteri BUMN telah mengeluarkan satu surat untuk kewenangannya diberikan kepada Perhutani itu No. E90 MBU 2012 pada tanggal 29 Februari 2012 tentang pembangunan pabrik di Papua. Dan pembangunan pabrik di Papua ini sudah dilaksanakan sekitar tahun 2013 dan tahun 2015 sudah diresmikan oleh Pak Presiden.

Iya kira-kira ini Direktur Utama Perhutani ikuti atau tidak?. Dana yang sudah dikeluarkan mungkin sudah di atas 150 milyar. Iya ada data lain juga di atas 280 sekian milyar, iya nanti dikoreksi. Dengan kontribusi dan menargetkan itu keuntungan sekitar 100 milyar per tahun. Iya data ini kami ambil karena apa pun juga di penampilan tabel ini ada potensi lahan sugu itu ada sekitar 100, iya ada di sini ya? Ini juga sampai dikesampingkan lalu enggak tahu kalau ada penampilan, ya? Ada kurang lebih sekitar 16.055 hektar. Iya mungkin dari Perhutani ya ada data itu ada? Jangan sampai tidak ada.

Selanjutnya, untuk kegiatan ini itu akan diperkirakan mempekerjakan sekitar 400-600 orang. Kalau di tabel ini saya enggak tahu ini 400 ribu atau berapa. Tapi data yang kami dapat itu 400-600 orang. Dalam kegiatan itu Perhutani akan membeli batang sugu seharga 9000 per tual. Tual ini artinya 1m. Kegiatan ini sudah, karena sudah diresmikan tahun 2015, apa ini sudah jalan apakah dilaksanakan oleh

Perhutani, atau Inhutani? Karena di dalam tabel, di dalam keterangannya ada itu tidak memunculkan itu, padahal program ini ada.

Mengacu pada data yang ditampilkan pada halaman 3, saya kira Perhutani Grup, Grup Perhutani memiliki pabrik dan daya hutan sagu di Papua dengan luas 16.055 hektar. Namun dalam topik pembahasan tidak diberikan ulasan terkait dengan pencapaian pelaksanaan peran instruksi sagu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Padahal kalau kita tahu bahwa konsumsi itu sekitar 355 ton/ tahun. Diperkirakan sagu per kapita per tahun per orang itu sekitar (suara tidak jelas). Kalau kita bicara soal karet, bicara yang lain-lain, tingkat pemberdayaan masyarakat saya kira tidak terlalu nyata. Tapi kalau sagu itu jelas. sagu itu ada di hutan dan sagu juga sudah dibudidayakan. Kira-kira berapa ratus atau berapa ribu orang dipekerjakan? Dan keuntungan juga jelas.

Untuk itu saya minta penjelasan dari Perhutani atau ada yang sudah diberikan kewenangan tentang pelaksanaan operasional dari pabrik sagu yang sudah terbangun di Papua dan Papua Barat. Saya kira itu mungkin yang terakhir. Saya kira Perhutani, Inhutani ini sudah minimal harus verifikasi kembali soal data. Kalau bicara soal minyak kayu putih sebenarnya minyak kayu putih aslinya itu ada di Buru. Kalau tahu Pulau Buru itu berarti tahu minyak kayu putih. Tapi kalau bicara bambu dengan lain-lain itu namanya Pulau Serang, itu 3 kali Pulau Bali. Wilayah itu potensi bambu dan lain-lain. Jadi saya kira saya lihat yang ada ini kayanya Inhutani, Perhutani itu Papua tidak ada, NTT tidak ada, Maluku tidak ada. Padahal potensi itu ada juga di sana, ya? Saya kira ini juga harus ada keadilan karena bambu juga masyarakat harus diberdayakan, masyarakat juga harus disejahterakan.

Saya kira sementara. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ansy Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.

Langsung saja kepada pihak Perhutani dan Inhutani. Yang pertama saya mau bicara soal agroforestri berbasis kopi. Kita tahu bahwa tujuan ini antara lain adalah untuk melakukan transformasi dari sistem pertanian yang sifatnya konvensional menjadi lebih modern, begitu. Dan dari penjelasan di draf atau pun naskah yang disampaikan, tampaknya ketika agroforestri di bidang kopi ini dilakukan sudah membawa dampak satu baik dampak ekonomis, dampak ekologis dan juga dampak sosial. Buktinya iya ada konservasi lahan, ada konservasi air, keanekaragaman hayati juga lebih terjamin, penambahan unsur hara dan sebagainya dan seterusnya.

Tetapi ketika kita perhatikan Pak, setidaknya saya mencatat ada beberapa persoalan terkait dengan agroforestri yang berbasis kopi ini. yang pertama, tingkat pengetahuan dari para petani soal budi daya agroforestri yang berbasis kopi ini tampaknya masih minim Pak karena bagaimanapun juga ini harus diakui bahwa petani kita juga banyak masih yang bersifat tradisional. Yang kedua soal permodalan dalam usaha Pak. Kita tahu bahwa ini juga sangat dibutuhkan untuk menggerakkan usaha mereka. Yang berikut juga soal penggunaan teknologi dalam pengolahan kopi dan yang tidak kalah penting ini adalah pasar. Ke mana produk kopi ini akan dijual?

Yang kedua, pertanyaan saya adalah saya ingin tahu apakah ada rencana untuk melakukan ekstensifikasi terkait dengan ekspansi atau pun perluasan dari baik Perhutani maupun Inhutani. Karena kesan saya Pak, pengembangan kawasan hutan untuk produksi masyarakat ini di wilayah Indonesia Timur ini agak minim Pak.

Saya mau cerita sedikit kalau bicara kopi Pak. Saya berani adu kopi robusta dari Nusa Tenggara Timur itu baik dari Kopi Manggarai, Kopi Bajawa, Kopi Eban itu luar biasa Pak. Nah kenapa ini belum masuk dalam radar atau pun juga pertimbangan dari perusahaan-perusahaan Bapak? Saya juga ingin tahu ini soal data Pak. Bagaimana Bapak-bapak melihat potensi komoditas unggulan dari setiap provinsi ini dan kira-kira bagaimana Bapak-bapak ini memetakan potensi pasar kalau seandainya bisa dikembangkan Pak.

Yang berikutnya, saya mau secara spesifik itu omong ketika kita bicara tentang konteks Nusa Tenggara Timur Pak, kebetulan saya ini dari NTT. Pertanyaan saya apa mungkin Pak, misalnya Perhutani atau Inhutani itu menggunakan lahan negara di NTT untuk kembali membuat hutan kayu cendana di Timor, NTT Pak? Kenapa? Cendana ini punya nilai ekonomis yang sangat tinggi Pak, permintaannya juga sangat besar Pak. tetapi hari-hari ini sudah hampir punah Pak.

Nah saya berharap mungkin negara bisa berpikir serius untuk mengembalikan jati diri Pulau Timor di NTT ini sebagai ekosistem pulau penghasil cendana Pak. Nah manfaatnya sebenarnya banyak secara ekonomis. Masyarakat juga bisa dilibatkan ya dalam hal pembibitan, pemeliharaan cendana Pak. Walau pun mungkin butuh waktu yang agak panjang, 40 tahun Pak, tetapi ini sebuah komoditas unggulan. Mungkin perlu kita berpikir dalam sebuah narasi yang besar Pak, perlu ada riset yang serius sehingga kemudian produk ini tidak punah Pak. Jangan sampai nanti generasi berikut hanya tahu cendana itu adanya di Jala Cendana di Menteng Pak. Padahal nama itu cendana itu jelas berasal dari kampung saya yang hari ini sudah hampir punah Pak.

Nah ini beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. yang pertama tadi adalah soal terkait dengan agroforestri berbasis kopi, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua apakah ada rencana ekstensifikasi, ekspansi ke Timur Indonesia? Yang ketiga secara khusus soal cendana. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Luluk Hamidah. 3 menit ya maksimal.

F-PKB (LULUK HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Iya terima kasih.

Yang pertama ini terkait dengan kopi Bapak, jadi langsung kan mengurangi 3 menit. Suatu ketika saya pernah ke Swedia Bapak, dibawalah ke taman konservasi nasionalnya mereka. Di situ ternyata ada produk-produk pertanian dan di sana ternyata ada tulisannya bahwa itu dibidang dari Hindia-Belanda. Terus saya bilang, ini dari Indonesia. Jadi mereka punya (suara tidak jelas) kopi itu.

Saya hanya membayangkan tadi, bagaimana ini ada negeri yang kemudian memiliki sisa-sisa artefak selayak kopi, dan kemudian bagaimana kekuatan kopi di era-era itu. Tetapi kemudian dari penjelasannya Bapak ternyata kopi itu bukan suatu komoditas unggulan selain halnya kayu. Ini kan melas sekali, begitu Pak. Sementara dulu kolonial saja ke sini karena cari rempah-rempah, kemudian juga kopi. Dunia juga mengenal kita dari kopi meskipun kemudian bahwa pasar ini lagi-lagi sama, seperti

juga karet itu tidak ditentukan oleh Indonesia. Ini pertanyaan kita justru mengapa itu bisa terjadi? Kan masyarakat tidak tahu soal itu, yang bisa memainkan dan juga punya potensi di level pasar internasional itu kan semestinya perannya negara.

Nah kemudian saya juga punya catatan bagaimana Indonesia juga salah satu negara importir besar kopi. Nah ini kan juga agak aneh. Termasuk kemudian impor dari Vietnam saja itu bisa senilai 30 juta koma sekian USD. Kemudian impor dari Brazil juga sangat besar. Kemudian Timor Leste bahkan kita juga impor 1,4 juta ton. Kemudian dari Malaysia 400 an sekian ton, 400 an ribu. Kemudian Amerika Serikat itu 235.000 ton. Berapa kita kemudian ekspor ke negara-negara ini atau ke negara-negara lain?

Kita ini mungkin enggak sih kemudian dengan programnya apakah yang Tora kemudian perhutanan sosial itu di sisi lain bisa dikembangkan untuk bisa tadi Pak, mengembangkan kopi kita atau kemudian komoditas-komoditas yang lain, di sisi lain untuk memenuhi pangan, tapi juga untuk mewujudkan kedaulatan, juga mengurangi impor dan sebagainya.

Saya justru tertarik untuk menanyakan apakah ada semacam koordinasi, begitu ya, antara Perhutani juga kemudian dengan kementerian dan kemudian menggabungkan antara program Tora nya itu dengan misalnya rencana Bapak yang sebenarnya bagus terkait dengan proyek penanaman Biomassa itu. Karena di Bapak saja itu bilang bahwa ada 3 sasaran kan kalau yang soal Biomassa. Itu ada planet, kemudian ada *profit*, ada *people*.

Nah bagaimana kemudian para penerima program Tora itu bukan hanya sekedar menerima sertifikat yang kesannya itu kemudian lahannya doang, tetapi *what next?* Setelah itu mereka dikasih? Kenapa sampai kemudian ada temuan beberapa hal, beberapa tempat ya bahwa lahan-lahan itu ada yang disewakan, kemudian bahkan ada yang dijual, karena mereka enggak *ngerti* bagaimana mengolahnya. Ada *problem* orang itu butuh lahan karena memang butuh perluasan. Tetapi yang ini justru *kebalik*. Nah ini kalau misalkan ada skema yang memang direncanakan bersama mungkin akan bagus.

Jadi pertanyaan saya itu, apakah memang Perhutani memiliki perencanaan yang terkait bagaimana mengintegrasikan proyek apakah itu penanaman Biomassa, atau pun juga program komoditas unggulan yang lain dengan program Tora. Dan kalau misalnya ada itu skema integrasinya seperti apa, kalau yang tidak itu kenapa tidak?

Saya punya catatan bahwa setidaknya ada manfaatnya ini Pak kalau misalnya menggabungkan antara apakah Biomassa dan komoditas yang lain itu dengan Toranya Pemerintah, bahwa pertama pengembangan ini akan menyerap tenaga kerja masyarakat. Kemudian subjektoral yang bingung tanahnya mau *diapain* itu bisa dijadikan mitra proyek penanaman Biomassa oleh Perhutani. Jadi kalau ini konsepnya lahan mungkin bisa menjadi jawaban. Tadi ada usulan juga sih, bekas yang lahan kebakaran juga bisa dijadikan alternatif untuk pengembangan komoditas ini.

Kemudian Tora juga bisa dicanangkan Pemerintah jadi program yang enggak parsial. Nah Perhutani menjadi bagian dari Pemerintah saya kira. Jadi enggak mungkin kan kemudian Perhutani itu seolah-olah punya *governance* sendiri kemudian kementerian juga sendiri, dan kemudian tidak saling terintegrasi dan tidak harmonis, begitu. Nah ini yang nanti kita akan bingung. Jadi banyak sekali program bagus tapi tumpang tindih itu terjadinya di sini. Padahal subjeknya bisa saja ternyata iya sama, begitu. Subjeknya ya objeknya, tetapi anggarannya berbeda, tapi skema pengorganisasiannya ya dan manajemennya juga berbeda.

Nah saya kira kalau soal manfaatnya banyak. Saya punya catatan, kalau diminta juga saya kasih. Tetapi itu yang paling penting Pak. Jadi punya semacam skema untuk mengintegrasikan itu apa enggak. Terus yang kedua, hari ini enggak ada orang yang enggak butuh kopi. Anak umur di bawah 17 tahun saja nongkrongnya itu tadi persis itu kopi. Dan kalau kemudian *Lifestyle* baru ini diciptakan sedemikian rupa, tapi ternyata bahwa *supply* kopinya itu dari impor. Nah ini yang mengerikan buat saya. Starbucks itu ada di mana-mana. Nah kenapa kemudian tidak dikembangkan satu *research* unggulan kopi yang kemudian punya cita rasa dan punya nilai yang memang lezatnya seperti itu.

Di Timur punya, kemudian kita di Sumatera punya, dan lain-lain punya. Andaikan ini kemudian ada varian baru yang itu *original* karena hasil dari *research* kita dan ini bisa menyaingi kaya Starbucks itu kenapa tidak, begitu? Ini kan pertanyaan orang-orang awan juga Pak. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Krisantus.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Saya pikir masih lama. Terima kasih.

Pimpinan Komisi IV, Direktur Perhutani dan Inhutani yang saya hormati.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.
Adil ka'talino, bacuramin ka'saruga, basengat ka'jubata.

Saya Krisantus Kurniawan dari Kalimantan Barat Pak. Di Kalimantan Barat, kalau Inhutani ada di Kalimantan Barat tentu mengeri salam saya tadi. Jadi BUMN ini Komisi VI. Tapi kalau saya memandang Pak, saya *to the point* saja ngomong. Saya tidak bisa berbelit-belit. Saya memandang masalahnya yang datang ke Komisi IV. Karena apa? Di Kalimantan Barat yang saya tahu Inhutani ini mempersulit diri sendiri dengan tidak memperhatikan persoalan-persoalan sosial. Kemudian juga tidak produktif. Hitungan bisnis apa yang Bapak-bapak lakukan terhadap pengembangan di provinsi Kalimantan Barat?

Salah satu contoh di Nanga Pinoh, Melawi. Arealnya 65.000, efektif lahan 50.000 itu hal yang luar biasa. Tetapi ditanam tidak sampai 1000 dan tadi saya tanya kepada orang Nanga Pinoh, ke mana karet itu dijual? Produksi atau tidak karet yang 900 hektar lebih itu? Jadi ternyata tidak ada Pak. Dan ini saya pikir suatu kegiatan yang harus diperbaiki ke depan. Jangan sampai mempersulit diri sendiri lagi. Belum lagi di daerah lain, Albasia, akasia yang dilakukan penanaman oleh Inhutani dan Perhutani.

Sering kali, mungkin saya mau tanya Pak Dirut, para Dirut ini. Pernah enggak Pak datang ke kebun di Kalimantan Barat? Pernah? Bapak tahu tidak apa yang dilakukan manajer-manajer Bapak di sana? Bapak harus awasi itu. Mereka tidak memperhatikan masyarakat kecil. Saya di luar konteks sedikit karena masalah tenaga kerja, saya. Membuat satu alasan, memutasi karyawan ke daerah yang jauh agar tidak betah sehingga masyarakat setempat mengundurkan diri. Itu kan masalah sosial yang ditimbulkan. Seharusnya gunakan dong masyarakat-masyarakat setempat. Nah ini

yang menjadi sulit bagi Perhutani maupun Inhutani di Kalimantan Barat. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi. Belum lagi menciptakan lahan tidur yang begitu luas. Nah ini Bapak harus cek sebagai direktur saya pikir.

Jadi mungkin bisa diubah sedikit manajemennya Pak, sehingga sangat kita sayangkan seharusnya ini bisa menghasilkan begitu besar pemasukan kepada negara, tetapi karena banyaknya lahan tidur yang tidak produktif, sementara lahan itu tersedia, tetapi tidak Bapak usahakan ini sangat disayangkan. Jadi saran saya itu saja Pak. Bapak cek anak buah Bapak di Kalimantan Barat. Kerjakan yang baik dengan benar atau tidak. Tapi sepengetahuan kami, kami yang di sana, *amburadul* Pak. Asli *amburadul*. Nah ini saja, ini gampang nilainya. Efektif 50, tinggal tanam saja. Tapi dibiarkan, masa nanam 900 hektar. Berarti kan tidak beres manajemennya itu Pak.

Saya pikir begitu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Ustadz Rosihan Johan. Kopiahnya mirip.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Siap Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama, saya mau usul Pimpinan. Coba kita buat festival kopi di DPR. Saya minta Inhutani *concern* di sini sebagai bentuk *concern* kita terhadap pengembangan kopi ini. Fasilitas kami ini membawa kopi masing-masing. Petani kopinya kita bawa. Kalau kak ansy tadi bilang ada Kopi Manggarai, segala macam, di tempat saya di Sumbawa Pak, itu ada Kopi Tepa, ada Kopi Tambora, ada Kopi Batutulang segala macam, itu arabika, robustanya mantap. Makanya kita buat festival kopi di sini Pak Ketua, biar DPR ini di fasilitas oleh Perhutani, ya? Biar jangan kita cerita-cerita saja, kita ini makan kopi, tapi kita harus tunjukkan ke masyarakat bahwa kita ini *concern* kepada kopi. Itu yang pertama.

Yang kedua, di NTB juga sedang dikembangkan kehutanan sosial berbasis agroforestri ini. Bahkan ini adalah program yang dipimpin oleh Pak Gubernur kepada saya untuk disuarakan. Ada yang berbasis kopi di Sumbawa, di Sembalun, di Tambora. Ada juga yang berbasis (suara tidak jelas) yang kemudian disatukan sama sapi. Ini bagus juga hitung-hitungannya Pak. Sayangnya sejak tahun 2000 Pak Pimpinan, Pak Direktur, Perhutani sudah hengkang dari Sumbawa. Tahun 2000 Perhutani keluar dari Sumbawa. Sampai saat ini saya tanya teman-teman apa alasannya juga tidak tahu. Mungkin hanya karena alasan PP itu bahwa Perhutani hanya di Pulau Jawa saja. Tadi di Sulawesi Barat, di Timur di sana itu sudah tidak ada yang mengurus hutan kita Pak.

Iya mungkin Bapak bisa pergi lihat bagaimana kondisi hutan Sumbawa saat ini sejak ditinggal oleh Perhutani. Dulu pada tahun akhir tahun 90an ada program HTI. Nah sekarang lagi panen Pak. Yang panen siapa? Masyarakat. Masyarakat yang panen itu kemudian dibawa, ditangkap oleh tentara, kemudian dijadikan barang bukti, enggak tahu siapa yang jual saya tidak mengerti. Dan rusak hutan saat ini sejak ditinggal sama Perhutani.

Jadi kalau misalnya ada peluang, nanti coba ceritakan kepada kami kenapa hengkang dari Sumbawa, karena asetnya masih banyak Pak. Jatinya saja masih ada satu hutan di daerah Kanar namanya. Tinggal itu aset Perhutani yang berupa pohon. Belum lagi gedung-gedung. Gedungnya sekarang ini lagi disewakan sama KPU, siapa yang pihak sewa menyewa? Kita juga tidak tahu. Bagaimana status aset-aset Perhutani ini? Ini di daerah-daerah yang ditinggalkan seperti ini. Nah hutan yang Bapak tinggalkan dulu itu oleh KPH Ratugulang namanya Pak, itu sudah diuji coba tanaman kayu putih. Sudah panen Pak, sudah ada contoh minyaknya. Cuma namanya juga uji coba dari anggaran dinas, berapa sih? (suara tidak jelas).

Jadi potensi-potensi itu kayu putih, kopi, segala macam itu ada di kita, tetapi kalau kita hanya menyerahkan kepada Pemerintah yang memang *basicnya* bukan bisnis, tapi ditinggalkan oleh Perhutani bahkan tidak ada daerah Inhutani di daerah timur, termasuk daerah saya Sumbawa. Tolong kalau misalnya ada peluang untuk kembali untuk menata hutan di Sumbawa, saya tentu sangat berharap sekali.

Yang berikutnya yang terakhir ini Pimpinan adalah bisnis pengembangan industri di hutan ini,

KETUA RAPAT:

Sebentar, ada penegasan. Tadi kok yang enggak ditangkap oleh tentara rakyat. Ditangkap tentara atau polisi?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Iya sejenis itu lah Pak Ketua.

Sudah, sudah, yang terakhir ya. Di hutan ini kita bukan hanya menanam kayu, bisa banyak dikembangkan, banyak Pokdarwis-Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata itu banyak di sekitar hutan saat ini. Di kampung saya tidak ada penjaganya saja Pak, banyak air-air terjun yang cukup bagus dan dikelola dan itu bisa kita mendapatkan jasa lingkungan, jasa-jasa segala macam lah di situ. Bisa dikembangkan.

Nah saya berharap supaya Perhutani juga, terutama di Jawa ini kan banyak Pak. Banyak potensi-potensi hutan kita, banyak air terjun, air mengalir segala macam itu bisa dikembangkan. Jadi hanya industri tanaman segala macam. Itu banyak potensi lekuk hutan, kontur hutan itu menarik kalau kemudian dikembangkan sebagai arena wisata. Wisata sekarang ini masyarakat dengan Medsos ini butuh konten Pak. Nah mengembangkan wisata di hutan tentu sekaligus kita menjaga hutan dengan banyaknya Medsos. Karena ini kita ada sedikit saja itu ada kerusakan hutan itu bisa difoto sama orang, kemudian diviralkan, kemudian ramai-ramai kita ribut untuk menjaganya.

Jadi sekali lagi saya berharap ada pengembangan juga, pengembangan industri wisata di dalam hutan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mbah Tarom.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IV dan Para Direktur,
Direktur Utama Perhutani,
Direktur Utama Inhutani.**

Langsung saja, kalau kita simak dari paparan Dirut Perhutani dan para Direktur Inhutani, ini sangat bagus sekali dan dari sisi pengembangan bagus, sisi produksi bagus, *profit* juga bagus, kemudian semuanya juga laba. Cuma berbicara *outcomenya* ini tidak terukur. Maka bagaimana ini benar-benar ada *input* ada *output*, *outcomenya* juga jelas.

Kemudian melihat yang disampaikan oleh Bapak-bapak, ini benar-benar seperti itu atau bagaimana? Karena saya melihatnya bahwa lembaga ini kan lembaga yang dilepas begitu saja oleh Pemerintah, tidak mendapatkan anggaran dari APBN, cuma harus untung. Makanya tadi disampaikan semuanya untung-untung mudah-mudahan untung benar.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak, sebentar. Perhutani pernah dapat PMN enggak? Belum pernah?

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Sebenarnya, kita-kita ini di Komisi IV maunya *support* kepada bapak, tapi laporan Bapak sudah manis-manis semuanya, maka ya ini kita mencari sisi yang lain. Karena di Jawa ini yang ada adalah Perhutani, maka saya akan bicara Perhutani bagaimana optimalisasi kerja sama antara Perhutani dengan masyarakat dan ini di wilayah kami, Madiun dan sekitarnya ini sudah lumayan bagus, hutan terjaga karena masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan bahwa tegakan yaitu untuk tanaman yang sangat *simple*, tidak merepotkan dan komoditi diekspor yaitu Porang. Nah di sisi lain, bagaimana ini ada optimalisasi terkait dengan pemahaman-pemahaman masyarakat?

Mungkin nanti ada ruang lah bagaimana Bapak menganggarkan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan hutan secara optimal bekerja sama dengan kita-kita ini. Jadi iya paling tidak kalau DPR RI ini Dapil, disediakan media untuk berinteraksi dengan masyarakat ini setidaknya-itidaknya itulah meskipun tidak ada yang konkret yang lain. Sebenarnya kita juga menghindari yang konkret yang lain, tapi paling tidak *disediani* media sudah lumayan lah, begitu. Karena kita ini kalau sudah pulang ke daerah Pak, mesti ditanya oleh konstituen. Nah kita ini kelihatannya Komisi IV ini kok kering kerontang. Ini mudah-mudahan nanti tidak seperti itu adanya lah. Ini saya inginnya konkret, begitu saja Pak Ketua, mohon maaf.

Selanjutnya terkait dengan kemarin *social forestry* ya yang sertifikat 2 hektar sekian dengan kurun waktu 35 tahun Pak? Itu harapan saya ada evaluasi, itu benar-benar dimanfaatkan secara bagus apa ujung-ujungnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua komisi tadi pindah tangan-pindah tangan-pindah tangan. Nah ini mohon ada evaluasi. Kalau memang tidak dimanfaatkan secara baik ya lebih baik dicabut, diberikan kepada warga masyarakat yang lain yang notabene yang tergabung dalam LMDH atau organisasi lain yang ada di lingkungan Perhutani.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yessy Melinia. Milenial. Melania.

F-NasDem (YESSY MELANIA, S.E.):

Baik terima kasih Pimpinan, izin Yessy Melania.

Oke baik, mungkin saya langsung saja ke Dirut Inhutani III yang tadi membidangi Kalimantan Barat. Tadi sudah disampaikan oleh saudara saya, abang saya Pak Krisantus, sama. Dan kebetulan saya memang asli dari Kabupaten Melawi dari Nara Pinoh Pak di mana tempat ini yang menjadi polemik di sana. Jadi kalau tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa angin segar yang manis-manis tapi tidak terjadi dengan Kabupaten Melawi. Yang ada justru pada saat ini meninggalkan banyak masalah. Belum lagi masalah yang terlantar, karet kemudian sengon, akasia, pinus dan segala macam ini tidak terurus sama sekali.

Jadi setelah disemai, ditanam, ditinggalkan begitu saja. Tidak pernah dilirik, tidak pernah dikunjungi lagi, tidak pernah diawasi. Nah ini kan menjadi masalah. Dan status lahannya juga begitu besar Pak, hampir 65.000an hektar. Kita bayangkan saja sekelas Kabupaten Melawi yang masih kecil notabene nya dan ini merupakan kabupaten pemekaran dari sintang itu sempit. Masih butuh banyak segala pembangunan yang harus kita kerjakan, harus kita kejar. Infrastruktur, jalan dan segala macam itu masih sangat diperlukan. Tapi salah satu ini penyumbang mengapa tidak bisa membangun secara baik.

Jadi status ini kan masih HGU nya perusahaan, masih hak guna dari perusahaan itu sendiri dan belum dialih fungsikan sehingga barangnya tidak bisa dipakai, lahan sebegitu luasnya. Dan bayangkan sudah vakum sejak tahun 1987an kalau tidak salah, dan saya belum lahir Pak pada saat itu. Sudah vakum, belum produktif dan tidak digunakan sampai saat sekarang. Jadi terlantar begitu saja. Jadi mohon perhatian juga dari Dirut yang terkait untuk bisa segera berkunjung ke sana lah, melihat secara langsung seperti apa sih lahan ini? Mau kita gunakan lagi, mau kita regenerasi atau seperti apa?

Dan kemudian kalau kita berbicara status lahan, masih beberapa yang belum alih status tapi sudah ada Pak yang dialihkan menjadi APL. Tetapi permasalahannya, tetap saja tidak bisa digunakan secara maksimal oleh masyarakat di sana, oleh Pemerintah di sana. Karena alasannya kan memang ini perusahaan plat merah yang otomatis masih ada lah segala tanaman di situ miliknya perusahaan ini, tidak bisa diganggu gugat sehingga tidak bisa digunakan maksimal.

Dan belum lama ini kemarin Bupati Kabupaten Melawi yang kebetulan orang tua saya sendiri sempat ribut juga dengan pihak perusahaan, sempat ribut juga dengan pihak kabupaten pemekaran karena dulu lahan ini dibuat, dibuka ketika masih bergabung dengan Kabupaten Sintang dan sekarang sudah berdiri sendiri di Kabupaten Melawi. Tepatnya di Kecamatan Pinoh Utara Pak, itu yang menjadi masalah.

Jadi kemarin Pak Bupatinya sempat bersikeras untuk lahan ini bisa digunakan, untuk membuka jalan, untuk membuka jembatan karena di sana masih sangat terisolir tapi terbentur dengan status ini. Dan mohon kiranya bisa secepatnya ditindak lanjuti. Kemarin memang sudah ada janji dari pihak cabang yang di Pontianak untuk turun langsung ke Kabupaten Melawi untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan Pemerintah setempat. Tapi sampai saat ini belum ada. Belum ada itikad baik untuk datang ke sana mencari jalan keluar dan berkoordinasi. Nah ini untuk yang PT Inhutani III.

Kemudian saya juga menyoroti tentang kopi. Kopi ini di Kalimantan Barat lumayan bagus potensinya. Dan sekedar gambaran di wilayah timur Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi itu sudah ada Pakdes, dia gabungan seluruh aparatur desa se Indonesia, itu membuat kelompok tersendiri untuk mencoba menggali potensi budi daya kopi ini. Dan memang kita sudah diskusi banyak dengan mereka, pasar kopi, permintaan kopi sangat tinggi. Tidak susah untuk kita mencari pasar, tidak susah kita mencari target. Tetapi yang dikeluhkan adalah industri hulu.

Bagaimana misalnya pasar ini ingin ambil banyak, tapi mampu tidak kita ini menyajikan secara kontinu? Contohnya di Kabupaten Sintang, sudah beberapa wilayah itu yang mencoba untuk mengirim kopi sampai ke luar. Tapi sekali lagi kendalanya di situ, tidak bisa secara kontinu menyajikan. Karena sekali lagi *support* dari mungkin Pemerintah dalam hal ini juga pihak Inhutani III bisa memberikan catatan ini lebih lanjut.

Mungkin itu saja Pak Dirut. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.

KETUA RAPAT:

Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan yang terhormat,
Anggota yang terhormat, juga
Dirut Perhutani dan Inhutani yang hadir pada sore hari ini dari pagi.**

Alhamdulillah bisa bertatap muka. Mudah-mudahan banyak hal yang kita menjadi kajian, ke depan menjadi perbaikan. Ingin kami sampaikan bahwa walaupun Perhutani dan Inhutani induknya beda, kelahirannya itu beda, Perhutani dari KLHK, Inhutani dari BUMN, tapi tugasnya sama. Adalah tugasnya melestarikan hutan kita. itu yang pertama. Yang kedua, mengurus dan mengembangkan sampai pada tingkat bagaimana meraih keuntungan, ada ruang bisnis dalam proses pengurusan hutan kita.

Yang kedua, tentu Pak Dirut Perhutani pernah ditegur Bapak Presiden tentang jangan kolonial, lebih dari kolonialnya Belanda mungkin maksudnya begitu mungkin Pak Dirut. Maksud saya konflik Perhutani atau Inhutani dan masyarakat beserta perkebunan memang tidak pernah berakhir. Ini ada berapa hal. Ada memang masyarakat yang mendesak ingin punya ruang untuk bertani dan tempat untuk perumahan. Ada memang karena sekelompok orang yang ingin menguasai lahan. Tinggal ini dipilih, betul-betul dipilih mana lahan yang kira-kira bisa dikerja samakan yang baik.

Yang kedua ingin kami sampaikan bahwa kerja sama menjadi perhutanan sosial itu adalah sebuah kerja sama yang layak, yang pantas, yang saling mendorong memajukan. Bukan untuk menghilangkan sesuatunya. Karena kenyataannya di kita adalah pada saat kehutanan itu menjadi kehutanan sosial, kebanyakan karena memang penguasaan lahan oleh masyarakat jauh lebih dominan dari pada oleh Perhutani. Tapi saya ingin justru kita itu sadar berhitung bahwa ini kalau menjadi kehutanan sosial adalah akan lebih memajukan semua pihak. Itu yang harus dihitung baik-baik. Kalau tidak, hitungannya hanya sekedar. Maka ke depan, walaupun masyarakat tidak terlalu butuh untuk lahan itu, lahan hilang.

Yang ketiga, yang terakhir Bapak Dirut untuk semua. Saya khawatir yang tadi disampaikan itu tidak ada neraca keuangan Pimpinan, tidak ada neraca keuangannya. Kita hanya tahu labanya saja. Labanya sekian-labanya sekian. Kita tidak tahu laba itu dari mana. Apa menjual tegakkan yang masih muda, karena hutan yang sudah tua sudah hilang hari ini. Tegakkan-tegakkan pohon jati yang sudah tua ratusan tahun sudah hilang, dari mana lagi kita mengambil keuntungan itu?

Nah kalau neraca bisnis Biomassa sudah sampai di mana, terus kayu putih sudah sampai di mana, dan yang lain yang gondorukem dan yang lain-lain tadi yang disampaikan kita terhitung neracanya ada. Tapi kalau ternyata laporan yang ada hari ini ternyata untuk menutupi ke ukuran keuntungan itu adalah dengan segala cara yang "tidak layak" itu harus hati-hati. Karena kita akan menanggung risiko jauh lebih *mudarat* ke depan. Hari ini tegakkan yang masih muda yang tidak layak untuk di panen, maka kita punya risiko berapa belas tahun, puluh tahun kita kehilangan tegakkan. Ini ingin kami ingatkan dari sejak hari ini. Maka kalau tidak Pimpinan tadi mengajak kita untuk bagaimana ada Kunker dan melihat kenyataan hutan kita, itu ide baik dan harus kita lakukan Pimpinan.

Kira-kira itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang hari ini disampaikan itu adalah suatu yang *real* yang memang itulah adanya bukan sesuatu yang hanya sekedar karena ini menghadapi Pimpinan dan dewan yang biasa bikin pusing kepala. Apa adanya itu lebih baik, obatnya juga lebih mudah, dari pada kita tidak apa adanya, obatnya susah nanti ke depan. Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ustadz Haerudin. Pak Darori. Tinggal dua.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Pak Ketua, teman-teman, Pak Dirut,
Semuanya adik-adik saya semua yang saya hormati.**

Saya akan bicara apa adanya Pak.

KETUA RAPAT:

Ini mantan komisaris ini Pak.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Saya pernah komisaris utama di Inhutani III selama 5 tahun. Di Inhutani IV juga 7 tahun. Jadi paham. Jadi begini, Inhutani ini dan Perum ini tidak bisa diharap besar karena tidak ada anggaran dari Pemerintah Pak. Jadi Bapak tadi cerita panjang lebar memohon ini itu, itu dari napasnya sudah Senin Kamis itu, macam mana ini nanti ya? Saya paham betul lah ya, karena saya di situ. Jadi sejarahnya Inhutani itu iya dulu besar, kenapa di Timur enggak ada? HPH yang dicabut oleh Pemerintah ditugaskan Inhutani. Inhutani dapat IUPK, menebangi kayu, itulah kaya nya Inhutani pada saat itu. Saya turun menikmati waktu itu Pak, jujur. Karena saya tahun 1985 (suara tidak jelas) di suatu daerah yang HPH nya ada 20 itu.

Nah lama-lama arah ini reformasi jadi rebutan. Datanglah perkebunan besar yang mengimpit Inhutani tidak bisa berlabu. Jadi areal Inhutani sekarang diduduki oleh para perusahaan kebun sawit yang ilegal, ini contoh. Jadi kalau cerita untung, siapa untungnya dari mana, begitu? Contoh saja, Inhutani ini kerja sama dengan perusahaan besar kayu. Menjual (suara tidak jelas) kepada perusahaan itu. Tapi tidak boleh langsung pada perusahaan Pak, lewat broker. Kalau harga di perusahaan 300 ribu/ kubik, kita harus lewat broker 250, yang 50 ribu itu dibagi-bagi oleh brokernya itu kepada bos-bosnya.

Sedangkan ongkos produksi kita untuk menanam pohon itu sengon dan akasia dan sebagainya hampir 240, untungnya 10 ribu. Lama-lama perusahaan ini pinjam kepada patungannya Pak yang dulunya 55% pinjam (suara tidak jelas) lama-lama tinggal 5% akhirnya difestasi, jual lah saham itu. Gatau sekarang, saya kira terus itu. Iya? Semua ada. Difestasi dibeli oleh perusahaannya. Pemerintah ini kita *laporin*, kenapa enggak bisa meng*cut* harga ini langsung kepada perusahaan? Kita enggak bisa, harus lewat brokernya. Coba duduk manis langsung dapat 50 ribu per kubik dikali sekian juta meter kubik. Makanya cukong-cukong itu kaya.

Nah di Perum Perhutani ini saya tahu betul sekarang dari 60 KPH, mungkin yang sehat tinggal 30 Pak Dirut kalau enggak salah ya? Yang 30 subsidi. Saya sudah keliling Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya tanya sekarang, perhutanan sosial, Perum Perhutani sampai di mana keterlibatannya? Karena yang di bawah itu kalau ditanya bingung Pak. Enggak boleh ngomong Pak, enggak boleh ngomong. Saya keliling itu. Mestinya kan Anda sebagai pemangku kawasan. Presiden menyatakan agar meniru seperti di Bangkok, menanam buah-buahan dan sebagainya, jangan perorangan. Saya lihat di Perum Perhutani ada perhutanan sosial bukan orang setempat. Nah ini yang kaya begini mungkin periode yang akan datang terbuka ini. Tolong ini dihentikan.

Pak Ketua, dulu waktu masih Bu Mega saya pernah (suara tidak jelas) oleh Pak SBY, ada penugasan khusus kepada Perum Perhutani dan Inhutani menanam pohon hutan lindung. Perpresnya sampai sekarang belum dicabut. Tidak perlu tender, langsung mengerjakan. Saya usulkan Pak untuk 2020 melalui Kementerian LHK menugaskan Perhutani dan Inhutani kasih satu triliun untuk menghijaukan hutan lindung. Kenapa? Di Jawa ini Pak, hutannya tinggal 16%. Aturan Undang-Undang mengatakan hutan itu bagus 30% Pak Ketua, iya kan?

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Yang perlu saya masukkan dalam kesimpulan rapat.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Iya terima kasih kalau itu. Perlu Pak. Kalau perlu saya,

KETUA RAPAT:

Dibuat redaksinya yang baik, tidak perlu sebutkan angkanya.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

(suara tidak jelas) tapi begitu ganti Dirjen, enggak mau Pak. Enggak tahu ada alasannya apa. 17 (suara tidak jelas) bagaimana Pak? Banjir Pak. Tugasnya mereboisasi dan menghijaukan hutan lindung di Jawa dan luar Jawa, begitu Pak. Khususnya jenis-jenis yang produktif. Misalkan manggis, petai, durian, jengkol. Hasilnya 40% untuk Perum atau Inhutani, 60% untuk rakyat. Rakyat yang akan memelihara semua Pak. Ini tolong ini, ini penting lah. Dari pada uang yang 1000 triliun tapi enggak ada jelas. 1 triliun saja sudah cukup tiap tahun.

Dan yang kedua saya minta teman-teman Inhutani dan Perhutani Undang-Undang No. 41 oleh Pak Ketua sudah diusulkan ada perubahan. Tolong masukkan peranan Anda di Undang-Undang No. 41 kehutanan itu apa. Jangan sampai sudah keluar Undang-Undang, waduh kok saya enggak ada *cantolannya*, dan sebagainya. Mungkin Pak Dirut sama teman-teman kumpul, membahas apa yang harus dimasukkan di pasal mengenai perusahaan hutan di Undang-Undang No. 41. Sekian, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti dalam revisi Undang-Undang No. 41 kita juga memanggil, meminta masukan kepada BUMN kehutanan. Karena kita tidak mau ada celah sedikit pun dari Undang-Undang tersebut.

KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pak Bagus, oh masih telepon. Slamet, silakan. Pak Bagus masih tim sukses. Silakan Slamet. Lanjut-lanjut Pak Bagus, urusan Munas besok.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Izin Ketua.

Ini belum kenal Ketua, izin kenal dulu waktunya 3 menit. Perkenalkan Bapak Direktur, saya Slamet Ariyadi dari Partai Amanat Nasional, nomor anggota A-508. Iya tolong diperhatikan. Saya Dapil Madura Pak, satu-satunya di sini Pak. Madura harus dikembangkan.

Ini yang pertama, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Darori. Ketika Perhutani ini tidak dapat *support* secara penuh oleh Pemerintah, terus apa manfaatnya Perhutani ini dan fungsinya apa? Karena Perhutani ini merupakan BUMN dari Pemerintah, ini yang pertama. Jadi kalau memang secara, tidak bisa maksimal secara Tupoksi dan semua berbicara masalah kopi tadi teman-teman menarik, ini kan masih banyak yang impor. Berdasarkan data yang diterima, kemarin impor dari Vietnam 3.280.000 sekian, impor ke Brazil 747 sekian.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tiga juta berapa maksudnya ton, kilo atau ons?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Kilo. Kilo ketua.

KETUA RAPAT:

Oh. Enggak, harus jelas. tiga jutanya tiga juta apa.? Kalau tiga juta ton kan enggak mungkin.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Iya, jadi kalau.

KETUA RAPAT:

Siapa tahu tiga juta ons?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terima kasih Ketua.

Jadi kalau hari ini Indonesia masih impor dan tidak dapat dukungan penuh dari Perhutani yang membidangi dengan ini, buat apa Perhutani ini? Mending kita bubarkan saja Ketua. Kita sepakat ya dibubarkan ya? Iya. Kita bubarkan saja. Yang kedua, saya ini mewakili Madura Pak. Saya kurang begitu paham terkait adanya Perhutani dan Inhutani ini. Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan dan apa yang dikembangkan dari Perhutani ini untuk Madura? Iya ini kan pertanyaan Pak Ketua untuk dijawab oleh direktur.

Yang ketiga, apakah Tora yang ada di Madura bisa dikembangkan melalui komoditi Perhutani? Yang ke empat, di Madura ini Pak ada yang namanya tentang rumput kasturi, rumput kasturi ini sangat mahal di dunia Pak. Ini perlu kiranya diberlakukan dan dikembangkan. Bagaimana kiranya nanti di Madura mampu melakukan pembibitan dan sebagainya. Dan yang ke lima pertanyaan saya, apakah bisa lahan Perhutani yang ada di Madura itu untuk bisa dilakukan barter lahan dengan lahan masyarakat? Itu sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih. Kalau lahan perhutani, *Insyallah* sulit di Madura. Yang ada itu tasek Pak, tasek itu laut.

Silakan mas Bagus.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi menambahkan masukan yang disampaikan oleh para anggota, saya tidak jauh-jauh beda. Yang pertama, tetap berbicara tentang kopi. Di Bali juga banyak

pengrajin kopi. Tapi tidak ada tersentuh binaan dari Perhutani sejauh saya. sampai pernah saya datang ke kantor Perhutani dan tegas dibidang Perhutani tidak ada mengembangkan untuk di Bali. Nah ini mohon dicatat ini dengan baik-baik karena di Bali potensi perkebunan kopi dan kopi yang dihasilkan lumayan baik. Ada sampai saat ini petani kita menghasilkan kopi lanang dengan sistem fermentasi. Ini luar biasa. Orang buat kopi tanpa memakai gula, tapi rasanya nikmat. Ini ada kopi lowak juga, iya luwak. Kalau di Bali bilang lowak. Nah kalau leak lain lagi. Itu asuhannya Pak Sudin kalau leak itu.

Jadi ini Pak, termasuk juga yang paling memprihatinkan, kenapa Perhutani tidak menghasilkan madu lagi? Sampai katanya bibit madu beli katanya. Masa sih kita semiskin itu? Padahal sekarang di Bali sedang gencar-gencarnya Pak, membuat madu trigona. Ini khasiatnya luar biasa. Enggak juga ada sentuhan dari Pemerintah. Sesudah itu banyak lagi masyarakat-masyarakat yang bisa menghasilkan madu-madu alami. Iya tapi cobalah Bapak bisa melahirkan satu pengusaha yang lahir dari masyarakat yang menjadi binaan Perhutani.

Saya mengajak Bapak benar-benar serius, benar-benar sepenuh hati. Marilah dari CSR yang Bapak punya, kembangkan untuk meningkatkan pengusaha-pengusaha yang ada di masyarakat menjadi pengusaha madu, menjadi pengusaha kopi. Nah inilah yang harus kita lakukan. Tadi teman saya bilang banyak impor yang masih ada. Marilah kita kembalikan sekarang. Jangan hanya impor, bagaimana Bapak optimis bisa menghasilkan pengusaha yang lebih banyak, bahkan bisa melahirkan ekspor di komoditi madu dan kopi ini.

Nah ini yang penting Pak, ini penting sekali. Apa lagi dengan sistem maaf, kondisi keuangan ekonomi kita saat ini Pak. 2020 konon ceritanya akan krisis ini kalau Bapak tidak hadir untuk masyarakat, untuk perekonomian di tengah-tengah semangatnya masyarakat ini, akan semakin berat negara ini Pak. Tolong semangatnya masyarakat untuk mengisi ekonomi mereka sudah menghasilkan temuan-temuan yang sangat bagus. Jangan diam diri. Hadir di tengah masyarakat, tunjang mereka dengan teknologi, tunjang mereka dengan CSR yang Bapak punya. Saya yakin masyarakat Indonesia akan lebih maju di bawah binaan Perhutani. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Akhir, Pak Asep.

F-PKB (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S. Sy.):

Terima kasih.

*Assalamualaikum,
Assalamu 'ala man ittaba'al huda.*

Di daerah saya beberapa tahun yang lalu terjadi perambahan hutan yang besar. Daerah Tasik, Ciamis, Pangandaran. Dan mereka menuntut tanah itu jadi milik mereka. Yang saya maksudkan adalah ini harus ada sebuah solusi. Soalnya kalau mereka terus menuntut seperti itu ya aturannya akan sangat lama. Mungkin salah satu solusinya adalah perhutanan sosial. Untuk itu diharapkan untuk segera ditentukan lokasi yang akan dijadikan lokasi perhutanan sosial. Sebab di daerah Jawa Barat ini khususnya di Dapil saya ini banyak yang enggak karu-karuan.

Nah kemudian di samping sudah ditentukan lokasinya, juga diperuntukkan bagi masyarakatnya. Masyarakat yang mana? Kriterianya masyarakat yang mana? Begitu. Kenapa saya bilang begitu? Jangan sampai lokasinya di kabupaten A, malah mereka berbondong-bondong dari kabupaten lain *ujug-ujug*, dan itu ada terjadi. Lalu setelah ditentukan lokasinya, nah ini komoditas apa yang akan ditanam di situ? Karena apa? Saya sempat melihat di Garut Selatan itu di Sancang, ada perkebunan kelapa, sudah tinggi-tinggi buahnya enggak ada, mungkin karena kurang cocok. Artinya perlu juga ditentukan komoditas apa yang akan ditanam di situ. Jadi jangan asal kasih. Umpamanya sekarang musim kopi, kasih kopi saja. Belum tentu di tempat itu cocok buat kopi, begitu.

Hal lain juga barang kali untuk supaya ada sinergi dengan masyarakat ini, diberikan pula sebelum pepohonan yang akan dijadikan komoditas di tanah tersebut juga mereka masyarakat ini diberikan sebuah kesempatan untuk palawija umpamanya. Mungkin juga ini palawija ini jangan sembarang palawija. Harus disesuaikan dengan umur tinggi tegakkan pohon tersebut. Mungkin salah satunya juga bagaimana supaya bisa meredam tidak kena panas, iya umpamanya enggak ada proyek pohon kencur, begitu kan Lalu dalam hal ini juga kemudian, jadi yang biasa jadi masalah biasa juga pasca panennya Pak. Karet, mereka tanam karet, mereka panen, bingung dia proses. Terkadang jualnya ke mana?

Jadi tidak lepas begitu saja. Nah perlu juga dalam hal ini untuk meningkatkan para petani ini supaya tidak asal tanam saja, juga dibuatkan semacam asosiasi petani tersebut di sekitar yang tadi disebutkan itu. Umpamanya kalau di antara lain kalau di Pangandaran itu ada saya kenal ada Asosiasi Petani Kelapa Indonesia. Tapi kalau kelapa tanpa diurus, ada beberapa satu titik, beberapa kebun. Jujur saja saya punya satu kebun kurang lebih ada sekitar kurang lebih satu hektar, karena enggak diurus iya enggak berbuah-buah, enggak diurus, enggak dikasih tahu. Tetapi setelah dioprek, diurus begitulah, *dibersihin* terus dikasih pupuk, ternyata jadi bagus, begitu.

Jadi mereka itu bukan hanya diberi tapi juga, bukannya diberi dalam artian tanahnya dalam artian alokasinya atau benihnya, tapi juga ilmunya. Karena sering kali para petani kita ini latah melihat tetangganya sukses menanam kelapa, ikut menanam. Padahal enggak tahu, orang lain sukses itu. Atau umpamanya sukses menanam jahe, latah ikut. Macam jahe yang mana yang bagus, yang punya komoditas ekspor, enggak sembarang jahe. Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Demikian tanggapan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilakan kepada Dirut Perum Perhutani dan Dirut PT. Inhutani I sampai V untuk menyampaikan jawabannya. Tolong dijawab dengan jelas dan lugas. Kita di sini bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari solusi, jalan terbaik. Bagaimana supaya Perhutani dan Inhutani bisa bangkit kembali. Kalau perlu nanti kita usulkan, dimintakan PMN jangan PMN itu hanya untuk PT. PAL. PT. PAL itu mungkin sudah 2-3 kali. Bulog juga sudah 2-3 kali. Tapi ya begitu saja.

Para Dirut yang saya hormati.

Usul saya, apabila ada acara di Dapilnya tolong lah Bapak-bapak anggota dewan ini diundang. Mereka punya ongkos sendiri, punya uang sendiri. Cuma kalau datang ke suatu acara berarti diakui. Ongkos enggak minta Pak, Bapak-bapak ini punya duit semua, orang kaya semua Pak. cuma kalau ada acara tolong diundang. Bagaimana pun Bapak-bapak ini semua, Ibu ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jangan bicara cuma Komisi IV, mereka juga bisa berbuat sesuatu di lain komisinya. Itu pesan saya. Jadi silakan dijawab singkat dan jelas, dan tolong kejujurannya. Bagi anggota yang sudah pergi, tidak perlu dijawab. Berarti memang dia cuma nanya iseng-iseng saja. Silakan.

DIRUT PERUM PERHUTANI (DENALDY MULINO MAUNA, S.E., M.H., M.B.A., M.S.):

Baik, Bapak Ketua.

Jadi kalau misalkan saya lihat di sini memang ada 16 pertanyaan. Saya akan coba menjawab khususnya yang terkait dengan Perum Perhutani sejujur-jujurnya, sebisa yang saya bisa jawab. Apakah nanti kalau misalkan lebih ke aspek teknis, boleh dijawab dengan direksi lain atau dijawab dengan tertulis.

KETUA RAPAT:

Wajib. Jawab saja. Direksi lain juga punya hak untuk menjawab. Karena kita harus transparansi.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Baik, oke terima kasih Pak.

Jadi terkait dengan khususnya pertanyaan dari Pak Suhardi ya? Lanjut, oke. Yang kedua dari Pak dokter, Pak drh. Slamet. Tadi pertanyaannya terkait dengan kor bisnis ya? Memang kalau kita lihat Perhutani selama 5 tahun terakhir ini andalan utamanya memang dari kayu, baik jati maupun yang sifatnya rimba. Dan yang kedua sebagaimana tadi yang kami sampaikan itu adalah dari gondorukem dan terpentin. Namun melihat dengan semakin tingginya (suara tidak jelas). Dulu mungkin kalau misalkan jati dikenal bahwa Indonesia adalah memproduksi jati yang terbaik di dunia, tapi dengan margin yang besar pada saat itu maka negara-negara lain pun juga terutama Vietnam, Brazil juga ikut masuk ke dalam bisnis tersebut.

Oleh karena itu kami mencoba mencari peluang bisnis, kor bisnis yang lainnya. Yaitu yang tadi sempat kami sampaikan terkait dengan Biomassa. Meskipun kami sudah melakukan suatu *pilot project* di tahun 2013, saya juga melihat masih banyak hal yang harus kita pelajari lebih dalam sesuai dengan masukan dari Bapak anggota yang lain. Jadi kita akan terus mempelajari lebih dalam baik dari aspek pengembangan usahanya supaya lebih kompetitif, maupun dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Yang kedua adalah terkait dengan inovasi, Pak Slamet. Itu yang terkait dengan sistem penjualan kita secara *online*. Jadi kalau enggak salah 5 tahun yang lalu kami mendapatkan masukan dari Litbang KPK, bagaimana supaya penjualan kayu ini bisa lebih terbuka, lebih transparan. Sehingga pada saat itu kita bekerja sama dengan PT. Telkom untuk menciptakan suatu *platform* agar kita bisa memplatformfikasi agar kita dapat dan semua memiliki akses yang sama, jenis kayu dengan harga pada saat itu juga. Nah ini yang dianggap oleh berbagai pihak yang menilai bahwa ada sebuah

inovasi teknologi. Meskipun masih banyak keluhan-keluhan dari pada konsumen terutama kayu ini kan tidak ama dengan HP. Kalau HP spek nya sudah jelas, ukurannya. Kayu ini memiliki berbagai macam jenis kontur sifat secara fisik variasi dan lain sebagainya. Itu masih kami tetap melakukan perbaikan, Pak Slamet.

Terus yang kedua adalah terkait dengan daun kayu putih, angkutan dan estimasi. Mohon maaf mungkin bahan presentasi yang kami sampaikan ini tidak se-*detail* per kabupaten ya. Bapak mengharapkan ada data untuk Sukabumi ya Pak? Iya. Artinya di sini kita sudah menyampaikan di KPH nya Sukabumi, di halaman 26 ini baik kegiatan pungutan dan kegiatan angkutan. *Detailnya* kalau misalkan dibutuhkan Pak, kami akan sediakan Pak Wakil nanti kita akan sediakan.

Bagaimana dengan peran dari pada LMDH? Ini catatan yang saya peroleh dari direksi saya yang telah lebih dahulu, lebih lama dari saya di Perhutani. Memang diawali dari sosialisasi dan menyamakan persepsi dan adanya suatu pembentukan kelembagaan terhadap Lembaga Masyarakat Desa Hutan tersebut. Dulu dengan akta notaris, sekarang pembentukan dengan pengakuan desa. Dengan dikeluarkannya Perdes itu, berdasarkan Undang-Undang Desa yang tahun yang baru. Setelah itu kita melakukan identifikasi potensi dan kegiatan khususnya dalam kegiatan berbasis lahan dalam kawasan, agroforestri tadi dengan pola kemitraan sebagai mana tadi yang kami sampaikan di dalam paparan. Dan ikatan kerja sama saat ini dengan konteks perhutanan sosial itu LMDH ini bekerja sama dengan istilahnya nota kesepahaman berdasarkan Permen No. 83 tahun 2016.

Nah satu hal lagi yang Bapak sampaikan terkait konflik. Mungkin ini juga menjadi,

F-PKS (drh. SLAMET):

Pimpinan, bisa interaktif Pimpinan? Iya.

Maksud saya begini Pak direktur. Jadi ada keluhan dari masyarakat bahwa untuk membentuk kelompok, dia masuk dalam kelompok itu juga kesulitan. Akses informasi tidak didapatkan tadi, dan selama ini yang mendapatkan atau bisa masuk di kelompok itu biasanya memang yang berafiliasi ini keluar langsung dari Dapil ya. LMDH yang berefek juga, ada LMDH juga, perhutanan sosial juga. Dua-duanya keluhannya seperti itu Pimpinan.

Jadi yang bisa mengakses itu biasanya yang juga berafiliasi kepada Ormas-ormas tertentu sehingga sebenarnya masyarakat yang memang membutuhkan dan punya keahlian di situ tidak punya akses. Nah makanya tentunya justru saya juga mengharapkan, ada enggak terobosan yang memang akan dilakukan sehingga akses masyarakat rakyat kecil yang memang berhak itu mendapatkan itu bisa dia dapatkan. Di sisi lain juga memang ada kemudahan-kemudahan yang bisa.

Jadi itu. Ini keluhan dari langsung dari mereka seperti itu.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Terima kasih. Jadi salah satu permasalahan yang pernah disampaikan waktu audiensi dipanggilnya kami di Presiden waktu itu tanggal 10 bulan 10 itu antara lain ada indikasi pungutan, antara lain juga apa yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana anggota itu masuk, bagaimana kok anggota yang lain masuk ke dalam suatu kelompok yang bukan pada tempatnya dan lain sebagainya.

Kami selama ini belum melakukan perbaikan sampai ke tingkat tapak. Namun hasil dari pada arahan Pak Presiden waktu itu adalah harus dilakukan perbaikan di tingkat tapak tersebut. Jadi setelah itu kami membentuk tim perbaikan *good governance* khususnya di tingkat tapak dengan melibatkan dari berbagai *stakeholder* termasuk dari kecamatan dan dari desanya juga untuk melihat kenapa hal-hal tersebut terjadi, kenapa seolah-olah yang masuk ke dalam situ adalah kelompok atau *person* yang memiliki akses tertentu tapi yang harusnya dibuka untuk semua yang bisa memiliki kesempatan yang sama.

Kami menyadari Pak itu adalah suatu masukan yang perlu kami perbaiki dan tim ini saat ini sedang berjalan. Kita melakukan *pilot project*. Kami saat, kita punya 47 KPH Pak, *pilot project* kami satu mewakili di satu provinsi. Ditargetkan oleh Pak Presiden awal tahun depan sudah ada langkah-langkah perbaikan terutama terkait dengan bagaimana permasalahan keanggotaan itu bisa sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi.

F-PKS (drh. SLAMET):

Mungkin saya juga akan sampaikan sekalian. Kan ada di KPH Sukabumi. Akan saya pertemukan nanti masyarakat yang mengeluhkan itu. Mungkin kalau dari Perhutani pusat juga bisa hadir kan lebih baik, sekalian nanti pas reses saya akan pertemukan masyarakat yang mengeluhkan itu dengan mungkin KPH ya di sekitar itu. Sekalian nanti menjadi pemberitahuan. Terima kasih Pimpinan.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Baik.

Tadi juga ada pertanyaan dari Bapak juga terkait dengan konflik yang terjadi di Perum Perhutani. Mungkin saya juga sampaikan sekaligus mungkin menjawab dari anggota yang lainnya. Konflik di Perhutani memang cukup besar. Data terakhir yang kami peroleh itu sekitar 80.000 hektar. Namun yang terbesar dari 3 lokasi yang tadi saya sampaikan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada di Jawa Barat Pak, Pak Asep. Jadi ini memang suatu masalah yang cukup serius. Di sana kalau enggak salah hampir 40an ribu sendiri di Jawa Barat.

Dan harapan kami, izin saya sekaligus menjawab. Memang PS harusnya menjadi sebuah kunci untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, dalam perjalanannya sebagai mana tadi yang saya paparkan, banyak kendala-kendala implementasi. Tadi yang Pak Asep katakan juga benar terkait siapa, kenapa ada orang lain yang masuk di situ, bagaimana proses verifikasi.

Nah itu semuanya yang menjadi masalah-masalah yang saat ini kami dengan Kementerian LHK sedang menyusun suatu ketentuan baru supaya PS ini benar-benar efektif. Karena memang kami lihat pemberdaya masyarakat ini memang harus Pak jadi suatu kewajiban kami untuk dikerja samakan dan mereka mendapatkan manfaat yang optimal. Jadi itu juga sekaligus karena ada Pak Asep di sana. Kami mungkin perlu suatu pendekatan lain Pak, terutama di Jawa Barat terhadap konflik ini supaya bisa benar-benar selesai karena yang paling banyak itu di Jawa Barat.

Selanjutnya, Pak Hermanto. Pak Hermanto sudah tidak ada. Lanjut. Pak H. Sutrisno. Iya terima kasih Pak Haji sudah menyampaikan banyak sekali masukan-masukan, arahan dan juga catatan-catatan. Telah Bapak sampaikan mengenai peran kita. Kalau dulu Perhutani itu banyak yang menyebutkan kita itu sebagai penyewa lahan. Jadi terkenal sebagai rentenir ya. Di situ memang kami lihat tidak akan

mendapatkan suatu nilai tambah. Iya oleh karena itu kami mendorong juga teman-teman supaya kami tidak hanya sebagai kontraktor saja. Tapi benar-benar dapat berinvestasi.

Memang langkah utama kami untuk bisa melakukan kegiatan yang lebih dalam lagi kita perlu waktu. Oleh karena itu memang fokus kita di, kalau Bapak lihat angka-angka yang tadi kita semua mengalami kerugian di 2015-2016 dan kami fokus kami memang di 2 tahun pertama adalah bagaimana kami bisa *survive*, bisa bayar gaji dan lain sebagainya. Namun dengan sudah ke bentuk, sudah ada dana-dana yang kami kumpulkan dari kinerja tersebut, kami ekspansi dan teman-teman Inhutani pun juga sudah didorong untuk tidak lagi menjadi hanya kontraktor.

Tadi juga Bapak tanyakan dan mungkin juga di Komisi VI Pak Sutrisno, kenapa, bagaimana kok bisa Perhutani laba? 2016, 2017 memang fokus kami. Kami harus sampaikan ke semua jajaran bahwa sebesar apa pun perusahaan kalau tidak dilakukan penanganan yang tepat, pasti *kolaps*. Kita mungkin ingat dengan *Blackberry* Pak, dulu luar biasa besarnya kita juga ingat dengan Nokia. Saya untuk membuat teman-teman di Perhutani itu bahwa kita harus memperbaiki diri. Saya harus berhadapan dengan mereka dan mengasih tahu contoh-contoh yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau 2016, 2017 fokus kami adalah di CRP (*cost reduction program*). 2018 adalah *business process reengineering*, bagaimana suatu proses bisnis yang dulu kita lakukan 5 tahap, kita ubah menjadi 3 tahap untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

Juga tadi Bapak tanyakan mengenai kayu putih dan kopi. Jujur Pak, kayu putih dan kopi memang bukan bisnis kor Perhutani saat itu. Tetapi melihat tadi potensinya kita masih tergantung dengan impor yang lebih dari 2000 ton buat kayu putih, dan hitung-hitungannya juga tadi yang disampaikan teman-teman, makanya kami memutuskan bahwa memperdalam yang non kor ini. Kopi, kayu putih terutama yang tadi rekan saya sampaikan itu harganya enggak pernah turun. Jadi ada di dalam paparan saya ekstensifikasi maupun intensifikasi kita lakukan, baik di kayu putih maupun di kopi.

Nah mungkin untuk hutan sosial Pak yang terkait dengan pabrik gula. Saya mungkin akan minta izin Pak Wakil Ketua untuk disampaikan sama rekan saya yang khusus supaya disampaikan se-clear nya ya. Pak, mohon menyampaikan yang terkait dengan pabrik gula, (suara tidak menggunakan mic). Izin Pak.

KETUA RAPAT:

Perhutanan sosial ini ya?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Yang pabrik gula Pak.

KETUA RAPAT:

Oh pabrik gula.

DIREKSI PERHUTANI:

Terima kasih atas waktunya.

Bapak Wakil Ketua Komisi IV.

Kami ingin menyampaikan terkait dengan lahan atau kawasan hutan Perum Perhutani dan di wilayah KPH Indramayu dan KPH Majalengka. Saat ini seluas hampir 12.000 hektar Pak ini dipergunakan oleh PT. RNI yang proses izin pinjam pakainya juga belum selesai Pak. Jadi ini sejak tahun 1981 sampai sekarang belum diserahkan lahan penggantinya. Saat ini sudah ada pendampingan dari Litbang KPK yang intinya tahapan dari PT. RNI akan menyediakan lahan pengganti untuk dijadikan kawasan hutan secara bertahap. Kira-kira itu Pak, terima kasih.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan, mohon maaf saya ingin menambahkan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan langsung.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pak Dirut, di sana itu kan ada Bandara Internasional Kertajati. Saya berharap justru kalau tidak salah pada saat itu idenya Bu Mega itu HGO nya diperpanjang sampai 2025, saya masih Bupati di sana. Harapan saya tentu lahan itu tidak lagi diperpanjang, apa lagi diperkuat dengan "tukar guling" untuk pengembangan kota penerbangan di wilayah sana, begitu. Jadi ini mohon sebagai masukan dari saya untuk dikaji lebih dalam dulu. Jangan kemudian ditukar gulingkan. Nanti ekspansinya ke mana kota penerbangan yang sekarang sedang dipersiapkan? Karena itu koneksitas antara bandara internasional dengan pelabuhan laut Patimban di Subang. Nanti koneksitasnya ada di situ. Itu saja dari saya, terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua. Untuk meluruskan Pak Ketua.

Jadi teman-teman Perum bahwa kalau kawasan hutan belum izin pelepasannya itu tidak boleh di HGU kan. Ini berarti BPN melanggar Undang-Undang ini Pak. Nanti Undang-Undang No. 41 pun melanggar ini. Makanya itu *nggantung* terus, karena merasa punya HGU tapi areal penggantinya bukan sedikit loh, 12.000 ya mas ya? Besar loh Pak.

Nah ini perlu mungkin ada kunjungan spesifik *ngecek* ini. Ini komisi yang lalu juga sudah bahas, ilang lagi Pak. Tolong saya kira jadi masukan biar kasihan Perum ini mau diapakan ini jangan disalahkan. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Sepakat. Nanti kita kunjungan spesifik ya termasuk kawasan yang *dicaplok* Adaro tadi tidak ada kontribusi sama sekali ke Perhutani, malah yang enak jadi dinas, kabupaten kan.

Sekarang lanjut Pak Dirut.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Terima kasih Pak Wakil Ketua.

Selanjutnya dengan Pak Abdullah. Pak Abdullah saya harus jujur, saya terkait dengan pabrik, pengembangan pabrik sagu di Papua. Saya memang masuk di akhir 2016 dan sudah diresmikan oleh Pak Presiden. Cuma kalau misalkan pada saat itu dan sampai saat ini saya harus jujur. Sebenarnya kompetensi kami enggak di situ, kalau mau jujur ya Pak kami sampaikan di sini. Tapi memang penugasan. Tetap kami lakukan dengan upaya semaksimal mungkin.

Namun, izin kami sampaikan perkembangan terakhir Pak. Di surat terakhir di surat dari Kementerian, Deputi Bidang Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pendanaan Program UP4B, itu dimintakan bahwa pihak-pihak lain menyediakan atau memfasilitasi pembangunan ini termasuk:

1. Jalan Kaisiranggo 8km, itu sudah selesai.
2. Peningkatan pelabuhan laut Teminabuan, Sorong Selatan menjadi pelabuhan nasional, DIPA Kementerian Perhubungan tahun 2013. Setahu saya ini belum dilakukan.
3. Depo BBM melalui DIPA Kementerian ESDM juga tahun 2013 waktu itu atau Pertamina saat ini juga belum.

Jadi ada beberapa peran dari pada lembaga yang lain yang kalau kita bikin *checklist*nya memang ada yang belum bisa memenuhi. Namun itu tidak membuat kami untuk berhenti, Pak Abdullah. Saya bergabung di 2016, saya melihat ini adalah suatu potensi pengembangan yang harus kita laksanakan karena sifatnya penugasan tadi. Sehingga kita mengeluarkan tambahan buat persiapan mulai dari merknya.

Waktu itu saya ingat, waktu itu Pak Agus ini masih direktur pemasarannya. Kita namakan Salas ya Pak ya? Jadi (rekaman terputus)

Namun dalam waktu yang berjalan, kita melakukan apa yang disebut dengan ada berita acara serah terima menguji kapasitas terhadap pabrik tersebut. Pihak ketiga yang melakukan pembangunan pabrik ini tidak sanggup menghasilkan produksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di spek atau di *feasibility study* tadi itu Pak. Contohnya izin saya lihat di sini. Jadi kalau misalkan targetnya harus mencapai 2000 tual per *sheet*, pencapaiannya hanya 1000, setengahnya. Dan setelah kami hitung, bila kita harus menjual per kilonya itu HPP nya bisa mencapai 11.000/kg. Sedangkan kalau kita jual dengan *franko* Surabaya ya Pak ya? Itu hanya dibeli di 5500. Artinya ini ada masalah teknis di pabrik itu sendiri yang harus kita benahi.

Jadi ada masalah dengan serutannya, itu ya apa namanya istilahnya Pak? Ada masalah-masalah teknis di pabriknya sehingga perusahaan yang membangun ini akhirnya pada saat berita serah terima yang kedua, mereka menyampaikan bahwa ini cuma bisa sampai di sini. Kita konsultasikan dengan Kejaksaan Agung, bagaimana kita bisa meneruskan ini dengan pihak ketiga. Nah itu sampai hari ini kita sudah mendapatkan calon yang akan bekerja sama dan melakukan perbaikan terhadap pabrik tersebut. Itu Pak suatu cerita yang sungguh bagi saya juga sedih, kenapa ini enggak bisa jalan. Tapi saya pastikan bahwa ini harus tetap bisa berjalan sesuai dengan penugasan.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Jadi masih ada di Perhutani ya? Jadi belum diinikan oleh pihak lain? Terima kasih.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Masih. Oke.

Dari Pak, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama, Pak Ansy Lema ya? Mungkin saya langsung ke terkait dengan kayu cendana dengan Perhutani ya. Iya mungkin teman-teman bisa menjelaskan dulu, itu ada penugasan untuk kayu cendana.

KETUA RAPAT:

Pertanyaan sederhana, kenapa pilihannya kok tidak cendana, kan begitu? Kayu cendana atau gaharu sekalian Pak? Orang Papua biar puas. Karena gaharu ini kan ekspor juga potensinya.

DIREKSI PERUM PERHUTANI:

Terima kasih Pak. Jadi pada saat itu sifatnya adalah penugasan. Jadi bukan kami hengkang, karena memang masa penugasannya berakhir sehingga kami harus pergi. Memang betul bahwa masih banyak aset kita yang di sana, apakah itu tanah atau pun bangunan. Ini yang belum kita selesaikan dan ini sedang kita inventarisir ulang untuk akan kita tindak lanjuti dengan optimalisasi aset. Jadi yang di luar wilayah kita ini dulu NTT, NTB sama Timo Timur itu sifatnya penugasan Pak dalam jangka waktu tertentu. Sampai tahun, Pak Andi tahun berapa terakhir Pak Andi? Kebetulan beliau ini Pimpro nya dulu, sampai 1998 terakhir Pak.

Nah sekarang pun andai kata nanti ada penugasan seperti itu barangkali ya kami sih siap untuk mempertimbangkan atau pun memperjuangkan dan melaksanakannya Pak. Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Jadi kesimpulannya tergantung penugasan Pak?

KETUA RAPAT:

Di luar Tupoksi nya? Iya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Yang menugaskan itu siapa Pak? Pemerintah itu siapa? Kementerian LHK ya? Oke berarti nanti yang perlu didiskusikan itu adalah kita ingin tahu narasi besar KLHK ini terkait dengan bagaimana memikirkan tentang kelangsungan hidup dari cendana ini.

Soal kopi bagaimana Pak? Tadi ada pertanyaan saya juga soal kopi. Karena di NTT juga potensinya bukan cuma robusta tapi arabika juga tersebar di banyak tempat, begitu. Seperti di Manggarai itu saja minimal ada di 22.000 hektar, Manggarai Timur, Manggarai Barat, sekitar 10.000 Manggarai, sekitar 17.000 Kabupaten Ngada Bajawa itu juga cukup. Bahkan di beberapa kedai kopi *multinasional corporation* itu banyak Kopi Bajawa yang masuk dipakai di situ Pak. Nah itu kita ingin tahu Pak soal itu.

DIREKSI PERUM PERHUTANI:

Mungkin kami bisa sampaikan begini Pak, kita pun sebenarnya memang untuk kopi ini Pak, kita punya kopi yang memang ditanam oleh masyarakat di lahan kita dengan pemanfaatan di bawah tegakan. Itu pun kami belum bisa mengoptimalkan secara bisnis. Ini baru penataan dari kami Pak, tahun ini kami baru melakukan inventarisasi dan penataan untuk menjadi suatu bisnis. Karena itu bukan ranah kami, kami pun menggandeng PTP ini Pak, supaya apa yang kami lakukan ini memberikan hasil yang sangat luar biasa.

Jadi dalam konteks, apa lagi teman-teman yang di NTT, NTB segala macam, barang kali nanti bentuknya adalah kolaborasi saja Pak kita Pak. Kolaborasi bagaimana yang di kita juga punya potensi besar tapi belum tertangani secara baik. Kemudian PTP sendiri Pak kehilangan lahan. Jadi kami pun begini Pak, baru tahu bawah apa yang dilakukan oleh PTP untuk kerja sama masyarakat, ternyata masyarakatnya yang menggarap, masyarakat yang menggarap lahan di bawah tegakan. Oleh karena itu sekalian kami datang untuk bersinergi, dari pada diam-diam. Karena PTP juga sama dengan Perhutani Pak, 1998 hampir 80% lahannya diserobot oleh masyarakat yang sampai saat ini kami tahu PTP XII enggak mampu berbuat apa-apa atas lahan yang dikuasai oleh masyarakat.

Nah yang ada potensi sekarang di kami, untuk gambaran sementara sekitar 55.000 hektar Pak, lahan kopi yang berada di bawah tegakan. Ini yang akan kami tata, di mana saat ini masyarakat itu memberikan *sharing*nya sudah berupa uang hasil panennya, yang kita belum bisa kontrol. Sesungguhnya berapa sih panen mereka di setiap luasan itu? Ini yang sedang kita tertibkan Pak. Terus terang kami belum melangkah untuk penertiban menuju bagaimana kopi ini bisa menjadi *ikon*.

Di beberapa LMDH sudah ada yang menghasilkan Pak, dan kemarin juga menjadi sempat ikut pameran di Manggala. Beberapa contoh juga kami membawa, nanti bisa yang berkenan untuk menikmati, ada nanti di pojok di belakang. Tetapi memang baru *spot-spot* kecil Pak. Terus terang itu menjadi, tadi dorongan dari yang terhormat para anggota dewan barang kali akan menjadi sesuatu yang lebih katakanlah membudaya secara nasional ketika para pelaku di misalnya masing-masing PTPN atau broker-broker yang sekarang kopi menyeberang dari.

Terus terang Pak, kopi dari tempat kami, kami dari Malang Selatan Pak, juga cukup terkenal. Tapi saat ini kopi itu jalan-jalan. Brokernya dari Medan. Nanti Medan mungkin juga berkolaborasi dengan Bali. Nah ini yang sekarang digoreng orang secara nasional. Memang belum tertata baik saya lihat Pak. Mungkin ini sesuatu yang baik yang akan diinisiasi oleh Komisi IV bagaimana bisnis kopi di Indonesia ini akan menjadi tertata. Saya kita itu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Coba Pak Dirut, biar *clear* ini. Biar *clear*, batas Tupoksi Perhutani itu sampai di mana? Kan ada PTP kan? Ini kan persepsi kita seluruh hamparan itu kewenangannya oleh Perhutani. Coba batasan kewenangan di mana? Hutan yang mana yang dikuasai penguasaan Perhutani dan PTP? Jawa Timur satu, misalkan ada PTP XII, ada PTP X dan seterusnya. Silakan Pak Dirut.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti Pak Ansy lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sedikit saja. Tambahan.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Tambahan sedikit. Apakah bekerja itu dalam konteks ini karena penjelasan, apakah berdasarkan penugasan? Apakah tidak bisa juga dalam konteks misalnya mengambil kreasi, bersikap kreatif, inovasi? Karena melihat bahwa kita punya potensi di satu sisi yang ini juga harus dikembangkan. Mohon maaf Pak, ini Bapak mereka ini kan korporasi. Berarti *mindset*nya itu memang harus bisa menangkap peluang, mengkreasi sesuatu yang tidak ada menjadi ada Pak. Kan begitu? Bukan lagi mentalitasnya birokrasi pemerintahan Pak, mohon maaf.

Jadi ya orang bilang, *survival of the fittest* itu sudah lewat, sekarang *survival of the fastest*. Yang paling cepat yang menangkap peluang, yang paling cepat bisa berkreasi dan berinovasi itu yang akan mendapatkan manfaat dalam pertarungan hari ini Pak. Makanya mohon maaf Pak, kalau jawabnya penugasan itu saya juga anggota DPR RI, saya tunggu ditugaskan fraksi baru saya omong? Kan begitu. Nah saya itu ingin melihat Bapak-bapak itu berpikir *out of the box* juga. Kalau ada kendala-kendala hambatan birokrasi, mari kita pikirkan bersama, kita cari alternatif solusinya. Tetapi jangan hal seperti ini membuat kita terperjara Pak.

Mohon maaf, saya kira ini harus, ini soal *mindset* kita, paradigma kita dalam memandang sebuah persoalan Pak, kan begitu? Tentu kami akan bicara juga dengan Dirjen Horti nanti terkait dengan kopi dan yang lain-lain tadi. Tetapi akan sangat baik, kalau Bapak mereka juga bisa meyakinkan, Pak ini ada potensi begini, ini kenapa kita tidak kembangkan, seperti itu. Nah kita ingin pikiran-pikiran *smart* seperti itu juga lahir dari berbagai pihak Pak. Mungkin juga ke depan, kita bicara, kita perlu bicara narasi besar Pak, bukan yang kecil-kecil. Besar dulu, bicara pada level paradigma, diturun pada level regulasi, sampai aksi implementasi yang rijit dan *detail* Pak. Itu yang kita mau tahu Pak. Sehingga bangsa kita ini ke depan juga bisa terbang. Kalau tidak, kita hanya akan mengalami proses repetitif dari waktu ke waktu, ya tambal sulam saja Pak. Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan Pak Dirut.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Terima kasih Pak.

Tadi membedakan kawasan kami dengan PTP. Berdasarkan PP No. 72 tahun 2010, Perhutani melakukan pengelolaan hutan yang diklasifikasikan hutan produksi dan hutan lindung. Jadi kalau misalkan lahan itu adalah hutan produksi, hutan lindung, sudah pasti Perhutani. Kalau PTP basis dasar hukumnya lahan tersebut adalah HGU. Itu Pak, perbedaan yang mendasarnya. Lanjut Pak, oke.

Ibu Lulu, terkait dengan kopi. PS, memang konsep PS ini waktu disusun 3 tahun yang lalu Bu memang harus memberikan akses kepastian lahan, terus di situ dapat modal kerja, dalam hal ini.

KETUA RAPAT:

Bapak yang belum Shalat Ashar silakan bergantian. Silakan, boleh. Biar Pak Dirut dengan yang lain. Ditinggal saja *gantian*, silakan.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Kirain saya juga boleh langsung ke sana.

KETUA RAPAT:

Boleh, sebentar lagi.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Iya.

Tadi PS kepastian lahan, akses pasar, juga bantuan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dari kementerian. Jadi konsep PS yang kita susun bersama ini dengan kementerian itu sudah dalam bentuk harusnya suatu Pak Ketua yang komprehensif yang melibatkan semua pihak.

Jadi saya ingat waktu itu dulu Bu, waktu pertama kali kami sosialisasi, kalau enggak salah di tempat Bapak deh waktu itu. Jadi ada yang mengatakan,

KETUA RAPAT:

Awal perkebunan sosial di tempat saya. Jadi studi bandingnya di sana nanti ya. Bermalam di Bromo, kan masuk wilayahnya ini. Silakan lanjut.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Jadi mereka bertanya, kalau misalkan ini adalah suatu program yang bagus, tetapi ini sampai kapan program ini dan kalau misalkan Pemerintah yang ada saat ini tidak berubah, apakah program ini akan hilang atau kami akan ditinggalkan? Karena pertama, akan diberikan KUR. KUR ini setelah dimanfaatkan, dihasilkan produksi kan harus dibayar hutangnya. Terus dijual ke mana? Nah jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita susun ke sistem perhutanan sosial ini Pak dengan melibatkan semua instansi. Tidak hanya Perhutani saja, tidak hanya PTPN saja, tapi semuanya untuk bisa jadi. Jadi kalau secara singkat, Bu Luluk, memang salah satu komoditas yang

ada di perhutanan sosial ini yang menjadikan skema itu adalah PDLP untuk kopi, termasuk ke dalam ini.

Boleh saya pindah ke Pak Johan? Karena Pak Krisantus saya enggak ada jawaban, bukan di saya. Pak Johan? Pak Johan tidak ada. Pak Muhtarom? Nah Pak Muhtarom. Belum Pak, nanti Pak. Karena di Kalbar ya Pak ya? Nanti saya kasih rekan saya yang jawab. Pak Muhtarom, saya senang sekali di tempat Bapak Madiun dengan orangnya berhasil dan sama-sama dulu waktu Bapak menjabat menjaga hutan kita sama-sama. Pertanyaan Bapak adalah terkait dengan evaluasi.

Memang pada saat PS ini dikeluarkan, selalu bertanya dengan khususnya IPHPS Pak, dengan 35 tahun. Ada kekhawatiran-kekhawatiran apakah ini akan *sustain*, apakah ini benar akan dibangun? Sehingga diperlukan suatu evaluasi. Evaluasi ini sesuai dengan ketentuan Permen maupun Per dirjen nya itu adalah di Kementerian LHK. Tiap tahun ya Pak ya? Tiap tahun evaluasinya, dilakukan oleh Kementerian LHK dan saya sangat setuju harus kita cermati sama-sama Pak. Terima kasih.

Bu Yessy kopi Kalbar. Pak Haerudin? Oh Pak Haerudin hadir, terima kasih. Jadi kalau misalkan Bapak di mana saya merasakan dipanggil Presiden di hadapan petani bahwa Pak Dirut jangan sampai lebih kolonial dari pada kolonial. Itu terasa sekali. Bagaimana itu menjadi suatu masukan yang sangat berharga buat Perhutani. Ada selama 3 tahun ini Pak Wakil Ketua, yang mungkin saya belum sampai melakukan pekerjaan dengan baik yaitu menyelesaikan permasalahan di tingkat tapak, ya? Kita tadi bahas masalah korporasi, rencana, pendapatan, laba. Tapi bagaimana masalah sosial, permasalahan yang ada, kerja sama yang terjadi di tingkat tapak.

Jadi Bapak sampaikan juga masalah bagaimana laba, neraca disampaikan dan juga Bapak ingatkan kepada kami masalah tegakan, sumber daya hutan. Itu juga kami menyadari bahwa mohon maaf saya enggak ada datanya, dalam 2 tahun terakhir ini kita mendapatkan tugas RHL yang cukup besar. Tahun lalu berapa Pak? Tahun lalu 43.000, eh tahun ini. Tahun lalu 43.000 hektar. Tahun lalu 5.000. Dan tahun depan juga masih ada sekitar 20an ribu hektar.

F-PAN (HAERUDIN, S. Ag, M.H.):

Izin Pimpinan.
Itu di Jawa atau Indonesia?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Di Jawa Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S. Ag, M.H.):

Oh Jawa.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Iya Jawa Pak. Oke. Nanti mungkin akan ditambahkan dari teman-teman.

Pak Darori salam jumpa kembali Pak. Saya ingat waktu Pak, pertama kali saya *join*, saya diingatkan Pak Darori untuk hati-hati. Hati-hati selalu punya catatan. Saya selalu ingat Pak, semua, segala hal yang saya tanda tangan saya *copy* untuk

kemudian hari kalau ada apa-apa. Jadi terkait dengan implementasi PS ya Pak ya? Mungkin Bapak sudah mengikuti panjang lebar dan juga tidak disampaikan oleh Kementerian LHK dan juga mungkin Bapak sudah mendapatkan informasi-informasi terkait implementasi PS. Ada tumpang tindih, ada yang melakukan penebangan sebelum diserahkan dan sebagainya. Kemarin juga sebagai mana tadi di awal sampaikan Pak, sudah juga menjadi temuan BPK sampai ke BAKN Pak. Dan oleh karena itu kami bersama Kementerian LHK menegaskan ketentuan aturan mainnya Pak, supaya ini bisa tidak terulang kembali.

Pak Slamet? Oke. Pak Bagus. Pak Bagus? Pak Bagus, nah. Ini Bapak sampaikan mengenai Kopi Bali. Tadi di Trigana saya sangat setuju. Saya enggak mau juga menunggu penugasan Pak. Jadi kalau misalkan ini jujur tadi teman-teman mengatakan pengembangan secara kopra terhadap kopi ini bagi kami baru karena memang selama ini agroforestri dan masyarakat yang melakukan dan kami mau serius Pak. Jadi mungkin setelah ini kita coba kembangkan apa yang kita bisa kerja samakan. Dan saya yakin sejak operasi itu bisa bekerja sama dengan tempat dan dengan siapa pun juga. Iya Pak? kita tindak lanjuti setelah ini.

Pak Asep sudah tidak ada. Oke. Iya Madu Trigona Pak kerja sama itu. Iya nanti kita ke sana, kita cari bentuk kerja sama. Nanti kita kembangkan sama-sama. Pak Wakil Ketua mungkin dari saya cukup.

KETUA RAPAT:

Silakan. Gadis Palembang ini.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Oh belum. Ada yang belum *kejawab* mungkin Pak.

KETUA RAPAT:

Oh iya, tertulis saja. Oh iya, Kalbar belum. Marah nanti. Kakak beradik itu.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Belum, belum.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III (Ir. B.M. SETIO BASKORO):

Baik Pak Ketua, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Krisantius Kurniawan sekaligus mungkin juga pertanyaan dari,

KETUA RAPAT:

Krisantus. Sudah *diselameti* Pak itu di Dayak.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Krisantus. Mohon maaf. Saya baca. Pak Kurniawan dan juga Bu Yessy Melania kalau enggak salah, mohon dimaafkan.

Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Kurniawan maupun mbak Yessy atas masukannya. Kebetulan selama 9 bulan ini saya di Inhutani III juga melakukan pemetaan areal dan sama seperti yang Bapak sampaikan dan mbak Yessy, kami agak prihatin dengan kondisi yang ada di sana. Namun, izin kalau boleh saya juga menceritakan kronologis apa yang terjadi di sana. Yang saya ketahui dari cerita rekan-rekan sebelumnya, karena kebetulan saya informasinya juga dari pendahulu saya dan sebagainya. Mungkin kalau tadi ada sesepuh dari Inhutani III bisa menambahkan saya rasa akan lebih baik.

Namun, sebelum saya menceritakan, saya berterima kasih. Mudah-mudahan dengan tadi apa yang disampaikan Pak Ketua ke depan bahwa penanganan Kalbar ini kita bisa kerja sama. Kebetulan mbak Yessy juga putri dari Pak Bupati yang tahun 2018 mungkin ikut ada peran tangan kesepakatan mbak. Nah itu mungkin ikut. Juga mungkin mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai rencana.

Jadi memang di Nanga Pinoh seluas 119.000 hektar itu sebelumnya sejak tahun 1992 sampai tahun 2000 itu pernah ditanami seluas, sejarahnya itu seluas 42.000 Pak. Itu ada di situ pinus, ada di situ karet, ada di situ akasia. Kemudian kalau enggak salah juga pada tahun 2004 kalau enggak salah, kalau salah mohon dimaafkan. Sampai tahun 2014 itu terjadi kerusakan. Kemudian bahkan waktu itu alat Inhutani III itu alat-alat beratnya juga ikut terbakar. Kalau enggak salah kerugiannya itu mencapai 150 milyar pada saat itu, sehingga tersisalah 1000 hektar atau 900 hektar tanaman yang ada di sana. Dan itu sekarang sudah bisa kami gali kembali Pak potensinya yaitu getah pinus.

Nah ini justru yang jadi primadonanya Inhutani III sekarang karena terus terang justru dengan pinus ini kita bisa bekerja sama dengan masyarakat di sana. Karena terus terang justru animo itu malah dari masyarakat dan bahkan masyarakat juga yang menjaga bagaimana manajemen penyadapan getah pinus itu bisa sesuai dengan SOP. Sehingga terakhir-terakhir ini pertama memang tenaganya dari Jawa, tapi ternyata dalam pengembangannya justru tenaga dari lokal lebih baik karena mereka merasa ini harus bisa *sustain*.

Jadi mereka betul-betul menjaga supaya sadapannya benar, begitu Pak. Dan itu sudah kami lakukan Pak, juga melalui kerja sama dengan koperasi-koperasi lokal yang tentunya itu masyarakat sana yang sebagai anggota. Itu baru saja Pak terjadi di bulan November yang lalu, September-November. Dan itu mudah-mudahan akan segera dilaksanakan. Ada beberapa wilayah yang bisa digali. Pinus itu wilayah utara dan selatan. Selama ini selatan sudah kami gali, sudah dimulai disadap. Ini kemudian rencananya ada di wilayah utara.

Kemudian memang pada tahun 2013 itu mbak Yessy juga tahu mungkin Pak Kurniawan juga tahun bahwa Kementerian LHK mengeluarkan SK sehingga areal di Nanga Pinoh terbagi menjadi dua. Yaitu satu, areal HP. Yang satunya lagi areal APL seperti apa yang disampaikan. Sehingga penanganannya juga harusnya menjadi berbeda. Jadi untuk penanganan HP Bu Yessy, kami telah melakukan kerja sama dengan investor yang tentu memang oleh investor ini memang dicarikan oleh Perum dari Sugar Grup, namanya PT Sintang Melawi Perkasa. Ini akan melaksanakan penanaman karet seluas 30.000 hektar. Tapi memang ini baru akan dimulai, mbak Yessy.

Nah saya juga sangat berharap nanti pada saat perkembangan progres penanaman dan sebagainya, saya bisa berhubungan mungkin dengan Pak Kurniawan sama mbak Yessy supaya sama-sama kita lihat. Sehingga kami mendapatkan banyak masukan untuk bisa mempercepat progres penanaman areal yang ada di Kalbar ini. Jadi untuk APL itu memang, mungkin mbak Yessy juga tahu

bahwa telah terjadi kesepakatan antara Bupati Sintang dan Bupati Melawi dan juga Gubernur pada saat itu bahwa kita sama-sama mencari investor. Jadi itu memang terus terang dari kami Inhutani III belum jumpa investornya. Jadi mungkin nanti dengan bantuan mbak Yessy kita bisa kerja sama menjembatani untuk berhubungan dengan bupati dan gubernur juga. Karena ini,

KETUA RAPAT:

Pak Dirut. Begini loh. *Next* begini, 2020 coba dua tokoh ini diajak diskusi lah, ya?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Siap.

KETUA RAPAT:

Dan reses nanti didampingi, kan begitu Pak Kris dan ya?

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Ajak-ajak kami lah Pak.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya tersiratnya begitu kan? Iya sudah cukup. Cukup Pak Dirut.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Di Sanggau bagaimana Pak?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Iya Pak?

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Yang di Kabupaten Sanggau?

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Enggak ada.

Kemudian masalah manajemen tadi Pak. Jadi itu mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Jadi sekarang kita sudah memberdayakan orang lokal Pak.

KETUA RAPAT:

Nah tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Kan begitu.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Iya Pak siap.

KETUA RAPAT:

Apa lagi dirutnya Perhutannya masih muda ini. Tapi diajak itu berdua itu.

DIREKTUR UTAMA INHUTANI III:

Manajemennya juga baru Pak, baru tahun-tahun ini. Siap.

KETUA RAPAT:

Diajak diskusi, kalau reses didampingi. Masuk kan? Sip.
Kiki 1 menit. Sudah? loh reses kan nanti didampingi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya Riezky Aprilia, saya dari Sumatera Selatan, panggilannya Kiki. Saya mohon maaf dari tadi mungkin saya di badan lain, Pak Ketua izin. Tapi kurang lebih saya tadi di awal sempat berdiskusi dengan Pak Dirut Perhutani memang. Saya mempertanyakan juga terkait Sumatera Selatan tapi Inhutani ya kalau itu ya yang *in charge* ya? Begitu.

Yang pasti begini, kalau saya sih cuma sekedar saran. Ini sekedar saran bahwa Perhutani, Inhutani dalam keadaan hari ini harus jujur. Harus jujur terhadap realita, *bussiness plan* ke depan seperti apa, *action plan*nya seperti apa, ayo kita merumuskan bersama, begitu loh. Apakah ini *visible* atau tidak. Jujur mau kopi kek, mau apa, di Sumsel pun juga ada, karet apa lagi, begitu loh. Tapi kan wilayah kami ini kayanya cuma fokusnya orang-orang tahunya sawit doang, padahal kopinya banyak. Teh apalagi, kan begitu ya?

Jadi ke depannya saya cuma menyampaikan, *be honest*. Apa pun yang kita bisa kerja sama, nanti kita sama-sama cari solusi terbaik supaya badan ini juga bisa, iya kita bisa bersama-sama masalah *packaging* atau apalah. Iya saya ini pemakai minyak kayu putih Pak Ketua, dari dulu ya dari bayi sampai *segede* begini. Cuma iya, kok saya enggak pernah lihat produknya ya di mana, begitu? Nah kemarin sama seperti halnya saya sarankan juga dengan Bulog contohnya, *Ayo out of the box, progressive*, masuk bila perlu yang retail-retail modern wajib menerima produk Inhutani atau pun Perhutani. Kan bisa begitu.

Itu saja, terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semua tanggapan telah dijawab dengan belum sempurna karena pertanyaan manusia, yang menjawab manusia.

Meja redaksi mencoba menyimpulkan. Coba ditayangkan, kita simak bersama-sama tanpa dibacakan, biar cepat ini. Kalau setuju langsung saja tok. Silakan ditayangkan. Mana tayang? Kesimpulan. Komisi IV DPR RI, ini sudah 2 menit, belum Shalat Ashar. Saya baca.

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan prospek pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai V. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong agar Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai IV selaku perusahaan BUMN dapat terus, oh sampai V, dapat terus selaku perusahaan dapat terus meningkatkan kinerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga dan mengelola aset negara dengan terus melakukan upaya pengembangan usaha HHBK dan jasa lingkungan.

Sepakat? Normatif ini kan?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sabar Ketua, enggak *kebaca*. Ini belum ada.

KETUA RAPAT:

Mana? Enggak, iya ini kan juga cukup bisa didengar kan? Kecuali yang terlambat masuk, enggak detail. Sudah cocok, setuju? Sebentar dulu, masih *mindahin* ini ke sini terus. Pak Dirut bagaimana sepakat? Kalau *sampeyan* kan harus sepakat. Sepakat ya.

(RAPAT: SETUJU)

Dua.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pak Dirut, kalau keberatan sampaikan saja Pak Dirut.

KETUA RAPAT:

Sudah *ngangguk-ngangguk* bagaikan perawan, kan begitu kan kalau dipinang. Sepakat ya?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Sepakat Pak.

KETUA RAPAT:

2. Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai V terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka mendapatkan alternatif solusi atas permasalahan perusahaan, antara lain:
 - a. Penambahan kawasan hutan,
 - b. Pelaksanaan pembayaran kewajiban perusahaan baik PNBB maupun PBB, dan
 - c. Permasalahan lainnya.

Sepakat kan? Setuju? Pak Dirut?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai V agar terus meningkatkan kinerja dalam pengembangan usaha HHBK dan jasa lingkungan dengan pola Perhutanan Sosial dengan tetap mengedepankan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberian akses legal kepada masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Anggota? Perhutani?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Pak yang di luarnya maksudnya bagaimana ini? Kita kan hanya di dalam kawasan hutan.

KETUA RAPAT:

Di sekitar kawasan hutan.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Oh, baik-baik.

KETUA RAPAT:

Tetangga lah Pak. Iya tetangga. Di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sudah?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Sudah.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai V agar terus meningkatkan pelaksanaan pengawasan kawasan hutan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan perambahan kawasan hutan oleh warga masyarakat.

Anggota? Tambah pengusaha ya? Iya, ini jeruk minum jeruk ini. Wakil rakyat mempersoalkan rakyat, iya. Permasalahan perambahan kawasan hutan oleh perusahaan dan swasta, iya? Perusahaan, enggak pernah MoU dengan perusahaan ini Pak. Ada perusahaan Pak?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Perusahaan, ada.

KETUA RAPAT:

Ada Institusi Pemerintah yang hanya bermodalkan papan nama?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Tadi yang 12.000 itu kan termasuk bermasalah, biar kita dorong selesaikan Pak Dirut, iya kan? Iya jadi korporasi saja Pak, jangan perusahaan.

KETUA RAPAT:

Dan Institusi Pemerintah lainnya kan? Juga ada kan? Enggak punya sertifikat, hanya modal papan nama. Ini dimasukkan enggak? Di kampung saya ada kan.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Masukin Pak, masukin. Setuju.

KETUA RAPAT:

Iya lah. Sebagai mana, di kampung saya itu ada. Milik institusi lah. Bukan, kalau milik saya, saya bagi ke rakyat. Banyak ini, di kampung saya itu ribuan hektar tidak dikelola sendiri oleh institusi itu, namun diberikan kepada perusahaan swasta tanpa keterlibatan warga masyarakat sekitarnya. Nah ini penting dimasukkan, ayo institusi yang tidak punya dasar hukum penguasaannya.

Bunyinya, perambahan kawasan hutan oleh korporasi, masyarakat perorangan ya dan institusi yang Pemerintah yang bukan kewenangannya. Yang halus sedikit. Silakan Pak Darori, iya? Itu kan?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Dasar hukum.

KETUA RAPAT:

Sudah, itu terlalu kasar itu. Disangkanya enggak *ngerti* hukum di negara hukum. Padahal itu aparat penegak hukum, kan begitu kan? Aparat keamanan. Agak sopan sedikit biar kita bijak. Yang jelas Pak Dirut Perhutani lapor Presiden agar memanggil, kan begitu kan? Sudah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI akan kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai V dengan menghadirkan mitra Pemerintah terkait dalam rangka menindak lanjuti dan mendapatkan alternatif solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing unit usaha.

Termasuk anggaran kan? Tadi bilang bubar, sekarang setuju. Setuju?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mulai tahun anggaran 2002 dapat memberikan kesempatan kepada Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai V untuk menjadi mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Setuju? Ini dulu Pak. Kok *sampeyan* agresif. Setuju? Sudah sepakat.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai V untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sudah sepakat, setuju? Oke.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terakhir.

8. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan kunjungan kerja spesifik untuk melihat secara langsung permasalahan dalam pengelolaan Hutan Produksi Lestari oleh Perum Perhutani dan PT. Inhutani I sampai V.

Termasuk yang dikuasai oleh Adaro itu ya? Sepakat Pak? Bupati (suara tidak jelas) tadi.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Saya sepakat, tapi ada satu lagi yang belum dimasukkan. Pendalaman secara khusus Biomassa.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Setuju Pak, setuju.

KETUA RAPAT:

Serta pendalaman? Sembilan ini nanti kesimpulannya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Nomor sembilan kan paling bagus.

KETUA RAPAT:

Iya, 9 angka. Iya bintangnya NU kan 9 Pak. Cocok. Delapan ini setuju? Kunspik?

(RAPAT: SETUJU)

Sembilan, silakan suarakan Pak Bupati, yang punya hajat.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Komisi IV akan menindak lanjuti pendalaman rencana pengembangan Biomassa oleh Perhutani dan Inhutani. Memang kita akan (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Agar, Perum Perhutani melakukan pendalaman terhadap agroforestri Biomassa? Setuju?

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Pendalaman melibatkan instansi terkait?

KETUA RAPAT:

Iya, dengan instansi terkait kan ini? dengan instansi terkait.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Dengan ESDM, dengan instansi/ lembaga terkait?

KETUA RAPAT:

Oh iya lah, lembaga terkait. Agar supaya tercapai sinkronisasi antar lembaga. Antar institusi Pemerintah. Nah maka percepatan visi dan misinya Presiden dan Wakil Presiden. Menteri kan enggak punya visi dan misi. Iya? Oh cocok? Iya sudah. setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Terima kasih. Dengan berakhir sudah RDP pada hari ini, atas nama Pimpinan dan anggota Komisi IV mana kala ada ucapan, salah dan khilaf, kami mewakili semuanya mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya tutup, silakan komentar terakhir.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Enggak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Enggak ada? Sudah? Cukup sempurna kan? Iya.

DIRUT PERUM PERHUTANI:

Cukup Pak.

KETUA RAPAT:

Oh cukup.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* bila amin, RDP pada hari Senin saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.20 WIB)

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo

NIP. 196301221991031001